

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0°45'-2°45' LS dan 101°10'-104°55' BT di bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura *Growth Triangle*).

Disamping itu, peluang Jambi kedepan dengan adanya pembukaan Terusan Thai (sebelumnya disebut Terusan Kra atau Terusan tanah genting Kra) yaitu terusan yang akan melewati Thailand Selatan untuk mempersingkat transportasi di wilayah tersebut akan membuka peluang baru bagi Provinsi Jambi karena posisinya yang menghadap dan terbuka langsung ke Laut Cina Selatan. Pembukaan Terusan Kra ini akan mengubah geo-ekonomi global (khususnya Asia Timur) mengingat arus transportasi laut yang selama ini melewati Selat Malaka akan langsung berubah rute pelayarannya melalui Terusan Kra. Disamping itu Pelabuhan Sabang yang berada di ujung barat Indonesia bisa menjadi kota pelabuhan yang besar, menghadap langsung ke Laut China Selatan. Peluang lainnya adalah rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda akan membuka aksesibilitas ke Pulau Jawa.

Secara geografis, luas wilayah Provinsi Jambi tercatat seluas 53.435,72 km² yang terdiri dari :

- 1) Kabupaten Kerinci 3.808,50 Km² (7,13%),
- 2) Kabupaten Bungo 6.461,00 Km² (12,09%),
- 3) Kabupaten Tebo 6.802,59 Km² (12,73%),
- 4) Kabupaten Merangin 7.451,30 Km² (13,94%),
- 5) Kabupaten Sarolangun 6.175,43 Km² (11,56%),
- 6) Kabupaten Batanghari 5.804,83 Km² (10,86%),
- 7) Kabupaten Muaro Jambi 5.246,00 Km² (9,82%),
- 8) Kabupaten Tanjab Barat 5.645,25 Km² (10,56%),
- 9) Kabupaten Tanjab Timur 5.444,98 Km² (10,19%),
- 10) Kota Jambi 205,38 Km² (0,38%).
- 11) Kota Sungai Penuh 391,5 Km² (0,73%).

Secara topografis, Provinsi Jambi terdiri atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian yaitu (Bappeda, 2005):

- 1) Daerah dataran rendah 0-100 m (69,1%), berada di wilayah timur sampai tengah. Daerah dataran rendah ini terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagian Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin;
- 2) Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (16,4%), pada wilayah tengah. Daerah dengan ketinggian sedang ini terdapat di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin serta sebagian Kabupaten Batanghari; dan
- 3) Daerah dataran tinggi >500 m (14,5%), pada wilayah barat. Daerah pegunungan ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh serta sebagian Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.

Provinsi Jambi berada di bagian tengah Pulau Sumatera memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 m dpl di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1.000 m dpl, ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan

yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Tabel 2.1 Klasifikasi Ketinggian di Provinsi Jambi

Topografi/ Ketinggian (m/dpl)	Luas		Wilayah/Kabupaten
	Ha	%	
Dataran Rendah (0 - 100)	3.431.165	67	Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Merangin, Batang Hari
Dataran sedang (100 – 500)	903.180	17	Sebagian Sarolangun, Tebo, sebagian Batang Hari, Kota Sungai Penuh, Merangin, sebagian Tanjung Jabung Barat.
Dataran Tinggi (>500)	765.655	16	Kerinci, Kota Sungai Penuh, sebagian Merangin, sebagian Sarolangun dan sebagian Bungo.
Jumlah	5.100.000	100	

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Pada dataran rendah didominasi oleh tanah-tanah yang penuh air dan rentan terhadap banjir pasang surut serta banyaknya sungai besar dan kecil yang melewati wilayah ini. Wilayah ini didominasi jenis tanah gley humus rendah dan orgosol yang bergambut. Daya dukung lahan terhadap pengembangan wilayah sangat rendah sehingga membutuhkan input teknologi dalam pengembangannya. Dibagian tengah didominasi jenis tanah podsolik merang kuning yang kesuburannya relatif rendah. Daya dukung lahan cukup baik terutama pada lahan kering dan sangat potensial untuk pengembangan tanaman keras dan perkebunan. Pada bagian barat didominasi dataran tinggi lahan kering yang berbukit-bukit. Wilayah ini didominasi oleh jenis tanah latosol dan andosol. Pada bagian tengah Kabupaten Kerinci banyak di temui jenis tanah alluvial yang subur yang dimanfaatkan sebagai lahan persawahan irigasi yang cukup luas. Beberapa jenis tanah yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah di Provinsi Jambi

No	Jenis Tanah	Jumlah	%
1	Podzolik Merah Kuning	2,036,386	39.93
2	Latosol	952,386	18.67
3	Gley Humus Rendah	547,83	10.74
4	Andosol	354,406	6.95
5	Organosol	308,338	6.05
6	Podzolik Coklat + Andosol + Podzolik	275,652	5.40
7	Podzolik Merah Kuning	236,343	4.63
8	Alluvial	199,553	3.91
9	Hidromorfik Kelabu	83,743	1.64
10	Latosol Andosol	60,032	1.18
11	Rawa Laut	42,951	0.84
12	Komplek Latosol + Litosol	2,38	0.05
Jumlah		5,100,000	100.00

Sumber : RTRW Provinsi Jambi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jenis tanah yang dominan di Provinsi Jambi adalah Podzolik Merah Kuning dengan luas 2.036.386 hektar atau 39,93% dari luas wilayah sedangkan jenis tanah yang terendah adalah kompleks latosol dan litosol yaitu 2.380 hektar atau 0,05%.

Dilihat dari pola aliran sungai, dimana di daerah hulu pola aliran sungainya berbentuk radial terutama di Kabupaten Sarolangun, Merangin dan Kabupaten Kerinci, sedangkan di daerah pesisir berbentuk paralel. Sungai-sungai di Provinsi Jambi terutama Sungai Batanghari sangat berpengaruh pada musim hujan dan kemarau. Pada musim hujan kecenderungan air sungai menjadi banjir, sebaliknya pada musim kemarau kecenderungan air sungai menjadi dangkal dan fluktuasinya dapat mencapai 7 (tujuh) meter. Dari kondisi ini sangat berpengaruh pula pada permukiman penduduk yang tinggal di sepanjang WS Batang Hari baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat usaha tani.

Berdasarkan kondisi topografi, kelerengn dan kondisi hidrologi, dapat disimpulkan berbagai karakter lahan di Provinsi Jambi sebagai berikut :

- a) Pertanian lahan basah (LB), luasnya 684,060 hektar atau 13,41 % dari total luas Provinsi Jambi, dengan kemiringan 0-3 % dan ketinggian 0-10 m dpl. Terdapat di wilayah timur bagian utara sepanjang pesisir pantai dan bagian wilayah tengah yang merupakan WS Batanghari dan sub WS nya.
- b) Pertanian lahan kering dataran rendah sampai sedang (LKDR) luasnya 2.747.105 hektar atau 53,87 % dari luas total Provinsi Jambi dengan kemiringan 3-12 % dan ketinggian 10-100 m dpl. Terdapat di wilayah timur bagian selatan (Tanjung Jabung Timur), sebagian besar wilayah tengah kecuali WS (Kota Jambi, Batanghari, Bungo, Tebo bagian tengah dan selatan) dan wilayah barat (Sarolangun, Merangin bagian selatan dan Kerinci bagian tengah).
- c) Pertanian lahan kering dataran tinggi (LKDT) luasnya 903.180 hektar atau 17,71 % dari total luas Provinsi Jambi dengan kemiringan 12-40 % dan ketinggian 100-500 m dpl. Umumnya terdapat di wilayah barat (seluruh Kerinci kecuali bagian tengah, Sarolangun-Merangin bagian utara dan barat serta Bungo, Tebo bagian barat dan utara). Sedangkan sisanya 15,02 % merupakan dataran tinggi dengan ketinggian di atas 500 m dpl merupakan daerah pegunungan dari rangkaian pegunungan bukit barisan yang membujur di sebelah barat wilayah Provinsi Jambi.

Berdasarkan karakter kompleks ekologi, perkembangan kawasan budidaya khususnya untuk pertanian terbagi atas tiga daerah yaitu kelompok ekologi hulu, tengah dan hilir. Masing-masing memiliki karakter khusus, dimana pada kompleks ekologi hulu merupakan daerah yang terdapat kawasan lindung, ekologi tengah merupakan kawasan budidaya dengan ragam kegiatan yang sangat bervariasi dan kompleks ekologi hilir merupakan kawasan budidaya dengan penerapan teknologi tata air untuk perikanan budidaya dan perikanan tangkap.

Tabel 2.3 Karakter Lahan Pertanian di Provinsi Jambi

Uraian	Karakter lahan pertanian		
	LB	LKDR	LKDT
1	2	3	4
Proporsi luas Lahan	18,41%	53,87%	17,71%
Kemiringan	0-3 %	3-12 %	12-40 %
Topografi	0-10 m dpl	10-100 m dpl	100-500 m dpl
Penggunaan lahan eksisting	- Hutan rawa - Hutan bakau, nipah - Semak belukar - Sawah tadah hujan - Sawah pasang surut	- Hutan primer - Ladang berpindah - karet rakyat - Hultikultura - Sawah irigasi	- Hutan primer - Ladang berpindah - kayu manis - Hultikultura - Sawah irigasi
	- Sawah irigasi - Kebun kelapa - Permukiman - Hutan lindung	- kelapa sawit - Permukiman - Hutan lindung	- Semak belukar - Permukiman - Hutan lindung
Upaya pemanfaatan lahan	Input teknologi menengah tinggi	Ketersediaan unsur hara	Keterbatasan lahan karena hutan lindung
Komoditi	- Sawah pasang susut	- Sawah irigasi	- Casiavera
potensial	- Sawah tandah hujan - Sawah irigasi - Palawija, hultikultura - Kebun kelapa, kopi kakao - Perikanan laut & tambak	- Palawija - Hultikulture - Peternakan - Perkebunan sawit - Karet, kopi, kakao - Perikanan kolam & tambak	- Sawah irigasi - Holtikultura - Kopi - Perikanan kolam
Cakupan wilayah	- Tanjung Jabung Barat dan Timur - WS Batanghari	- Tanjab Timur - Kota Jambi - Batanghari - Bungo, Tebo tengah & selatan - Sarolangun	- Kerinci kecuali bagian tengah - Bungo, Tebo Barat dan Utara - Sarolangun utara dan barat

Keterangan :

LB : Lahan Basah
LKDR : Lahan Kering Dataran Rendah
LKDT : Lahan Kering Dataran Tinggi

Adapun Penggunaan lahan di Provinsi Jambi secara umum terdiri dari : 1) Lahan Permukiman tercatat 49.631 Ha; 2) Sawah Tadah Hujan tercatat 126.662 Ha; 3) Tegalan/Ladang tercatat 117.516 Ha; 3) Kebun Campuran tercatat 112.787 Ha; 4) Kebun Karet tercatat 1.284.003 Ha; 5) Kebun Sawit tercatat 941.565 Ha; 6) Kebun Kulit Manis tercatat 93.609 Ha; 7) Kebun teh tercatat 4.691 Ha; 8) Semak dan alang-alang tercatat 87.177 Ha; 9) Hutan Lebat tercatat 1.433.470 Ha; 10) Hutan Belukar tercatat 413.406 Ha; 11) Hutan Sejenis tercatat 187.704 Ha; 12) Lain-lain tercatat 47.757 Ha.

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun Kawasan Strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Provinsi Jambi meliputi :

- a. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan)
- b. Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi)
- c. Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau)
- d. Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi)

Untuk Kawasan Strategis Provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi. Penetapan kawasan strategis Provinsi Jambi lebih didasari oleh aspek pertumbuhan ekonomi adalah :

1. Kawasan Muara Bulian - Jambi dan Sekitarnya
2. Kawasan Strategis Perkotaan Muaro Bungo dan Perkotaan Sungai Penuh
3. Kawasan Strategis Pantai Timur Provinsi Jambi - Kawasan Tanjab Barat dan Tanjab Timur.
4. Kawasan strategis Bangko – Sarolangun

Kawasan strategis Provinsi Jambi dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah :

1. Kawasan wisata sejarah Candi Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi.
2. Kawasan Permukiman Suku Anak Dalam di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun.

Sedangkan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Kabupaten Kerinci.

Untuk luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya didominasi oleh Hutan Produksi Tetap dan Taman Nasional. Rincian luas kawasan hutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya yang terdiri dari, Cagar Alam 4.990 Ha, Taman Nasional 657.120 Ha, Taman Hutan Raya 33.943 Ha, Taman Wisata Alam 413 Ha, Hutan Lindung 112.722 Ha, Hutan Produksi Terbatas 264.034 Ha, Hutan Produksi Tetap 1.006.266 Ha, dan Hutan Lindung Gambut 60.810 Ha.

Di Provinsi Jambi terdapat beberapa wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah yang berpotensi terhadap bencana Geologi yaitu di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai penuh dan Kabupaten Merangin yang berupa amblasan, longsor, gempa dan ancaman letusan gunung berapi. Bencana banjir yaitu di Kabupaten Batang Hari dan beberapa kabupaten lainnya yang merupakan kejadian rutin di setiap musim hujan. Selain itu, Provinsi Jambi juga termasuk daerah yang memiliki titik api akibat dari kebakaran lahan dengan wilayah terjadinya kebakaran yang

berada pada Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Tanjung Jabung Barat. Kebakaran ini disebabkan oleh adanya pembukaan lahan baru yang sangat berkaitan dengan lahan-lahan perkebunan baik milik masyarakat maupun perkebunan swasta.

Berkaitan dengan kondisi ketahanan pangan di Provinsi Jambi menunjukkan kecenderungan perkembangan yang positif dimana terlihat dengan meningkatnya beberapa indikator, yaitu:

1. Pada tahun 2011 mengalami peningkatan produksi padi sebesar 42.065 ton atau sebesar 6,69% jika dibandingkan tahun 2010, yaitu dari 628.828 ton GKG menjadi 670.893 ton GKG pada tahun 2011. Kenaikan produksi padi ini terjadi karena adanya peningkatan produktivitas sebesar 0,67 Kw/Ha (1,65%), serta didukung oleh peningkatan luas panen sebesar 7.636 Ha (4,96%).
2. Namun demikian, produktivitas tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015, yaitu sebesar 43,58 Kw/Ha, sementara produktivitas yang telah dicapai adalah sebesar 41,53 Kw/Ha. Hal tersebut disebabkan adanya musim kemarau yang cukup panjang di tahun 2011, sehingga lahan-lahan yang biasa ditanami padi ladang menjadi lebih kering dan pecah-pecah serta tidak memungkinkan untuk ditanami karena ketersediaan air tanahnya juga diragukan keberadaannya. Hal ini menyebabkan terjadinya penundaan jadwal tanam dan pergeseran musim tanam.
3. Komoditi Kedelai juga mengalami peningkatan produksi pada tahun 2011 yaitu dari 5.320 ton pada tahun 2010 menjadi 6.842 ton, atau meningkat sebesar 1.522 ton (28,61%), yang disebabkan karena peningkatan luas panen seluas 1.164 Ha (27,43%), demikian juga produktivitas kedelai yang mengalami peningkatan sebesar 0,12 Kw/Ha (0,93 %) dibanding tahun sebelumnya.
4. Untuk komoditi jagung, terjadi penurunan produksi jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2010 dari 30.691 ton menjadi 27.637 ton pada tahun 2011 atau mengalami penurunan

sebesar 3.054 ton (9,95)%. Penurunan produksi jagung ini terjadi karena adanya pengurangan luas panen sebesar 979 Ha (11,82%) yang disebabkan oleh perubahan iklim yang ekstrim dan bencana alam kekeringan, sehingga banyak lahan produktif dan pertanaman yang mengalami Puso akibatnya terjadi pergeseran jadwal tanam.

5. Pengembangan Karet Rakyat seluas 1.500 Ha. Kegiatan ini telah dimulai tahun 2006 yang lalu sampai dengan tahun 2011 telah dilaksanakan peremajaan dan pengembangan karet rakyat melalui berbagai sumber pembiayaan seluas 86.127,4 Ha. Pengembangan karet sumber dana Perubahan APBD Provinsi tahun 2011, dilaksanakan seluas 1.500 Ha yang didistribusikan bagi 7 kabupaten yaitu : Ma. Jambi 100 ha, Kabupaten Batanghari 250 ha, Kabupaten Bungo 250 ha, Kabupaten Tebo 275 ha, Kabupaten Sarolangun 275 ha, Kabupaten Merangin 300 ha dan Tanjab Barat 50 ha.
6. Pengembangan Kopi Robusta seluas 50 Ha yang dipusatkan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh memberikan dampak multi efek bagi peremajaan kebun kopi rakyat, meningkatkan penggunaan benih unggul kopi, meningkatkan produktivitas kopi rakyat, meningkatkan pendapatan petani kopi serta menggerakkan ekonomi di pedesaan wilayah sentra kopi. Adapun sejak tahun 2006 s/d tahun 2011 kebun kopi rakyat yang telah diremajakan adalah seluas 540 Ha.
7. Salah satu indikator yang dipergunakan untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai tukar petani (NTP) rata-rata Bulan Januari hingga Desember 2011, Sub Sektor Tanaman Pangan adalah 95,73 dan NTP rata-rata Sub Sektor Hortikultura adalah 93,96.
8. Terhadap pencapaian sub sektor peternakan, pada jumlah populasi ternak besar di Provinsi Jambi yaitu telah terjadi peningkatan populasi dari 190.753 ekor tahun 2006 menjadi 254.039 ekor tahun 2010. Sedangkan untuk kerbau walaupun

terjadi kenaikan populasi dari 118.160 ekor tahun 2006 menjadi 177.710 tahun 2010, namun kenaikan ini belum terlalu signifikan karena rata-rata pemeliharaan kerbau di Provinsi Jambi masih bersifat sangat tradisional dan banyak kerbau yang disentuh dengan program *Artificial Insemination* (AI) atau kawin suntik untuk mempercepat tingkat kelahiran. Sedangkan populasi kuda terjadi penurunan yang cukup signifikan dari 475 ekor tahun 2006 menjadi 186 ekor tahun 2010. Untuk populasi Kambing dan Domba terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 137.989 ekor untuk Kambing tahun 2006 menjadi 303.862 ekor tahun 2010, sedangkan untuk Domba dari 47.900 ekor Domba tahun 2006 menjadi 61.169 ekor tahun 2010 dengan rata-rata pertumbuhan. Sedangkan untuk babi peningkatan populasi juga terjadi dari 13.256 ekor tahun 2006 menjadi 30.544 ekor tahun 2010.

9. Melihat kondisi dan kebutuhan di Provinsi Jambi, ke depan sangat berpotensi untuk pengembangan ternak besar. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan kapasitas daya tampung terlihat untuk limbah tanaman pangan dapat menampung 245.795,54 satuan ternak (ST) dan dengan memanfaatkan limbah kelapa sawit seperti daun, pelepah, lumpur serat bkl sawit dapat menampung 987.356 satuan Ternak (ST) sehingga secara keseluruhan dapat menampung sebanyak 1.233.151,54 satuan ternak. Sedangkan untuk mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan dari jumlah ternak besar yang berpeluang dapat ditampung dapat dihasilkan kotoran ternak sebanyak 12.331,5 ton per hari atau 4.500.997,5 ton/tahun yang dapat dikembalikan dalam bentuk pupuk ke tanaman.
10. Sumberdaya kelautan Provinsi Jambi yang terdiri dari pesisir, dan lautan serta biota di dalamnya mempunyai peranan penting bagi pembangunan di daerah baik dari aspek ekonomi, sosial, keamanan dan ekologis. Perikanan merupakan salah satu penyumbang dalam menunjang ekspor non-migas dengan bersumber dari perikanan laut, dan perairan umum (budidaya kolam, keramba/KJA, tambak dan budidaya mina padi).

11. Potensi kelautan hanya berada di dua Kabupaten yaitu Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat dengan masing-masing produksi 23.025,6 ton dan 21.497,7 ton. Serta perikanan darat tersebar di semua Kabupaten/Kota terbagi menjadi perairan umum dan budidaya.
12. Secara keseluruhan hasil produksi perikanan darat sebesar 36.804 ton dengan konsentrasi terbanyak di Kabupaten Muaro Jambi. Sedangkan produksi perikanan hasil budidaya sebanyak 30.379,2 ton dimana Kabupaten Muaro Jambi sebagai pemegang andil terbesar budidaya ikan patin.
13. Produksi tertinggi di tahun 2011 pada perikanan budidaya kolam sebesar 25,7 %, kenaikan produksi terendah terjadi pada Mina Pada yaitu 1,2% Sedangkan secara keseluruhan produksi budidaya naik sebesar 18,2 %. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam mensukseskan program ini, yaitu makin menurunnya kondisi kualitas air, khusus kualitas air di sungai yang biasa digunakan untuk membudidayakan ikan di keramba jaring apung (KJA).

Provinsi Jambi sebagai salah satu provinsi di Sumatera yang terkenal dengan iklim tropis dan kaya akan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati, namun juga tetap menjadi kerentanan terjadi perubahan iklim. Gejala perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka air laut, akan mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor pembangunan. Dampak perubahan iklim global pada akhirnya akan berpengaruh signifikan terhadap ketersediaan sumber daya air, ketahanan pangan dan energi yang jika tidak diantisipasi akan memperburuk kinerja pembangunan khususnya sektor sumberdaya alam. Melalui pelaksanaan UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*) di Bali Tahun 2007, merupakan momentum yang telah di support oleh beberapa LSM lokal, yang memberikan peluang bagi kelompok masyarakat untuk melindungi hutan adat, hutan desa di wilayah barat dan ada REKI (Restorasi Ekosistem Indonesia) dengan luas sekitar 48.000 hektar di wilayah Provinsi Jambi tepatnya di Kabupaten Batanghari.

2.1.1.3. Wilayah rawan Bencana

Di Provinsi Jambi terdapat beberapa daerah yang dikategorikan sebagai daerah rawan bencana yaitu :

2.1.1.3.1. Bencana geologi

Bencana Geologi di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai penuh dan Kabupaten Merangin yang berupa amblasan, longsor, gempa dan ancaman letusan gunung berapi. Berdasarkan data yang sangat terbatas dari penelitian-penelitian, batas-batas daerah bahaya sementara pada Gunung Kerinci, yaitu:

A. Daerah Bahaya

Daerah bahaya Gunung Kerinci adalah suatu daerah disekitar lereng gunung ini, bilamana kegiatannya meningkat (terjadi letusan) akan tertimpa awan panas letusan, bom vulkanik yang membara (mematikan). Jika kegiatan gunung ini meningkat, seluruh wilayah daerah bahaya harus dikosongkan. Daerah bahaya ini di peta berwarna merah, berbentuk lingkaran dengan jari-jari 6 kilometer berpusatkan tengah-tengah kawah, sedangkan pada lembah-lembah kalinya diperluas mengikuti lembah tersebut.

B. Daerah Waspada

Daerah waspada Gunung Kerinci adalah suatu daerah disekitar lereng gunung ini bilamana kegiatan gunung meningkat (terjadi letusan) akan tertimpa lapili (kerikil vulkanik) dan abu, ataupun jika di puncak gunung terjadi hujan setelah adanya kegiatan (letusan) daerah ini akan terserang lahar hujan. Daerah waspada di peta berwarna hijau, berbentuk lingkaran dengan jari-jari 9 kilometer berpusatkan tengah-tengah kawah, sedangkan pada lembah-lembah kalinya daerah ini diperluas mengikuti lembah-lembah tersebut.

2.1.1.3.2. Bencana Banjir

Bencana banjir yaitu di Kabupaten Batang Hari dan beberapa kabupaten lainnya yang merupakan kejadian rutin di setiap musim hujan.

2.1.1.3.3. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Pada lima tahun terakhir (2007-2011) jumlah hotspot di Provinsi Jambi mengalami penurunan, tahun 2007 ada 3.120 titik, kemudian sampai dengan tahun 2009 ada 1.733 titik, dan pada tahun 2010 menurun tajam hanya ada 603 titik, namun tahun 2011 naik kembali menjadi 1.510 titik. Selain itu, Provinsi Jambi juga termasuk daerah yang memiliki titik api akibat dari kebakaran lahan yaitu tahun 2006 mencapai 6.752 titik api, tahun 2007 berkurang menjadi 2.782 titik api dan tahun 2008 sebanyak 2020 titik api. Untuk tahun 2009 sebesar 1.784 titik api, pada tahun 2010 menurun tajam hanya ada 603 titik, namun tahun 2011 naik kembali menjadi 1.510 titik. Jumlah hotspot tersebut sebagian besar di lahan jumlahnya mencapai 65,43 persen dan hutan 34,57 persen, sebagian besar berturut-turut dari yang terbesar; di Kabupaten Tebo, Sarolangun, MuaroJambi, Batang Hari dan Kabupaten Bungo.

2.1.1.4. Demografi

Menurut data BPS (2010), bahwa penduduk Provinsi Jambi tahun 2010 berjumlah 3.092.265 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 61,65 jiwa/km² kecuali Kota Jambi sebesar 2.588,99 jiwa/km² dan Kota Sungai Penuh sebesar 210,20 jiwa/km². Sedangkan pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi selama periode 2005-2010 rata-rata mencapai 1,59% pertahun, dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2006 dan 2007 yaitu 2,20%. Namun pada tahun 2008 tingkat pertumbuhan penduduk mengalami penurunan menjadi 1,68% dari tahun 2009. Berdasarkan jenis kelamin, meskipun angkanya berfluktuasi namun selama tahun 2005-2010 rasio penduduk berjenis kelamin laki-laki selalu lebih besar dari kelompok penduduk berjenis kelamin perempuan. Pada tahun 2010 penduduk laki-laki berjumlah 1.578.338 dan perempuan berjumlah 1.510.280 jiwa atau rasio sebesar 1,04 banding 1. Dari jumlah penduduk di Provinsi Jambi, terdapat tiga daerah dengan jumlah penduduk terbesar pada tahun 2010 yaitu Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Merangin. Sedangkan tiga daerah dengan jumlah penduduk terkecil yaitu Kota Sungai Penuh 82.293 jiwa, Kabupaten Tanjab Timur 205.272 jiwa dan

Kabupaten Kerinci 229.495 jiwa. Penurunan jumlah penduduk Kabupaten Kerinci yang disebabkan oleh terbentuknya Kota Sungai Penuh sebagai daerah otonom baru sejak 8 Nopember 2008. Adapun jumlah penduduk berdasarkan pada wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada tahun 2010 meliputi :

1. Kota Jambi dengan jumlah penduduk sebesar 531.857 Jiwa
2. Kab. Batang hari dengan jumlah penduduk sebesar 241.334 Jiwa
3. Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan jumlah penduduk sebesar 205.272 Jiwa
4. Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan jumlah penduduk sebesar 278.741 Jiwa
5. Kabupaten Muaro Jambi dengan jumlah penduduk sebesar 342.952 Jiwa
6. Kab. Tebo dengan jumlah penduduk sebesar 297.735 Jiwa
7. Kab. Bungo dengan jumlah penduduk sebesar 303.135 Jiwa
8. Kab. Sarolangun dengan jumlah penduduk sebesar 246.245 Jiwa
9. Kab. Merangin dengan jumlah penduduk sebesar 333.206 Jiwa
10. Kabupaten Kerinci dengan jumlah penduduk sebesar 229.495 Jiwa
11. Kota Sungai Penuh dengan jumlah penduduk sebesar 82.293 Jiwa.

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Secara umum, gambaran terhadap kondisi ekonomi makro Provinsi Jambi adalah untuk melihat sejauh mana kemampuan daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini juga dapat dicerminkan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) Provinsi Jambi pada Tahun 2011 meningkat sebesar 8,5% dibanding Tahun 2010.
2. Peningkatan PDRB didukung oleh semua sektor ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pertambangan dan penggalan sebesar 23,1%. Pertumbuhan terkecil terjadi pada sektor jasa-jasa dengan laju sebesar 3,8%. Perekonomiam Provinsi Jambi yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku

pada Tahun 2011 mencapai Rp 63.268 milyar, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 pada tahun 2011 sebesar Rp18.962 milyar.

3. Pengeluaran konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi, terutama terkait dengan terjaganya daya beli masyarakat, disamping itu kendala yang masih dijumpai setiap tahun adalah lambatnya penyerapan anggaran, sehingga perlu upaya mempercepat penyerapan anggaran untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat.
4. Secara bertahap indikator ekonomi Provinsi Jambi menguat, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran, serta aktivitas perekonomian rakyat yang berbasis kepada komoditi primer mulai kembali bergairah yang disebabkan adanya perbaikan untuk hasil pertanian.
5. Laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2011 yang sebesar 8,5% didukung oleh sumber pertumbuhan utama pada sektor Pertambangan dan penggalian sebesar 2,8% diikuti oleh sektor pertanian sebesar 1,8%.
6. Dilihat dari sisi penggunaan, PDRB Provinsi Jambi Tahun 2011 sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 59,9%, Konsumsi Pemerintah 18,3 %, Pembentukan Modal Tetap Bruto 18,8%, ekspor 55,8%, serta impor 55,9%.
7. Semua komponen PDRB penggunaan pada tahun 2011 mengalami pertumbuhan, dengan pertumbuhan tertinggi pada komponen ekspor sebesar 22,2% dan terkecil pada komponen konsumsi rumah tangga sebesar 4,7%. Dengan demikian kinerja perekonomian Provinsi Jambi yang digambarkan oleh perkembangan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000, mengalami peningkatan dari 6,36% pada tahun 2009, menjadi 7,3% ditahun 2010 dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 8,5%.

8. Upaya mengurangi ketimpangan pembangunan pada wilayah perbatasan dan kawasan, erat kaitannya dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan antar golongan masyarakat. Pada tahun 2005 kesenjangan antar golongan masyarakat di Provinsi Jambi yang digambarkan oleh Gini Ratio sebesar 0,302, namun pada tahun 2009 tingkat kesenjangan tersebut menurun dengan Gini Ratio sebesar 0,269 sehingga termasuk kategori tingkat kesenjangan ringan. Menurunnya kesenjangan antar golongan masyarakat ini, disumbangkan oleh program yang berkaitan langsung dengan masyarakat bawah seperti replanting karet, subsidi bibit sawit untuk petani dan program lain seperti penyediaan kerambah dan lain-lain. Namun disisi lain ketimpangan pembangunan antarwilayah relatif meningkat yang ditandai dengan angka Indeks Williamson yaitu dari 0,393 tahun 2005 meningkat menjadi 0,4137 tahun 2009. Kesenjangan pembangunan ini dapat berdampak buruk bagi perkembangan otonomi daerah di Provinsi Jambi. Untuk itu, pengurangan penduduk miskin, selain merupakan pelaksanaan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, untuk meningkatkan hak dan martabatnya, juga salah satu cara untuk meningkatkan daya saing di masa depan adalah melalui perbaikan kemampuan si miskin, sehingga akan membuka jalan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi setiap tingkatan ke tingkat yang lebih tinggi. Upaya penanggulangan kemiskinan harus berjalan seiring dengan upaya untuk meningkatkan pemerataan, mengurangi kesenjangan antar wilayah, antar kelompok dan antar individu.

2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada bidang Pendidikan dan Kebudayaan, akan sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, dimana secara implisit terkandung makna pentingnya memperhatikan aspek kualitas penduduk, SDA dan lingkungan dalam pelaksanaan

pembangunan. Kenyataan telah menunjukkan bahwa strategi peningkatan kualitas penduduk yang hanya bertumpu pada penekanan pertumbuhan penduduk, tidak dapat memberikan makna yang cukup berarti dalam pemecahan berbagai permasalahan. Oleh karena itu, penekanan pada pembangunan pendidikan dengan memperhatikan potensi penduduk serta kondisi SDA dan lingkungan yang ada, ternyata mampu mewujudkan keberlangsungan serta kesinambungan (*sustained*) pembangunan. Isu pembangunan pendidikan berwawasan kependudukan menjadi penting artinya, karena memiliki makna bahwa pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan penduduk dan potensi sumberdaya setempat. Dengan kata lain, pengaruh mutu SDM penduduk merupakan modal (*Human Capital*) penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai kesejahteraan masyarakat antara lain tingkat pendidikan, status kesehatan dan kesempatan kerja. Adapun gambaran umum mengenai aspek tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi, dari 71 di tahun 2005 meningkat menjadi 72,45 pada tahun 2009.
- 2) Angka harapan hidup masyarakat Jambi yang mencapai 69,10 tahun berada diatas angka harapan hidup nasional yang hanya mencapai 68,5 tahun.
- 3) Angka melek huruf dapat dijadikan sebagai salah satu indikator taraf pendidikan masyarakat Jambi. Angka melek huruf masyarakat Jambi cukup tinggi yaitu mencapai 96,07 persen pada tahun 2010.
- 4) Rata-rata lama sekolah penduduk Jambi yaitu 7,84 tahun pada tahun 2010. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Jambi masih berpendidikan rendah.
- 5) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB 98,74% tahun 2010 meningkat menjadi 99,80% pada Tahun 2011.

- 6) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB juga mengalami peningkatan 100,96% Tahun 2010 menjadi 115% pada Tahun 2011.
- 7) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMALB dari 69,42% tahun 2010 menjadi 76,40 tahun 2011.
- 8) Untuk lulusan Ujian Nasional (UN) SD mencapai 99,87%, dan untuk SMP tercatat lulus Ujian Nasional sebesar 99,74%, sementara siswa SD/MI/SDLB yang melanjutkan ke SMP/MTs/SMPLB di tahun 2011 sebesar 99,89. Sedangkan siswa SMP/MTs/SMPLB yang melanjutkan ke sekolah menengah atas sebesar 83,70%.
- 9) Persentase rata-rata kematian bayi waktu proses persalinan masih cukup tinggi yaitu hanya 0,56% atau 56 bayi meninggal dari 1000 persalinan. Angka kematian tertinggi terjadi di Kabupaten Merangin diikuti oleh Sarolangun sedangkan angka kematian bayi waktu persalinan yang paling kecil terjadi di kota Sungai Penuh dan kabupaten Tebo. Peningkatan pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan pada waktu proses persalinan perlu mendapat perhatian. Data menunjukkan bahwa untuk provinsi di Sumatera, persalinan dengan bantuan dukun tradisional masih cukup tinggi yaitu mencapai 20,49% dan Jambi termasuk provinsi dengan rata-rata persalinan dibantu oleh dukun tradisional yang paling tinggi di Sumatera.
- 10) Berdasarkan hasil SDKI 2007 derajat kesehatan ibu dan anak di Indonesia masih perlu ditingkatkan, ditandai oleh angka kematian ibu (AKI) yaitu 228/100.000 kelahiran hidup (KH) dan Tahun 2008, 4.692 jiwa ibu melayang dimasa kehamilan, persalinan, dan nifas. Sedangkan angka kematian bayi (AKB) 34/1.000 kelahiran hidup terjadi stagnasi bila dibandingkan dengan AKB 2003 yaitu 35 per 1.000 kelahiran hidup.
- 11) Sedangkan pada Tahun 2010 Data di Provinsi Jambi angka Kematian ibu (AKI) yaitu 198/100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi 41/100.000 kelahiran hidup, ini berarti Provinsi Jambi masih dibawah angka Nasional.

2.1.2.3. Seni Budaya dan Olahraga

Provinsi Jambi terdiri dari beragam kelompok etnik yang memiliki khazanah budaya yang sangat kaya dengan keanekaragaman seni dan budaya serta tradisi daerah. Adapun beberapa gambaran umum yang berkaitan dengan aspek seni budaya dan olahraga adalah sebagai berikut :

1. Mayoritas penduduk Jambi sebesar 94,98 persen beragama Islam, kemudian Katolik sebesar 2,29 persen, Protestan dan Buddha sebesar 1 persen, Hindu 0,5 persen dan Konghucu 0,07 persen.
2. Jumlah rumah peribadatan untuk Masjid sebanyak 3.241 buah, Musholla 1.737, Langgar 3.639 ; Vihara 29 buah ; Gereja 278 buah, Pura 3 buah dan Klenteng berjumlah 19 buah.
3. Cabang olahraga yang diminati oleh masyarakat Jambi mayoritas adalah cabang olahraga Voli, Badminton dan Sepakbola, hal ini terlihat dari jumlah sarana olahraga yang tersebar di semua kabupaten, yaitu berjumlah 118 sarana olahraga Voli, 110 sarana olahraga Badminton dan 84 sarana olahraga sepakbola, yang diikuti juga dengan cabor Basket berjumlah 79 sarana olahraga dan tenis berjumlah 67.

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.3.1. Pelayanan dasar

Indikator dan capaian pembangunan aspek pelayanan umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang merupakan cerminan dari pemenuhan pelayanan dasar dapat digambarkan dari :

1. Perkembangan angka partisipasi sekolah di Provinsi Jambi terlihat bahwa angka partisipasi sekolah yang cukup tinggi untuk tingkat Sekolah Dasar yang mencapai lebih dari 98,27 persen. Angka ini sedikit menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi yaitu tingkat Sekolah Menengah Pertama (85,56 persen) dan Menengah Atas (56,11 persen). Perkembangan APS terjadi tidak begitu nyata terutama untuk Sekolah Dasar dan SLTP bahkan

untuk tingkat SLTP cenderung terjadi penurunan, sementara untuk tingkat SLTA terjadi peningkatan di tahun 2010.

2. Jumlah rasio Guru terhadap Murid cukup baik yaitu pada tahun 2010 untuk Sekolah Dasar baik negeri (13,16) maupun swasta (15,89) masih relatif sama. Sementara untuk tingkat SLTP (12,96 persen) dan SMA (11,85 persen) untuk negeri masih relatif lebih tinggi dari SLTP (11,17 persen) dan SMA (11,67 persen) swasta, sedangkan untuk SMK lebih dominan pada sekolah swasta (13,03 persen) dibandingkan SMK Negeri (8,39 persen). Hal ini menjadi indikasi bahwa minat belajar siswa cukup baik tetapi jumlah Guru masih terbatas.
3. Kota Jambi dan Merangin merupakan kota dan Kabupaten di Provinsi Jambi yang memiliki jumlah murid SLTP terbanyak sedangkan untuk rasio guru terhadap murid Kota Sungai Penuh dan Kerinci memiliki rasio yang paling kecil sementara Tanjung Jabung Barat dan Kota Jambi memiliki rasio tertinggi. Rata-rata rasio Guru terhadap murid di Provinsi Jambi untuk tingkat SLTP adalah dalam kondisi ideal yaitu 12,96. Untuk jumlah sekolah Merangin, Bungo dan Muara Jambi merupakan Kabupaten dengan jumlah sekolah terbanyak.
4. Untuk Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB meningkat dari 98,74 persen pada tahun 2010 menjadi 99,80 persen di tahun 2011. Untuk tingkat Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB juga mengalami peningkatan dari 100,96 persen pada tahun 2009 menjadi 115 persen pada tahun 2010.
5. Untuk lulusan Ujian Akhir Nasional (UAN) SD mencapai 99,87%, dan untuk SMP tercatat lulus Ujian Nasional (UN) sebesar 99,74%, sementara siswa SD/MI/SDLB yang melanjutkan ke SMP/MTs/SMPLB di tahun 2011 sebesar 99,89. Sedangkan siswa SMP/MTs/SMPLB yang melanjutkan ke sekolah menengah atas sebesar 83,70%.
6. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Jambi, dapat dilihat dari status kesehatan serta pola penyakit. Dalam mengukur tingkat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan masyarakat dapat dinilai melalui berbagai indikator

kesehatan seperti meningkatnya *usia harapan hidup*, menurunnya *angka kematian bayi*, *Angka kematian ibu* dan *status gizi buruk*. Perkembangan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan selama tahun 2005 – 2010 menunjukkan pertumbuhan yang cukup mampu menggambarkan upaya pemenuhan pelayanan kesehatan secara merata yaitu pada jumlah sebaran baik puskesmas pembantu, puskesmas dan rumah sakit walaupun masih tergolong kurang, namun dapat memberikan arti positif upaya pemerintah dalam menciptakan pemerataan pelayanan. Secara keseluruhan, saat ini jumlah puskesmas mencapai 172 unit, puskesmas pembantu 547 unit, posyandu sebanyak 3.168 unit. Sedangkan untuk penanganan kesehatan skala besar juga terlihat dari jumlah rumah sakit baik swasta maupun rumah sakit pemerintah sebanyak 19 unit yang menyebar pada setiap Kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Selain itu, juga didukung dengan jumlah apotik sebanyak 195 unit.

7. Jumlah tenaga kesehatan menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi, yaitu medis sebanyak 883 orang, perawat/bidan sebanyak 6.929, tenaga farmasi sebanyak 545 orang, Gizi sebanyak 196 orang, teknisi medis 546 orang, sanitasi sebanyak 413 orang, kesmas sebanyak 727 orang, dokter umum sebanyak 343 orang, dokter gigi sebanyak 90 orang, dan dokter spesialis sebanyak 79 orang
8. Jumlah tenaga kesehatan ini masih sangat jauh dari rasio ideal jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yaitu dengan jumlah penduduk sebanyak 3.092.265 orang

2.1.3.2. Pelayanan Penunjang

Dalam mendukung aspek pelayanan umum, merupakan suatu kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya. Salah satu upaya pemenuhan pelayanan penunjang, antara lain meningkatkan Kondisi ketentraman dan ketertiban, khususnya baik pelanggaran keperdataan dan kepidanaan yang terjadi di Provinsi Jambi cenderung masih tinggi dan meningkat setiap tahunnya.

Dalam konteks demokrasi lokal, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta perkembangan media massa lokal (cetak dan elektronik) yang cenderung meningkat, telah memperkuat iklim keterbukaan dan demokratisasi sehingga mampu mendorong partisipasi politik masyarakat. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2009 yang mencapai 74,8 %. Penggunaan hak-hak politik rakyat juga terlihat partisipasi masyarakat untuk bergabung dalam kelembagaan politik dan kemasyarakatan, seperti Organisasi kemasyarakatan (ORMAS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Partai politik. Perkembangan jumlah organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan (Ormas/OKP) di Provinsi Jambi hingga tahun 2011 tercatat 374 ormas, sedangkan perkembangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berjumlah 173. Dari pemilihan umum legislatif telah menghasilkan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sebanyak 45 orang yang terdiri dari 40 orang laki-laki dan 5 perempuan. Partai Demokrat dan PAN memiliki wakil terbanyak yaitu masing-masing 8 orang atau 17,78 %. Sedangkan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat di kab/kota sebanyak 385 orang.

Kendati demokratisasi terus berkembang, namun belum mampu menunjukkan demokrasi yang berkualitas, hal ini terkait kompleksitas sosial budaya dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum mampu dalam menunjang nilai-nilai sistem demokrasi yang berkualitas. Sejumlah permasalahan yang masih sangat dirasakan diantaranya adalah belum optimalnya fungsi kelembagaan politik; dalam hubungan pemerintah daerah dan masyarakat, peran masyarakat masih lemah dalam menentukan sejumlah kebijakan strategis pembangunan sehingga masih ditemui berbagai disparitas dan ketimpangan diberbagai bidang pembangunan daerah, di sisi lain pemerintah daerah sangat dominan; dan akses masyarakat terhadap informasi dan pemberitaan media massa masih sangat kurang, sehingga tidak jarang terjadi distorsi informasi yang berpihak kepada kelompok yang lebih kuat dan berkuasa.

2.1.4. ASPEK DAYA SAING

2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Dalam upaya ekonomi makro PROVINSI JAMBI adalah untuk melihat sejauh mana kemampuan daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini juga dapat dicerminkan sebagai berikut :

1. Nilai ekspor Provinsi Jambi pada bulan Januari 2012 turun sebesar 61,12 persen, dari US\$ 217,20 juta pada Desember 2011 menjadi US\$ 84,46 juta pada Januari 2012. Penurunan nilai ekspor terjadi pada semua kelompok, Kelompok Pertanian turun 8,57 persen, Kelompok Industri turun 15,64 persen, dan Kelompok Pertambangan turun 92,91 persen. Sumbangsih terbesar kumulatif nilai ekspor berasal dari Kelompok Industri sebesar 64,74 persen, kemudian disusul Kelompok Pertambangan sebesar 32,94, dan Kelompok Pertanian yang paling rendah yaitu 2,32 persen. Jika dinilai secara kumulatif pada periode Januari-Desember 2011 dibanding dengan nilai kumulatif Januari-Desember 2010 mengalami peningkatan 60,18 persen. Kumulatif nilai ekspor Januari-Desember 2011 mencapai US\$ 2.383,56 juta dan periode yang sama tahun 2010 nilainya mencapai US\$ 1.488,06 juta
2. Nilai ekspor Jambi Tahun 2011 didominasi oleh karet olahan sebesar US\$ 1.129,14 juta atau 47,37 persen dari total ekspor, kemudian pertambangan sebesar US\$ 632,96 juta atau 26,56 persen, sehingga nilai tambah (added value) dari komoditi ekspor ini masih relatif rendah.
3. Kemudian dari sisi negara tujuan, ekspor Jambi mayoritas ke negara Singapura sebesar US\$ 492,14 juta atau 20,65 persen, kemudian Jepang sebesar US\$ 360,04 juta atau 15,11 persen dan Malaysia sebesar US\$ 307,40 juta atau 12,90 persen. Hal ini menunjukkan ketergantungan ekspor Jambi ke Singapura dan Jepang cukup tinggi, dan karakteristik dari kedua negara tersebut adalah membeli komoditi primer atau bahan mentah dan sebagian bahan setengah jadi, dan kedua negara tersebut akan

mengolahnya kembali untuk di ekspor kembali ke Indonesia termasuk Jambi dalam bentuk barang jadi. Ekspor Jambi sebesar US\$ 1.396,82 juta atau 58,69 persen melalui Pelabuhan Talang Duku, kemudian US\$ 747,46 juta atau 31,36 persen melalui Pelabuhan Muara Sabak dan Pelabuhan Kuala Tungkal hanya sebesar US\$ 237,28 juta atau 9,95 persen.

4. Impor Jambi menurut kelompok komoditi dengan nilai kumulatif 2011 didominasi oleh mesin dan alat angkutan sebesar US\$ 127,62 juta atau 71,21 persen, bahan kimia dan sejenisnya sebesar 21,57 juta atau 12,03 persen dan hasil industri lainnya sebesar US\$ 19,03 juta atau 10,61 persen serta bahan makanan dan sejenisnya sebesar US\$ 9,01 juta atau 5,02 persen. Salah satu yang menjadi keprihatinan kita kedepan adalah meningkatnya impor bahan makanan dan sejenisnya yang dapat mengancam permintaan terhadap bahan makanan produk lokal termasuk dari Jambi, karena produk lokal tersebut kalah bersaing dari sisi kualitas dan harga, sehingga konsumen lebih menyukai produk makanan dari impor.
5. Berdasarkan pangsa impor Provinsi Jambi menurut negara asal utama sampai Juni 2010 didominasi oleh Negara Singapura sebesar US\$ 70,82 juta atau 39,50 juta, Cina sebesar US\$ 43,92 juta atau 24,50 persen dan Malaysia sebesar US\$ 21,88 juta atau 12,20 persen. Berdasarkan selisih ekspor dan impor tersebut, maka Provinsi Jambi mengalami surplus neraca perdagangan kumulatif bulan Januari-Desember 2011 sebesar US\$ 2.204,25 juta, kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan Provinsi Jambi terhadap ekspor-impor dari negara China, Singapura, Jepang, dan Malaysia relatif besar, perlu dilakukan strategi diversifikasi dan strategi pengembangan pasar ekspor komoditi Provinsi Jambi, disamping yang lebih penting tentunya peningkatan nilai tambah dari komoditi ekspor tersebut.
6. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jambi, pada bulan Desember 2011 Kota Jambi mengalami inflasi sebesar 0,66 persen. Indeks

Harga Konsumen (IHK) Kota Jambi naik dari 132,61 pada Bulan November 2010 menjadi 133,49 pada Bulan Desember 2011. Laju inflasi tahun kalender (Januari – Desember) 2011 dan laju inflasi year on year (Desember 2011 terhadap Desember 2010) masing-masing sebesar 2,76 persen. Inflasi terjadi pada enam kelompok barang dan jasa karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks Kelompok Bahan Makanan sebesar 1,20 persen; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau sebesar 0,71 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar sebesar 0,68 persen; Kelompok Sandang sebesar 0,16 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,23 persen; serta Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga sebesar 0,20 persen. Sedangkan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan tidak mengalami perubahan indeks. (BPS Provinsi Jambi)

7. Bertitik tolak dari kondisi indikator ekonomi daerah pada tahun 2012 yang lalu, maka untuk tahun 2013 yang akan datang rencana ekonomi makro daerah ditargetkan untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 7,7 persen, laju inflasi sebesar indeks gini sebesar 0,252 persen, indeks williamson 0,388 persen dan penduduk diatas garis kemiskinan 93,00 persen.
8. Instrumen yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak adalah melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi. Proses peningkatan taraf hidup tersebut terutama sekali terfokus pada sektor-sektor yang menjadi andalan perekonomian di Provinsi Jambi. Peranan UMKM dan Koperasi pada sektor industri yang berbasis pertanian memiliki kecenderungan yang lebih tinggi berdampak positif terhadap perekonomian Provinsi Jambi, yaitu dengan angka multiplier rata-rata sebesar 7,55. Ini berarti, bila UMKM dan Koperasi pada sektor industri diberi injeksi sebesar 1 milyar maka output perekonomian Provinsi Jambi akan meningkat sebesar 7,55 milyar.

2.1.4.2. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu aspek pendukung yang sangat dominan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini tercermin dari kurangnya aksesibilitas transportasi dalam mendukung pengangkutan bahan-bahan kebutuhan pokok, pertanian, pertambangan dan keperluan lainnya antar wilayah. Yang menjadi pijakan dasar dalam melaksanakan pembangunan daerah tentunya dicerminkan pada :

1. Salah satu aspek penunjang dalam penyelenggaraan roda pemerintahan serta penyebaran pembangunan secara merata ke seluruh wilayah adalah tersedianya jaringan jalan yang memadai. Penyelenggaraan infrastruktur transportasi, irigasi dan energi serta kelistrikan sangat menunjang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan di Provinsi Jambi.
2. Dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan, hingga saat ini juga dilihat dari perkembangan kondisi jalan dan jembatan di Provinsi Jambi masih sangat memprihatinkan. Hingga saat ini panjang jalan Provinsi di Jambi telah mencapai 1.566,68 km dan jalan negara sepanjang 820,40 km. Dari kondisi jalan ini diklasifikasikan pada status kondisi jalan baik sepanjang 921,74 km, jalan sedang sepanjang 926,04 km, jalan rusak 384,05 km, dan jalan rusak berat 155,24 km.
3. Pembangunan bidang Perhubungan pada Tahun 2011 bertujuan untuk mencapai terwujudnya penyelenggaraan perhubungan yang lancar, tertib, teratur, aman, nyaman, selamat dan terjangkau sehingga tercipta pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien dalam rangka akselerasi kegiatan ekonomi daerah.
4. Terhadap transportasi udara, hingga tahun 2011 terjadi peningkatan frekwensi penerbangan yaitu : Pesawat masuk dan keluar sebanyak 6.082 kali dengan jumlah penumpang 759.315 orang. Disamping itu, juga dalam meningkatkan Bandara Sulthan Thaha Syaifuddin yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura telah

dilakukan kerjasama terutama rencana pengembangan Bandara menjadi Bandara Internasional dengan kapasitas penerbangan skala nasional dan internasional.

5. Beberapa permasalahan Sektor Perhubungan selain pelanggaran lebih muatan angkutan barang, sumber daya manusia dan, minimnya anggaran pembangunan sarana prasarana perhubungan adalah berkurangnya kenyamanan dan ketidaktertiban pelayanan angkutan udara. Untuk mengurangi dan mengeliminir terjadinya permasalahan-permasalahan tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi secara bertahap terus melakukan pembenahan dan peningkatan sarana prasarana, pengaturan, perencanaan serta kualitas sumber daya manusia.
6. Jumlah Desa Berlistrik dari 1.416 desa/kelurahan yang ada di Provinsi Jambi, baru 984 desa/kelurahan yang telah dialiri listrik, dan masih ada 432 desa/kelurahan lagi yang belum dialiri listrik. Namun berdasarkan target pencapaian kinerja bidang energi dan sumber daya mineral yang terdapat di dalam RPJMD Provinsi Jambi 2010-2015, dimana target jumlah desa berlistrik pada tahun 2011 adalah sebanyak 793 desa/kelurahan, maka target pencapaiannya telah terpenuhi.
7. Berkaitan dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kerinci 2 x 90 MW oleh Group PT. Bukaka Teknik Utama, pada tahun 2011 telah dilakukan pembuatan jalan sepanjang 6 km dan telah dibangun 2 buah gudang bahan peledak yang digunakan untuk pembuatan terowongan air sepanjang 4,8 km dengan diameter 8 meter.
8. Provinsi Jambi pada tahun 2011 telah mendapat persetujuan alokasi gas sebesar 14,5 MMSCF yang akan digunakan untuk memproduksi LPG dengan pembangunan LPG Plant dan diperkirakan akan memproduksi sekitar 150 Metrik Ton per hari serta *Lean Gas* akan diperuntukkan sebagai energi primer untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 2 x 40 MW.

2.1.4.3. Iklim Berinvestasi

Provinsi Jambi dalam menopang aktivitas pembangunannya sangat tergantung pada hasil eksploitasi dan produksi sumberdaya alam yang dimilikinya. Minyak bumi, gas bumi, dan batubara mempunyai peranan besar sebagai sumber energi untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Hal ini mencerminkan adanya peluang yang sangat besar dalam pemanfaatan sumberdaya yang secara tidak langsung akan berdampak pada iklim investasi daerah yang antara lain :

1. Pangsa investasi swasta pada triwulan II-2010 tidak banyak mengalami perubahan dibanding dengan periode-periode sebelumnya yakni sebesar 17,20 persen. Namun demikian, kredit investasi selama triwulan II-2010 tumbuh sebesar 13,34 persen dengan nilai mencapai Rp. 222,28 miliar. Kondisi ini meningkat lebih dua kali lipat dibandingkan dengan pencapaian triwulan I-2010 di mana kredit investasi hanya tumbuh 5,92 persen dengan nilai Rp. 98,94 miliar (Bank Indonesia, 2010).
2. Komoditas energi berperan sebagai sumber penerimaan PDRB Provinsi Jambi yaitu jumlah hasil minyak bumi yang dihasilkan dari Tahun 2004 mencapai 8.995,230 barrel berturut-turut Tahun 2005 sebanyak 9.265.060 barrel, pada Tahun 2006 sebanyak 8.375.790 barrel dan pada Tahun 2007 sebanyak 7.354.710, dan pada Tahun 2009 turun menjadi 6.795.020. Hal yang sama juga terjadi pada produksi gas alam dari 667.465 MMBTU pada Tahun 2000 menjadi hanya 27.020 MMBTU Tahun 2003, dan 8 995,23 MMBTU pada Tahun 2004, sekitar 9 265,06 MMBTU pada Tahun 2005, berturut-turut 8 375,79 MMBTU pada Tahun 2006, 7 354,71 MMBTU pada Tahun 2007 dan 6 795,02 MMBTU Tahun 2008. Sedangkan produksi batubara juga terjadi penurunan dari 60.585 ton Tahun 2000 menjadi hanya tinggal 8.206 ton Tahun 2003. Selanjutnya pada kurun waktu dua tahun terakhir terjadi kenaikan antara tahun Tahun 2007 dan Tahun 2008 terjadi kenaikan produksi sebesar 2.215.496,24 m ton Tahun 2007, dan 4.216.057,27 m ton pada Tahun 2009.

3. Berdasarkan pada inventarisasi data potensi, Provinsi Jambi memiliki potensi sumber energi di beberapa wilayah kabupaten, seperti pada Gas alam yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur sebesar 178,13 triliun kaki kubik (TCF) terdiri dari 91,17 TCF cadangan terbukti dan 86,69 TCF cadangan potensi.
4. Potensi batubara sebesar 50 miliar ton, daerah penghasil terbesar adalah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Potensi energi panas bumi yang dimiliki oleh Provinsi Jambi terdapat di sepanjang wilayah Pesisir Pantai Timur dengan tingkat produksi hanya mencapai 807 MW.
6. Energi terbarukan yang meliputi tenaga matahari, angin, biomasa, biogas, dan gambut mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan.
7. Energi gheo thermal, micro hydro yang terdapat di wilayah Kabupaten Tebo, Merangin, Sarolangun dan Kerinci atau pada wilayah Barat Provinsi Jambi.
8. Wilayah Timur Provinsi Jambi yang diarahkan sebagai wilayah zonasi distribusi yang didukung oleh potensi transportasi laut dan pembangunan pelabuhan.

2.1.4.4. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia (SDM) merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak kandungan hinggá akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting yang dicerminkan pada :

1. Keadaan tenaga kerja di Provinsi Jambi diperkirakan mencapai 1.551.000 orang pada Februari 2012, angka ini bertambah sebanyak 23,6 ribu orang dibandingkan dengan angkatan kerja pada periode yang sama tahun 2011, sedangkan jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Jambi diprediksi sebanyak 1.494.400 orang pada Februari 2012 atau bertambah sebesar 25,7

ribu orang jika dibandingkan dengan kondisi Februari 2011. Sementara jumlah penganggur pada Februari 2012 berkurang dibanding keadaan Februari 2011. Pada Februari 2012 penganggur sebesar 56,6 ribu orang berkurang 2,2 ribu orang dibandingkan dengan keadaan Februari 2011 sebesar 58,8 ribu orang. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi pada Februari 2012 diperkirakan 3,65 persen atau mengalami penurunan dibandingkan dengan Februari 2011 sebesar 3,85 persen.

2. Berdasarkan status pekerjaan pada Februari 2012, penduduk yang bekerja dengan status buruh masih yang terbesar yaitu mencapai 554,7 ribu orang (37,12 persen), disusul berusaha sendiri 280,4 ribu orang (18,76 persen), pekerja keluarga/tidak dibayar 270,8 ribu orang (18,12 persen) dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar 221,7 ribu orang (14,84 persen). Pada Februari 2012, pekerja pada jenjang pendidikan SD ke bawah masih tetap mendominasi yaitu sekitar 752,8 ribu orang (50,38 persen), sedangkan pekerja dengan pendidikan Diploma sekitar 41,3 ribu orang (2,76 persen) dan pekerja dengan pendidikan Sarjana hanya sebesar 113,9 ribu orang (7,62 persen).
3. Program pembangunan SDM yang dilakukan di Provinsi Jambi selama ini telah mampu meningkatkan kualitas SDM menjadi semakin baik didasarkan pada Indek Pembangunan Manusia (IPM), dari 72,45 pada tahun 2009 menjadi 72,74 pada tahun 2010.
4. Pada tingkat provinsi, Kota sungai Penuh menempati peringkat paling atas dengan IPM sebesar 76,76 lebih tinggi dari IPM di Kota Jambi yang berada pada peringkat kedua dengan IPM sebesar 76,07, sementara yang paling rendah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan IPM sebesar 71,49. Namun jika dilihat lebih jauh mengenai tingkat pendidikan penduduk khususnya penduduk yang berumur 10 tahun keatas, menunjukkan bahwa secara umum daya saing SDM Provinsi Jambi masih relatif rendah. Penduduk di atas umur 10 tahun yang tidak memiliki ijazah SD dan menamatkan SD/MI yang mencapai 58 persen. Sedangkan yang

berpendidikan SLTP/MI 18 persen, SMU/MA/SMK sebanyak 19 persen, sementara yang termasuk dalam jajaran berpendidikan tinggi D1 hingga S.3 hanya 5 persen

5. Kebijakan ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan yang telah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2010 ini, tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun dari 73.904 orang atau 4,45 persen pada tahun 2010 (bulan Februari) menjadi 60.055 orang atau 4,45 persen tahun 2010 (bulan Februari). Demikian juga tingkat kemiskinan perkotaan menurun dari 117.285 orang penduduk miskin atau 12,71 persen menurun menjadi 110.819 orang atau 11,80 persen. Penduduk miskin pedesaan juga menurun dari 132.407 orang tahun 2009 atau 6,88 persen menjadi 130,788 orang atau 6,67 persen tahun 2010, sehingga secara total penduduk miskin Provinsi Jambi menurun dari 249.692 orang atau 8,77 persen di tahun 2009 menjadi 241.607 orang atau 8,34 persen pada tahun 2010 (BPS, 2010). Penurunan kemiskinan ini sebenarnya masih sangat labil dan satu saat dapat cepat berubah, karena tergantung pada garis kemiskinan di perkotaan dan perdesaan yang nilainya dalam pendapatan perkapita pada tahun 2010 sebesar Rp216.187,- perbulan.
6. Jika dilihat dari kelompok pendapatan masyarakat yang berada di batas garis kemiskinan tersebut relatif banyak dan ini juga diperkuat oleh indeks kedalaman kemiskinan diperkotaan sebesar 1,62 dan secara total sebesar 1,05. Oleh karena itu perlu upaya peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat, sehingga golongan masyarakat yang berada di sekitar garis kemiskinan dan dibawah garis kemiskinan dapat keluar dari zona kemiskinan tersebut secara permanen melalui program pemberdayaan masyarakat miskin.
7. Pelayanan Publik. Hingga saat ini, upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat telah menunjukkan kemajuan yang berarti. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik selama ini dilakukan melalui berbagai

langkah kebijakan yang salah satunya adalah dengan mengubah *mindset* para birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat yang bermental pelayan masyarakat. Selain itu juga melalui penataan kelembagaan pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar pelayanan minimal, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pelayanan, serta penerapan sistem manajemen mutu dalam pelayanan publik, termasuk manajemen penanganan pengaduan masyarakat.

8. Dalam rangka penataan kelembagaan daerah sebagai realisasi dari PP No. 41 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, telah dibentuk Perda Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi, Perda Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi dan Perda Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi. Selain kelembagaan daerah, pada tahun 2009 telah dibentuk perda kelembagaan lain melalui Perda Provinsi Jambi Nomor 4 tahun 2009. Berdasarkan Perda ini terdapat empat (4) lembaga daerah baru, terdiri dari: Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Badan Pelaksanaan Penanggulangan Narkotika Daerah, Sekretariat Komisi Penyiaran Daerah, Dan Sekretariat Korpri.
9. Pada posisi tahun 2009 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah dalam wilayah Kantor Gubernur Jambi meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Rumah Sakit, Sekretariat KPU dan Korpri. Secara keseluruhan aparatur PNS di Provinsi Jambi berjumlah 5.851 orang yang terdiri dari 3.616 orang laki-laki (61,80 persen) dan 2.235 orang perempuan (38,20 persen). Ditinjau dari segi golongan kepangkatan terbagi menjadi; golongan I sebanyak 120 orang (2,05 persen), golongan II sebanyak 1.383 orang (23,64 persen), golongan III sebanyak 3.923 orang (67,05

persen), dan golongan IV 425 (7,26 persen). Secara umum, tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil terbanyak adalah Sekolah Menengah Atas (SMA) 2.485 orang (42,47 persen), disusul Strata 1 (S1) 1.821 orang (31,12 persen), Diploma I-IV 679 orang (11,60 persen), SMTP 369 orang (6,31 persen), Pasca Sarjana (S2) 321 orang (5,49 persen), Sekolah Dasar (SD) 171 orang (2,92 persen), dan Doktor (S3) 5 orang (0,09 persen). Sementara Pengangkatan PNS Formasi Umum Tahun 2006-2009 mencapai 9.935 orang. Dalam rangka peningkatan kemampuan PNS, hingga tahun dari tahun 2005 - 2010 yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Diklat), yaitu Diklat struktural sebanyak 6.938 orang; Diklat Teknis sebanyak 1.125 orang, diklat Fungsional sebanyak 572 orang dan Diklat Manajemen sebanyak 620 orang. Pengembangan budaya hukum dan Penghormatan, Pemajuan, serta Penegakan Hak Asasi Manusia.

10. Pembenahan peraturan daerah hingga tahun 2009 dilakukan melalui upaya mengatasi disharmoni peraturan daerah dengan peraturan pusat. Jumlah pembentukan perda Provinsi Jambi, terdiri dari tahun 2007 sebanyak 9 Perda, tahun 2008 sebanyak 14 Perda dan Tahun 2009 sebanyak 11 Perda. Selain itu pembenahan juga dilakukan melalui evaluasi dan konsultasi peraturan daerah kabupaten/Kota dengan pertimbangan antara lain, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bertentangan dengan kepentingan umum, menimbulkan ekonomi biaya tinggi, bias jender, tidak berpihak pada kelompok miskin, dan bertentangan dengan HAM. Sejak 2005 hingga Agustus 2010, terdapat sejumlah peraturan daerah kabupaten/kota yang ditolak untuk disahkan dan disarankan untuk disempurkan agar sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Efektifitas peraturan daerah juga ditentukan oleh kelembagaan penegak peraturan daerah. Selain itu untuk

melaksanakan penegakan hukum juga perlu didukung oleh adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah. Selain itu, dalam upaya meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi juga telah mengalami kemajuan meskipun belum cukup memuaskan. Dari hasil evaluasi terhadap laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), diketahui bahwa instansi Pemerintah Provinsi Jambi secara keseluruhan masih belum dapat mencapai taraf optimal. Oleh karena itu masih perlu upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi tersebut.

11. Adanya pendelegasian kewenangan peraturan perundang-undangan kepada pemerintah daerah menunjukkan bahwa penegakan hukum (*rule of law*) merupakan salah satu prasyarat yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, fungsi pemerintahan dilaksanakan oleh aparatur daerah berdasarkan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, upaya memantapkan peran aparatur pemerintahan dalam pembangunan daerah menjadi sangat signifikan. Karena betapa pun baiknya kebijakan dan aturan yang dibuat dan ditetapkan, apabila tidak dilaksanakan oleh aparatur negara yang kompeten dan profesional untuk memberikan pelayanan yang cepat dan bermutu kepada masyarakat, maka rasa keadilan masyarakat masih tetap jauh dari harapan.
12. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN telah menunjukkan gejala peningkatan. Dalam kurun waktu 2006 - 2009 telah memberikan kontribusi nyata dalam bidang pengawasan internal Pemerintah Daerah, Sampai dengan tahun 2009 hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jambi atas pemeriksaan pada SKPD Provinsi/Ka/Kota terdapat 3.661 temuan dengan 4851 rekomendasi, dan telah ditindaklanjuti sebanyak 1.886 temuan, dalam proses sebanyak 419 temuan dan 2.549 yang belum ditindaklanjuti. Selain pemeriksaan yang bersifat reguler, Inspektorat Provinsi Jambi telah melakukan pemeriksaan

yang bersifat kasus pengaduan, sampai dengan tahun 2009 Inspektorat Provinsi Jambi telah menerima surat pengaduan sebanyak 71 pengaduan dan telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 27 pengaduan dengan katagori terbukti sebanyak 11 pengaduan sedangkan sisanya sebanyak 44 surat pengaduan hanya dilakukan koordinasi.

13. Peningkatan integritas birokrasi ditunjukkan pula dari tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang dapat dilihat dari opini BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jambi tahun 2007-2010. Meskipun opini BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jambi tidak mengalami kemajuan, yaitu Wajar Dengan Pengecualian, tapi paling tidak, tidak terperosok pada level yang lebih rendah Tidak Memberikan Pendapat (*adversed opinion*); Tidak Wajar (*disclaimer of opinion*). Bahkan hasil tindaklanjut rekomendasi-rekomendasi BPK RI sejak tahun 2005 hingga 2009. Dari 386 rekomendasi, 285 sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi atau 73,83 persen, 66 rekomendasi telah ditindaklanjuti namun belum sesuai rekomendasi atau 17,10 persen dan 35 belum ditindaklanjuti atau 9,07 persen.

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Pembangunan yang dilaksanakan disegala sektor bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang mayoritas berada dipedesaan dengan lapangan kerja utama di sektor pertanian, hal ini sesuai dengan apa yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, *pertama*, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan petani. *Kedua*, dapat meningkatkan pelayanan umum yakni ketersediaan input, sarana prasarana pertanian untuk petani, dan ketersediaan pangan untuk publik, dan *ketiga*, dapat meningkatkan daya saing daerah melalui berbagai produk (unggulan) daerah yang betul-betul kompetitif dan kreatif.

Berkaitan dengan itu, perlu disusun indikator strategis yang dapat menentukan potensi dari komoditi unggulan daerah. Penetapan indikator strategis sebagai kriteria pemilihan produk unggulan yaitu : Indikator ekspor, Indikator kandungan lokal dalam produk, Indikator penyerapan tenaga kerja, Indikator pertumbuhan nilai tambah, Indikator keterkaitan antar sektor, Indikator konservasi lingkungan (*ecolabeling*) dan Indikator jangkauan pemasaran. Berdasarkan ketujuh indikator tersebut, dilakukan analisa dan hasil analisisnya dengan berbagai pertimbangan untuk Provinsi Jambi adalah Karet dan Kelapa Sawit sebagai produk unggulan untuk dikembangkan lebih lanjut dengan tidak mengesampingkan produk unggulan lain.

Pengembangan produk unggulan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang sangat penting sebagai dasar penentuan kebijakan kedepan serta dampak dari kumulatif kebijakan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi mengalami peningkatan dari 6,37 % di tahun 2009, menjadi 7,3 % pada tahun 2010. Hal ini juga tergambar dari peningkatan PDRB atas dasar harga konstan (tahun 2000) yang pada tahun 2009 mencapai Rp16.275 milyar meningkat menjadi Rp17.465 milyar.

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi ini, secara kualitas mengalami peningkatan meskipun belum signifikan. Peningkatan kualitas ini, didukung oleh penurunan angka pengangguran dari 5,20 % pada tahun 2009, menjadi 4,45 % di tahun 2010. Begitu juga dengan angka kemiskinan yang mengalami penurunan dari 8,77 % di tahun 2009, menjadi 7,82 %. Sedangkan laju inflasi mengalami peningkatan dari 2,49 % di tahun 2009, menjadi 10,52 % di tahun 2010. Peningkatan laju inflasi ini, lebih di picu oleh kelompok inflasi *volatile food inflation* atau bahan makanan, baik dari sisi produksi maupun distribusinya.

Dilihat dari Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha pada tahun 2010, kontribusi terbesar masih didominasi oleh sektor pertanian yang mencapai 29,6%. Penyumbang terbesar setelah sektor pertanian adalah sektor pertambangan dan galian sebesar 18,1%

diikuti sektor Perdagangan hotel dan restoran sebesar 14,5% serta sektor industri pengolahan yang mencapai 11,1%.

Nilai ekspor Provinsi Jambi pada tahun 2010, menunjukkan kecenderungan naik. Pada tahun 2009, nilai ekspor non migas komoditi unggulan di Provinsi Jambi sebesar US \$ 614,432 ribu meningkat menjadi US \$ 1,376.714 ribu dan volume ekspor dari 1.337.556 ton pada tahun 2009, menjadi 2.758.979 ton di tahun 2010. *(sumber: Statistik Ekonomi – Keuangan Daerah Provinsi Jambi, Bank Indonesia Januari 2011)*. Peningkatan nilai dan volume ekspor ini didorong oleh komoditi Karet Alam Olahan, karet remah yang mencapai US\$ 806,767 ribu dengan volume sebesar 259.670 ton, diikuti oleh komoditi minyak kelapa sawit mencapai US \$ 167,493 ribu dengan volume ekspor 191.888 ton. Sedangkan penyumbang ekspor terbesar ketiga dari komoditi batu bara dengan nilai ekspor US \$ 66,576 ribu dan volume ekspor 1.538.786 ton.

Berdasarkan negara tujuan ekspor, maka negara pembeli produk ekspor Provinsi Jambi masih di dominasi oleh negara-negara di benua Asia yang mencapai US \$ 1.343.369 ribu, diikuti oleh kelompok negara benua Amerika yang mencapai US \$ 18.432 ribu. Melihat perkembangan ini, tentunya Provinsi Jambi, harus lebih pro-aktif lagi untuk mempromosikan produk unggulan Provinsi Jambi ke negara tujuan lainnya.

Impor non-migas Provinsi Jambi juga mengalami peningkatan dari US \$ 86.622 ribu pada tahun 2009, menjadi US \$ 161.084 ribu di tahun 2010. Peningkatan nilai impor non migas Provinsi Jambi tahun 2010 ini, dipicu oleh kelompok barang-barang mesin dan pesawat mekanik, perlengkapan elektronik dan bagian-bagiannya yang mencapai US \$ 98.455 ribu dan diikuti kelompok barang produk industri kimia dan industri sejenis. Namun demikian, neraca perdagangan Provinsi Jambi selama 2010, tetap mengalami surplus sebesar US \$ 1,2 milyar. Berdasarkan tinjauan ekonomi dan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, maka pertumbuhan ekspor non-migas Provinsi Jambi tumbuh sebesar 114 %, dan ini mengindikasikan bahwa adanya potensi ekspor non migas yang besar di Provinsi Jambi.

Pemerintah mempunyai fungsi sebagai regulator, fasilitator dan administator dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kedepan mempunyai tugas yang cukup berat dengan telah dimulainya perdagangan bebas *China Asean Free Trade Area (CAFTA)*, untuk itu harus diantisipasi dan dihadapi dengan kerja keras, meningkatkan daya saing, kemudahan pemberian izin, kebijakan sektor perbankan yang mendukung, pembangunan infrastruktur dasar, pemberantasan pungutan liar dan praktek korupsi. Pelaksanaan fungsi tersebut salah satunya diimplementasikan dalam bentuk penentuan skala prioritas pengeluaran pemerintah melalui APBD dan APBN dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai stimulus ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat. Dengan memberikan stimulus fiskal kepada masyarakat berarti masyarakat memperoleh penghasilan dari pekerjaan dan inflasi tetap terjaga serta konsumsi dalam negeri dapat didorong. Program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut secara konkrit dilaksanakan oleh SKPD-SKPD yang terbagi dalam urusan Wajib dan Pilihan.

2.2.1. URUSAN WAJIB

2.2.1.1. PENDIDIKAN

Urusan wajib bidang pendidikan, secara umum program dan kegiatan yang dilaksanakan telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan dengan berbagai indikator capaiannya. Namun pada sisi lain masih ditemukan beberapa permasalahan antara lain; masih rendahnya pemahaman dan motivasi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan; kekurangmampuan orang tua secara ekonomi; terbatasnya akses pelayanan pendidikan dasar pada jenjang pendidikan SMP, serta kurangnya sarana dan prasarana belajar.

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Target Nasional bagi pendidikan anak usia dini pada tahun 2015 adalah 75% anak usia 0-6 tahun memperoleh layanan pendidikan. Di Provinsi Jambi terdapat peningkatan angka partisipasi dari tahun ke tahun sejalan dengan

meningkatnya dalam akses layanan PAUD. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah satuan pendidikan dan peserta didik setelah difasilitasi dengan penyediaan anggaran untuk pendidikan anak usia dini baik yang bersifat rintisan program maupun pembinaan kelembagaan antara lain telah berupaya melaksanakan pembangunan pendidikan dengan berbagai kegiatan antara lain mengupayakan biaya Penyelenggaraan Rintisan Pendidikan Anak Usia Dini sebanyak 298 lembaga, Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD 6 Ruang, Renovasi/Rehab Gedung PAUD 2 Paket dan Pembangunan Rumah Pintar 2 Unit, sehingga kondisi Pendidikan Anak Usia Dini pada jenjang Taman Kanak-Kanak.

Sumber dana Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini selain bersumber dari unsur masyarakat sebagai wujud partisipasinya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi telah menganggarkan untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Provinsi Jambi yang dikelola pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yaitu sebesar Rp3.674.728.081,00. Kegiatan yang dilaksanakan adalah: Pendampingan *Early Childhood Education and Development* (ECED), Penyelenggaraan Gebyar PAUD, Pembinaan Rintisan PAUD jenis Kelompok Bermain dan TPA, Penyelenggaraan Lomba Kreativitas siswa TK, peningkatan Manajemen Gugus PAUD Formal dan pengadaan Meubelair Taman Kanak-Kanak.

Akumulasi dari pelaksanaan program dan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini ini, tergambar dari peningkatan Angka Partisipasi Murni dari 54,43 % di tahun 2009 meningkat menjadi 58,43 % atau dari 232.048 orang anak usia 0-6 tahun telah menjadi peserta PAUD sebanyak 246.555 orang.

2. Program Pendidikan Dasar 9 Tahun

Secara umum program pendidikan dasar bertujuan untuk menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang bermutu dan mengurangi angka putus sekolah, disamping itu program ini juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia.

Penyelenggaraan Program Pendidikan Dasar 9 Tahun di Provinsi Jambi yang dikelola pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yaitu dari dana APBD Provinsi Jambi sebesar Rp48.447.991.980,00 dengan penggunaan dana adalah: Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD, penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP, pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket A, pembinaan Olimpiade Sains Siswa SD, rehabilitasi Ruang Kelas SD, pengembangan Pendidikan Kesetaraan Paket B, pengadaan Meubelair Pengganti SD, pendampingan Pengelolaan Dana BOS Provinsi dan sebagainya.

Pada jenjang SD/MI telah dibangun 1 Unit Sekolah Baru di Kota Jambi, pembangunan Ruang Kelas Baru 22 Ruang, Renovasi/Rehab SD 36 paket, Pembangunan Perpustakaan 3 Unit, Pembangunan Pagar SD/MI 22 paket, pemasangan papin/cornblock 5 paket, pembangunan ruang UKS 2 paket, penyediaan/renovasi fasilitas sanitasi 4 paket. Pada jenjang SMP/MTs telah dibangun 15 Ruang Kelas Baru, merenovasi/rehab gedung SMP/MTs sebanyak 22 paket dan perbaikan fasilitas sanitasi 2 paket.

Permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan dasar secara umum bukan dari masalah infrastruktur layanan, permasalahan lebih kepada unsur motivasi peserta didik maupun kesungguhan orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya serta pihak pengelola pendidikan dalam proses pembelajaran yang bermutu di satuan pendidikan, sehingga apa yang diperoleh dalam proses pendidikan bermanfaat bagi kehidupan peserta didik.

Untuk itu Pemerintah Provinsi Jambi secara bertahap berupaya menganggarkan pembiayaan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Pendidik, sehingga diharapkan permasalahan penyelenggaraan pendidikan yang disebabkan oleh masih terdapatnya Guru yang belum berkualifikasi Strata 1 sebagaimana harusnya yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Guru dan Dosen dapat terpenuhi.

Implementasi dari program ini telah berhasil meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB 98,74% tahun 2010 menjadi 99,80% pada tahun 2011. Untuk tingkat Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB juga mengalami peningkatan 100,96% tahun 2010 menjadi 115% pada tahun 2011. Untuk lulusan Ujian Akhir Nasional (UAN) SD mencapai 99,87%, dan untuk SMP tercatat lulus Ujian Nasional (UN) sebesar 99,74%, sementara siswa SD/MI/SDLB yang melanjutkan ke SMP/MTs/SMPLB di tahun 2011 sebesar 99,89. Sedangkan siswa SMP/MTs/SMPLB yang melanjutkan ke sekolah menengah atas sebesar 83,70%.

3. Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Sekolah Menengah, diarahkan dalam rangka upaya perluasan akses layanan dan meningkatkan mutu keluaran/lulusan melalui berbagai upaya antara lain pemberian bantuan operasional, penyediaan ruang kelas, peningkatan bakat dan prestasi siswa, baik umum (SMA) maupun kejuruan (SMK).

Upaya peningkatan akses pendidikan, terutama bagi siswa miskin dari sisi ekonomi sangat ditentukan oleh kebijakan yang dirumuskan dengan baik dan dibangun dengan proses partisipatif. Dalam upaya tersebut pemerintah menganut kebijakan yang berpihak pada siswa miskin. Kebijakan yang berpihak kepada siswa miskin bertujuan untuk mengupayakan siswa miskin menikmati layanan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah tanpa terancam putus sekolah.

Penyelenggaraan Program Pendidikan Menengah di Provinsi Jambi yang dikelola pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebesar Rp43.389.063.620 pada jenjang SMA telah melaksanakan Renovasi/Rehabilitasi sekolah sebanyak 17 paket, pembangunan Ruang Kelas Baru 14 Ruang, pembangunan Laboratorium 6 Ruang, pembangunan perpustakaan 2 Ruang, pembangunan penunjang/fasilitas lainnya sebanyak 24 paket. Pada jenjang SMK telah dilaksanakan pembangunan 1 Unit Sekolah Baru, pembangunan 10 Ruang Kelas Baru, Rehabilitasi/Renovasi sekolah 9 paket, pembangunan ruang penunjang lainnya 6 unit, pembangunan laboratorium 4 unit. Selain pada jenjang pendidikan umum, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi juga telah melaksanakan perhatian terhadap fasilitas pendidikan pada Pondok

Pesantren antara lain dengan Pembangunan 4 Ruang Kelas Baru, 3 Paket Rehabilitasi dan 1 paket pembangunan fasilitas sanitasi. Dengan harapan satuan pendidikan pada jenjang menengah yang tersebar diwilayah Provinsi Jambi dapat melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan.

Dari upaya-upaya yang sudah dilakukan tersebut berdampak terhadap target capaian indikator kinerja bidang pendidikan pada RPJMD antara lain Angka Partisipasi pada Jenjang PAUD sebesar 64,8% jenjang pendidikan dasar (SMP) yaitu 101% dan jenjang pendidikan menengah 76,4%. Selain hal tersebut, untuk menunjang proses belajar mengajar, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi juga telah mengadakan dan mendistribusikan Meubeler, Alat Permainan Edukatif (APE) dan beberapa perangkat komputer/laptop.

Untuk meningkatkan keterampilan masyarakat yang putus sekolah/tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah mengupayakan anggaran Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) bagi peserta kursus dan pelatihan di 66 lembaga. Dalam rangka meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, telah dilaksanakan berbagai pelatihan terhadap 650 orang Pendidik Sekolah Dasar, 452 orang Tenaga Pendidik jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 748 orang Pendidik SMA/SMK dari seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

Disamping itu pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi Jambi melalui program SAMISAKE yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dalam rangka mencegah terjadinya putus sekolah dan peningkatan kualifikasi serta kompetensi memberikan beasiswa bagi peserta didik/mahasiswa bagi keluarga miskin di 50 Kecamatan yang terdiri dari 4.772 siswa SD/MI; 1.632 Siswa SMP/MTs; 535 siswa SMA/MA/SMK dan 103 Mahasiswa Strata 1, disamping itu disediakan juga beasiswa bagi siswa yang belajar pada satuan pendidikan Diniyah/Tsanawiyah sebanyak 140.757 siswa, beasiswa Strata 1 Kerjasama Pemerintah Provinsi Jambi dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) sebanyak 125 orang, beasiswa Strata 2 bagi Tenaga Pendidik sebanyak 40 orang, beasiswa Strata 2

bagi Non Pendidik sebanyak 677 orang, beasiswa Strata 3 sebanyak 134 orang serta beasiswa meningkatkan kualifikasi Tenaga Pendidik PAUD dan Sekolah Dasar sebanyak 7.621 orang.

Sebagai upaya untuk mengetahui tingkat kemampuan peserta didik, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah melaksanakan Ujian Nasional bagi peserta didik SD, SMP, SMA dan SMK. Ujian Nasional pada Jenjang SD Negeri telah diikuti oleh 55.388 siswa dengan rata-rata nilai Bahasa Indonesia 7,16, Matematika 6,82, IPA 7,27 jumlah nilai rata-rata 21,25 sedangkan pada SD Swasta telah diikuti oleh 2.234 siswa dengan rata-rata nilai Bahasa Indonesia 7,64, Matematika 7,21 dan IPA 7,67 jumlah nilai rata-rata 22,52 ini menunjukkan bahwa perolehan nilai pada SD swasta sedikit lebih tinggi dibanding perolehan nilai siswa SD Negeri.

4. Program Pendidikan Non-Formal dan Informal

Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal merupakan upaya layanan pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan pendidikan masyarakat. Pengembangan program Pendidikan Nonformal diharapkan mampu memberikan alternatif pilihan penyelesaian permasalahan pendidikan yang dihadapi masyarakat, selain itu diharapkan Program Pendidikan Nonformal dapat memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat terutama mereka yang belum terlayani kebutuhan pendidikannya pada jalur pendidikan formal.

Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal (PNF) dan Informal di Provinsi Jambi yang dikelola pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yaitu APBD Provinsi Jambi sebesar Rp4.351.419.200,00 dengan kegiatan antara lain Pengembangan Pendidikan Keaksaraan, Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan, Penggandaan Standar Isi Kesetaraan, Orientasi Uji Kompetensi dan Sertifikasi Pengelolaan Kursus, Pengembangan Kurikulum Model Pembelajaran PNF, Pembinaan dan Pengembangan Rumah Pintar, Pembinaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) dan Pembangunan Rumah Pintar. Keberhasilan dari pelaksanaan program ini, tergambar dari peningkatan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan terutama bagi anak kurang mampu dan persentase penduduk di atas 15 tahun yang tidak buta aksara saat ini sebesar 96,06%.

5. Program Pendidikan Luar Biasa

Secara umum penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Pendidikan Luar Biasa atau Pendidikan Khusus/Pendidikan Layanan Khusus merupakan layanan pendidikan untuk peserta didik yang memiliki kekhususan baik dari segi fisik maupun kecerdasan, pada jenjang Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Inklusi, maupun Sekolah Luar Biasa (SLB) lainnya.

Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Biasa (PLB/PK/PLK) di Provinsi Jambi yang dikelola pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yaitu dari dana APBD sebesar Rp3.903.792.600 penggunaan masing-masing sumber dana adalah Rehabilitasi dan Pengadaan Peralatan SDLB dan PLB serta Dukungan Operasional dan Event-event Nasional PLB.

6. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Penyelenggaraan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Jambi yang dikelola pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yaitu sebesar Rp14.849.076.600,00 dengan kegiatan diantaranya Pelatihan Kompetensi Guru, insentif dan Honor PTK SBI dan PTK PK/PLK, Pengelolaan Kualifikasi Pendidik, dan lainnya.

Program kegiatan bidang pendidikan selain dianggarkan melalui dana APBD juga dianggarkan melalui dana APBN yang dialokasikan pada tahun 2011 pada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebesar Rp221.727.271.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp199.605.319.185 atau 90,02%.

7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program manajemen pelayanan pendidikan dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan telah dilaksanakan beberapa program antara lain; Pembinaan Dewan Pendidikan, Monitoring dan Evaluasi; Pembinaan Badan Akreditasi Provinsi-Sekolah/Madrasah, Dukungan Sistem Informasi Pendidikan.

Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program ini, antara lain tergambar dari jumlah sekolah yang telah terakreditasi sampai tahun 2009 sebanyak 2.350 sekolah menjadi 2.358 di tahun 2010. Untuk SD, kategori sekolah rintisan meningkat dari 1.885 di tahun 2009 menjadi 1.941 di tahun 2010, kategori potensial dari 368 di tahun 2009 menjadi 416 di tahun 2010. Rintisan sekolah bertaraf internasional mengalami peningkatan dari 28 sekolah di tahun 2009 menjadi 30 sekolah pada tahun 2010.

Pada tingkat pendidikan SMP, kategori rintisan sekolah bertaraf internasional mengalami peningkatan dari 11 sekolah menjadi 31 sekolah. Untuk kategori sekolah potensial mengalami peningkatan dari 294 sekolah di tahun 2009 menjadi 305 di tahun 2010, sedangkan untuk kategori Sekolah Standar Nasional (SSN) dari 10 sekolah menjadi 55 sekolah.

Untuk tingkat pendidikan SMA pada tahun 2010 jumlah sekolah kategori potensial sebanyak 72 sekolah dan kategori SSN sebanyak 55 sekolah. Dari 55 SSN tersebut meningkat menjadi RSBI sebanyak 14 sekolah. Begitu juga untuk SMK, kategori sekolah potensial mengalami peningkatan dari 111 sekolah pada tahun 2009 menjadi 125 di tahun 2010, untuk kategori SSN dari 25 SMK menjadi 37 di tahun 2010 dan RSBI sejumlah 13 SMK di tahun 2010.

2.2.1.2 KESEHATAN

2.2.1.2.1 DINAS KESEHATAN

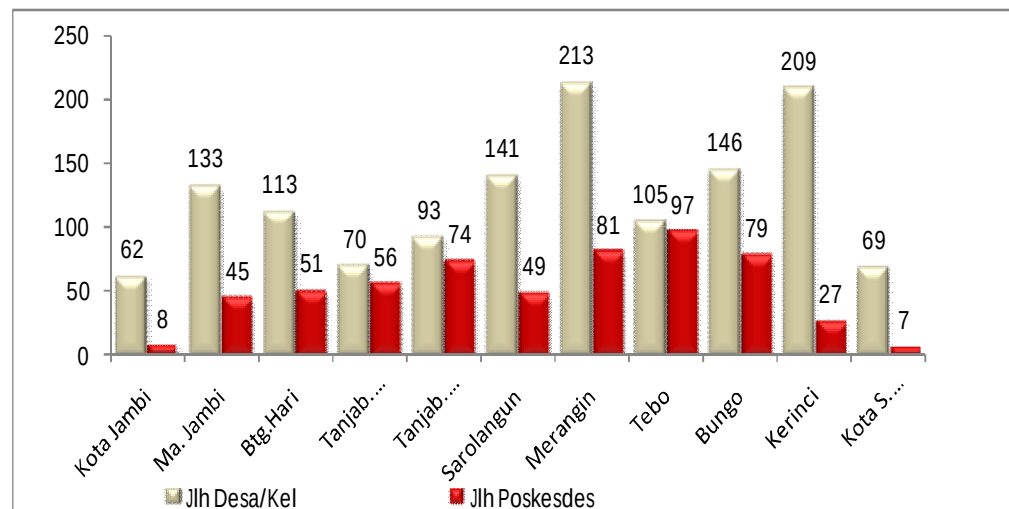
Pembangunan bidang kesehatan pada tahun 2011 diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Jambi, hal ini di dukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp22.628.247.200,00. Namun demikian, masih ditemui berbagai masalah dan hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan, yang disebabkan karena berbagai faktor lingkungan, baik lingkungan fisik dan biologis maupun lingkungan sosial budaya yang begitu cepat berubah.

Program-program yang dilakukan pada tahun 2011 antara lain: Program Promosi Kesehatan, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program jaminan kesehatan masyarakat Miskin, program Program Upaya Kesehatan masyarakat, Program Upaya Kesehatan Perorangan.

1. Program Promosi Kesehatan

Sejak diluncurkannya Program Desa Siaga oleh Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2006, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jambi telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan cakupan desa siaga untuk menjangkau pelayanan kesehatan sampai ke desa, dimana pada tahun 2011 di seluruh desa pada 11 Kabupaten/kota terdapat 525 unit Poliklinik Kesehatan Desa (Polkesdes) seperti yang tergambar pada gambar 4.3 dibawah ini

Gambar 2.1 Cakupan Desa Siaga dan jumlah Polkesdes Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2011



Sumber: Dinkes Provinsi Jambi

Hasil capaian kegiatan ini adalah pelatihan di 11 kabupaten/kota untuk bidan desa sebanyak 1.016 orang, kader sebanyak 2.775 orang, tokoh masyarakat sebanyak 1.333 orang, serta terlaksananya pertemuan forum desa sebanyak 1.342 kali. Dengan demikian persentase desa yang melaksanakannya sebesar 99%. Keterangan lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

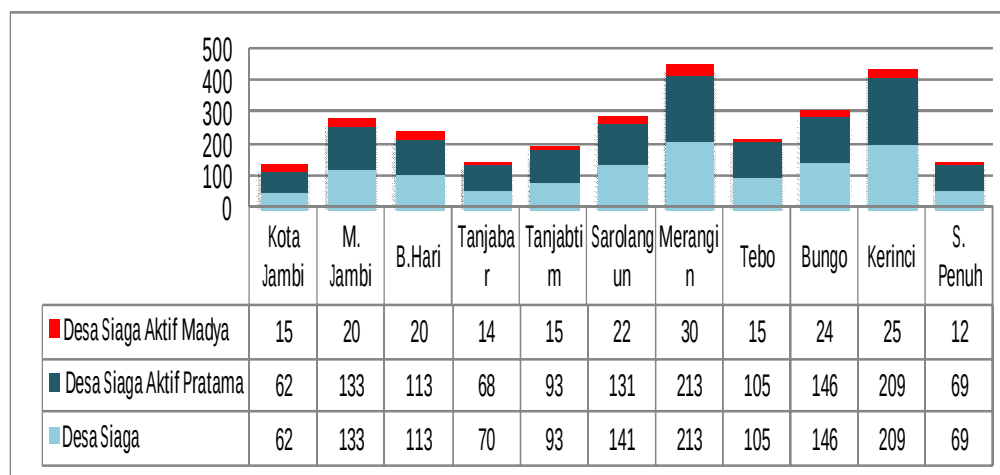
Tabel 2.4 Hasil capaian kegiatan Pelatihan yang dilakukan pada tahun 2011

No	Kab/Kota	Jumlah Dilatih			Jumlah Forum Desa	(%) Desa/Kel melaksn
		Bides	Kader	TOMA		
1.	Kota Jambi	62	124	62	62	100
2.	Ma. Jambi	155	124	45	133	100
3.	Btg.Hari	96	339	113	113	100
4.	Tanjab. Barat	89	104	52	68	97,15
5.	Tanjab. Timur	115	279	93	93	100
6.	Sarolangun	106	226	113	131	92,90
7.	Merangin	125	426	213	213	100
8.	Tebo	99	315	210	105	100
9.	Bungo	76	294	147	146	100
10.	Kerinci	124	418	209	209	100
11.	Kota Sei. Penuh	25	418	209	209	100
12.	Total	1.016	2.775	1.333	1.342	99,11%

Sumber: Dinkes Provinsi Jambi

Untuk perkembangan tingkat strata desa siaga di Provinsi Jambi tahun 2011 terdiri dari; Desa Siaga sebanyak 1.354 desa, desa siaga aktif pratama sebanyak 1.342 desa dan desa siaga aktif madya sebanyak 212 desa seperti yang tergambar pada gambar 4.4 dibawah ini :

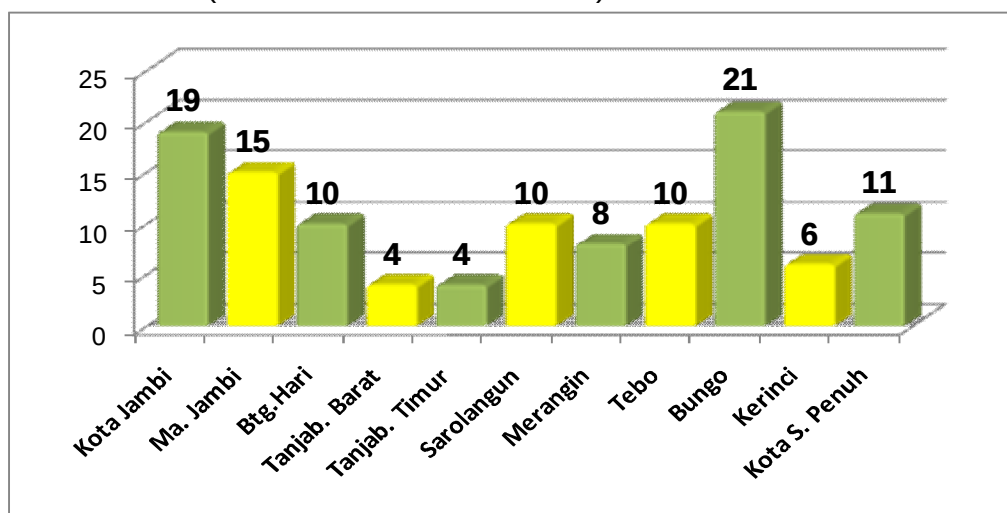
Gambar 2.2 Data Perkembangan Tingkatan Strata Desa Siaga Aktif Provinsi Jambi Tahun 2011



2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Penyembuhan balita gizi buruk dengan memberikan makanan tambahan pemulihan selama 90 hari melalui APBD Provinsi sebanyak 33 kasus dan APBN sebanyak 33 kasus sisanya melalui APBD Kabupaten/Kota. Kasus gizi buruk yang terjadi pada 11 Kabupaten/Kota dari bulan Januari s/d November yaitu sebanyak 98 kasus gizi buruk seperti yang terlihat pada gambar 2.3 dibawah ini

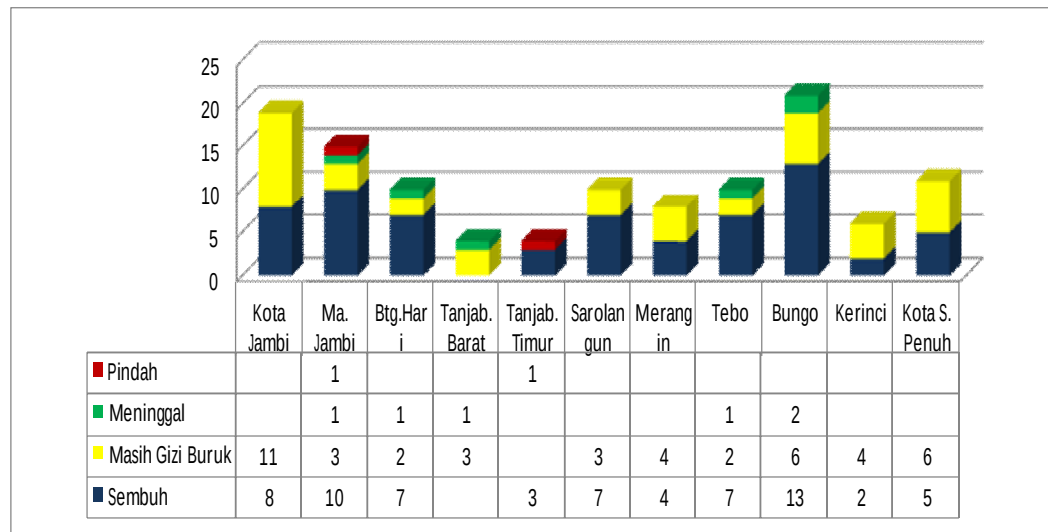
Gambar 2.3 Jumlah Kasus Gizi Buruk di Provinsi Jambi (s.d bulan November 2011)



Sumber : Dinas Kesehatan

Dari 98 kasus gizi buruk tersebut, yang sembuh sebanyak 44 kasus (44,89%), yang belum berhasil sembuh sebanyak 49 kasus (50%) dan meninggal sebanyak 5 orang (5,1%), penyebab meninggal adalah TB. Paru, Bronco pneumonia, pola asuh (ibu mengalami gangguan jiwa), microcephalus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.6 dibawah ini. Selanjutnya dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kasus gizi buruk terbesar terdapat di Kabupaten Bungo diikuti oleh Kota Jambi, Muaro Jambi dan Kota Sungai Penuh.

Gambar 2.4 Jumlah Kasus Gizi Buruk yang sembuh, meninggal dan pindah di Kabupaten/Kota (keadaan sampai dengan bulan November 2011)



Sumber : Dinas Kesehatan

Pada pemberian tablet penambah darah (tablet besi) pada Ibu Hamil telah diberikan Fe1 sebesar 81,62% dan Fe3 sebesar 75,75%, cakupan ini sudah mencapai indikator yang ditetapkan pada tahun 2011 yaitu sebesar 71%. Tabel 4.4 menjelaskan pemberian tablet besi pada ibu hamil di Kabupaten/kota se Provinsi Jambi.

Tabel 2.5 Cakupan Pemberian Tablet Besi (Fe) Kepada Ibu Hamil keadaan sampai bulan November 2011

No	Kab/Kota	Jumlah Ibu Hamil	Cakupan Pemberian Tablet Besi pada Ibu Hamil			
			Fe1		Fe3	
			N	%	n	%
1	Kota Jambi	13.585	10.686	78,66	9.814	72,24
2	Kab. Muaro Jambi	8.086	6.081	75,2	5.489	67,88
3	Kab. Batanghari	5.501	5.487	99,75	5.217	94,84
4	Kab. Tanjab Barat	7.220	5.152	71,36	5.131	71,07
5	Kab. Tanjab Timur	5.370	4.710	87,71	4.450	82,87
6	Kab. Sarolangun	5.936	4.574	77,06	3.875	65,28
7	Kab. Merangin	-	-	-	-	-

No	Kab/Kota	Jumlah Ibu Hamil	Cakupan Pemberian Tablet Besi pada Ibu Hamil			
			Fe1		Fe3	
			N	%	n	%
8	Kab. Tebo	6.907	6.228	90,17	5.666	82,04
9	Kab. Bungo	9.043	8.520	94,22	8.175	90,4
10	Kab. Kerinci	6.190	4.127	66,67	3.834	61,94
11	Kota S. Penuh	1.872	1.331	71,1	1.155	61,7
T o t a l		69,71	56.896	81	52.806	75,09

Sumber : Dinas Kesehatan

3. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin

Untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien di Provinsi Jambi diupayakan juga melalui pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Daerah Provinsi Jambi melalui dana APBD Provinsi. Program ini dilakukan melalui program **“Satu Millar Satu Kecamatan (SAMISAKE)”** yang pada tahun 2011 cakupannya pada 131 kecamatan yang ada di Provinsi Jambi.

Adapun rencana pencapaian Jamkesmasprov Jambi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 2.7 dibawah ini.

Tabel 2.6 Rencana Tahapan Pencapaian Jaminan Kesehatan Semesta Provinsi Jambi Tahun 2010 s.d 2014

No	Bentuk Jaminan	Tahap Penjaminan/Tahun (%)				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jamkesmas	27,64	27,64	28	29	30
2.	Jamkesmasda (Provinsi + Kab/kota)	9,19	9,19	13	16	20
3.	Jaminan Mandiri (Jamsostek Askes Sosial, Komersil, Swasta lainnya)	10,75	20	30	40	50
J u m l a h		47,58	56,83	71	85	100

Sumber :Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Pada tahun 2011 telah diterbitkan Kartu Kepesertaan Jamkesmasprov sebanyak 19.639 orang, secara lebih rinci dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 2.7 Masyarakat Miskin dan Kepesertaan Jamkesmas dan Jamkesmasda di Provinsi Jambi Tahun 2011

No	Kab/Kota	Jumlah Maskin	Jamkesmasda Prov	Jamkesda Kab/Kota
1.	Kota Jambi	120.645	2.760	41.297
2.	Kab. Muaro Jambi	82.598	1.973	6.600
3.	Kab. Batanghari	84.990	1.282	54.761
4.	Kab. Tanjab Barat	68.198	2.486	4.000
5.	Kab. Tanjab Timur	75.409	296	1.535
6.	Kab. Sarolangun	85.317	4.703	5.000
7.	Kab. Merangin	86.949	1.923	Semua SKTM 4.000 dan seluruh masy. Berobat gratis di Puskesmas
8.	Kab. Tebo	71.117	2.954	
9.	Kab. Bungo	63.886	451	
10.	Kab. Kerinci	109.907	596	11.000
11.	Kota Sungai Penuh	-	215	32.000
Total		849.016	19.639	166.693

Sumber : Juknis Jamskesmas Samisake, 2011

4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Capaian indikator kinerja pada program Upaya Kesehatan Masyarakat yang tercantum pada RPJMD Provinsi jambi tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.8 dibawah ini:

Tabel 2.8 Capaian Indkator Program Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2011

No	INDIKATOR	TAHUN 2011	
		Target	Capaian
1	Persentase persalinan yang ditolong tenaga kesehatan (PN)	88%	88,28%
2	Persentase pelayanan antenatal (ANC) K4	92%	91,88%
3	Persentase pelayanan penanganan komplikasi kebidanan	58%	53,31%

4	Persentase pelayanan kesehatan pada ibu nifas (KF1)	88%	87,29%
5	Persentase kunjungan bayi	75%	90,62%
6	Persentase pelayanan kunjungan neonatal (KN 1)	92%	93,79%
7	Persentase penanganan komplikasi pada neonatal (PK)	30%	43,30%
8	Persentase penjangkaran kesehatan siswa SD kelas 1 dan setingkat	60%	65%
9	Persentase SD dan setingkat melaksanakan penjangkaran kesehatan	60%	85,81%
10	Persentase pembinaan sekolah sehat melalui program UKS	50%	50%
11	Persentase Puskesmas dengan Kinerja yang Baik	50%	55%
12	Jumlah Kab/Kota yang mempunyai 50% Puskesmas yang Menerapkan Mutu di Puskesmas	6 Kab/ Kota	6 Kab/ Kota
13	Jumlah Kab/Kota yang mempunyai 50% Puskesmas menerapkan Program Pengembangan	2 Kab/ Kota	2 Kab/Kota
14	Jumlah Kab/Kota yang mempunyai 75% Puskesmas yang melaksanakan manajemen Puskesmas (P1,P2,P3)	5 Kab/ Kota	6 Kab/ Kota

Dari hasil capaian indikator program pada tahun 2011 berdasarkan indikator yang terdapat pada Renstra Dinas Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat dapat dilihat bahwa dari 14 indikator tersebut secara umum 13 (tiga belas) indikator sudah mencapai target dan 1 (satu) indikator tidak mencapai target yaitu indikator persentase pelayanan penanganan komplikasi kebidanan (PK). Hal ini disebabkan oleh masih belum dipahaminya definisi operasional (DO) dari penanganan komplikasi pada kebidanan dan disamping itu masih lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan di tingkat bidan desa dan Puskesmas.

Pada tahun 2011 terdapat 6 (enam) Kabupaten/ Kota yang mempunyai 50% Puskesmas yang menerapkan mutu di Puskesmas yaitu : Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjab. Barat, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Ma. Jambi, Kabupaten Batanghari dan Kota Jambi. Sedangkan Kabupaten/ Kota yang mempunyai 50% Puskesmas yang menerapkan program pengembangan ada 2 yaitu Kota Jambi dan Kabupaten Batanghari. Adapun Kabupaten/Kota yang mempunyai 75% Puskesmas yang melaksanakan manajemen Puskesmas (P1, P2, P3) ada sebanyak 6 (enam) Kabupaten/ Kota yaitu: Kabupaten Tebo, Kabupten Bungo, Kabupten Tanjab. Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Ma. Jambi. Manajemen Puskesmas terbagi atas 3 (tiga) bagian yaitu : P1 (Perencanaan) , P2 (Lokakarya mini/Lokmin) dan P3 (Evaluasi Kinerja Puskesmas).

5. Program Upaya Kesehatan Perorangan

Sasaran dari program UKP mencakup Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta yang berjumlah 21 Rumah Sakit. Status Rumah Sakit di Provinsi Jambi pada tahun 2011, adalah dari 21 Rumah sakit di Provinsi Jambi, Rumah sakit tipe B berjumlah 2 Rumah sakit, tipe C 7 Rumah sakit, dan tipe D ada 12 Rumah sakit. Sedangkan dari 21 Rumah Sakit tersebut, yang mempunyai Izin Operasional Sementara adalah sebanyak 14 Rumah Sakit, yang mempunyai Izin Operasional Tetap 7 Rumah sakit. Sementara, yang sudah terakreditasi sebanyak 5 Rumah sakit dan yang sudah mengikuti pelatihan Workshop Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam sebanyak 11 Rumah sakit.

Untuk rumah sakit tipe B yaitu RSU.Raden Mataher dan RSJ Jambi dengan status seperti terlihat pada tabel 2.9 dibawah ini :

Tabel 2.9 Daftar Status Rumah Sakit Tipe B Se-Provinsi Jambi Tahun 2011

No	Nama Rumah Sakit	Jumlah TT	Izin Operasional		Akreditasi RS	Pelatihan Ponek 24 Jam
			Semen tara	Sudah	Sudah	Sudah
1	RSU. Raden Mattaher	330	✓	✓ (12 Pelayanan)	✓	✓ (12 pelayanan)
2	Rumah Sakit Jiwa Daerah	200	✓			

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Status Rumah sakit tipe C di Provinsi Jambi yang berjumlah 7 unit dapat dilihat pada tabel 2.10 dibawah ini :

Tabel 2.10 Daftar Status Rumah Sakit Tipe C Se-Provinsi Jambi Tahun 2011

No	Nama Rumah Sakit	Jumlah TT	Izin Operasional		Akreditasi RS	Pelatihan Ponek 24 Jam
			Semen tara	Sudah	Sudah	Sudah
1	RSUD. H.A. Madjid Batoe Batanghari	93	✓		✓	
2	RSUD. K.H. Daud Arif Kuala Tungkal	53	✓		✓	
3	RSUD. H. Hanafie Bungo	185	✓	✓ (5 pelayanan)	✓	✓ (5 pelayanan)
4	RSUD. Kol. Abundjani	109	✓		✓	
5	RSUD. Mayjen. HA. Thalib Kerinci	125			✓	
6	RSUD. ST.Thaha Syaifuddin Tebo	49	✓		✓	
7	RSUD. Muaro Jambi	99			✓	

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Status Rumah sakit tipe D di Provinsi Jambi yang berjumlah 12 unit dapat dilihat pada tabel 2.11 dibawah ini.

Tabel 2.11 Daftar Status Rumah Sakit Tipe D Se-Provinsi Jambi Tahun 2011

No	Nama Rumah Sakit	Jumlah TT	Izin Operasional		Akreditasi RS	Pelatihan 24 Jam
			Sementara	Sudah	Sudah	Sudah
1	RSUD. Nurdin Hamzah Ma. Sabak	48	☒		☒	
2	RSUD. Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain	61			☒	
3	RS. ST. Theresia Kota Jambi	100		☒ (12 pelayanan)		☒ (12 pelayanan)
4	RS. Budi Graha Kota Jambi	40	☒			
5	RS. Asia Medika Kota Jambi	109				
6	RS. Bhayangkra Kota Jambi	40		☒ (5 pelayanan)		☒ (5 pelayanan)
7	RS. DR. Bratanata Kota Jambi	195		☒ (5 pelayanan)		☒ (5 pelayanan)
8	RS. Mayang Medical Centre Kota	50	☒	☒		
9	RSB. Annisa Kota Jambi	30	☒			
10	RS. Bersaudara Kota Jambi	23	☒			
11	RSUD. H. Abdul Manap Kota Jambi	146	☒		☒	
12	RSUD. Sungai Bahar Muaro Jambi	54	☒			☒

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jambi

Pembinaan Program Akreditasi RS

Akreditasi rumah sakit bukan program yang baru karena telah tercantum dalam sistem kesehatan nasional yang disusun tahun 1982 dan peraturan Menteri Kesehatan RI No. 159 b/Menkes/ Per/II/1988 tentang Rumah Sakit dalam Bab VII pasal 26 tercantum pula pengaturan tentang akreditasi RS. Pada undang-undang kesehatan RI nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit bagian ketigapasal 40 ayat 1 yang berbunyi dalam upaya peningkatan pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi.

Namun pelaksanaan akreditasi rumah sakit bukan hal yang mudah karena salah satu profesionalisme SDM rumah sakit tentang pemahaman pelaksanaan akreditasi rumah sakit. Saat ini rumah sakit yang terakreditasi baru 19% atau baru 4 rumah sakit dari 21 rumah sakit yang ada di Provinsi Jambi. Untuk itu perlu pembinaan pelaksanaan akreditasi RS oleh tim pembina akreditasi RS.

Rumah sakit yang sudah terakreditasi di Provinsi Jambi yaitu :

1. RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi
2. RS St. Theresia Jambi
3. RS DR. Bratanata Jambi
4. RS Bhayangkara Jambi

Pada tahun 2011 ini ada 4 (empat) rumah sakit lagi yang sudah terakreditasi yaitu :

1. RSUD H.Hanafie Kabupaten Bungo
2. RSUD H.Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari
3. RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi
4. RS Jiwa Provinsi Jambi

6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Tabel 2.12 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

No	Program/Sasaran	Target	Capaian	Ket
1	Peningkatan Pelayanan kefarmasian			
	Jumlah sarana Yankes yang melaksanakan PIO (Pelayanan Informasi Obat)			
	a. Puskesmas	20%	57%	
	b. RSU	60%	100%	
	c. Apotek	50%	3,62 Sarpras,	
	Jumlah sarana Yankes yang Melaksanakan POR (Penggunaan Obat Rasional)			
	a. Puskesmas	50%	80%	
	b. RSU	42%		
2	Peningkatan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan 11 kab/kota mengalokasikan dana obat melalui APBD sehingga tercapai tingkat ketersediaan obat sesuai target			
	a. Dana obat/kapita (Rp)	14.000	7.287	
	b. Tingkat ketersediaan%	95	83	
3	Peningkatan Produksi dan distribusi alat kesehatan			
	a. Sarana distribusi alkes dan PKRT yang memenuhi persyaratan distribusi.	50%	46%	
	b. Alkes yang memenuhi syarat (diuji)	100%	100%	
4	Peningkatan Produksi dan Distribusi kefarmasian.			
	Sarana yang melaksanakan yang melaksanakan pelaporan Narkotika			
	a. Jumlah sarana melaporkan SIPNAP	100%	29%	
	b. Jumlah PBF melaporkan dinamika obat	100%	100%	

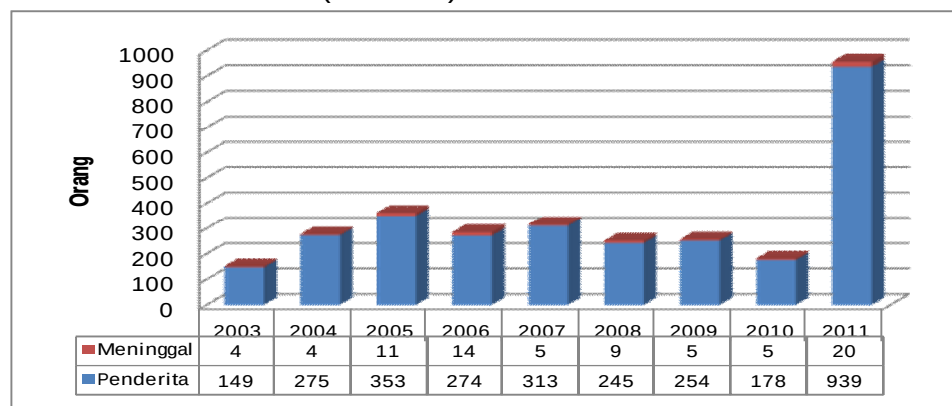
Keterangan : **1.c (apotik) target 50% capaian 3,62%,**

7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

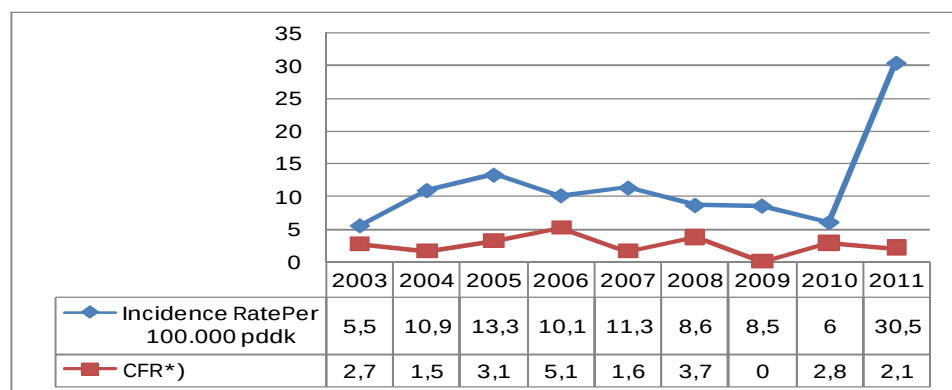
a. Penyakit Demam Berdarah Dengue.

Di Provinsi Jambi, kejadian Demam Berdarah Dengue telah menyebar ke seluruh kabupaten/kota. Namun Kota Jambi masih mencatat kasus tertinggi sepanjang tahun 2003 hingga tahun 2011, kondisi ini sesuai dengan *pattern of disease* dari penyakit DBD, yaitu *Urban Disease*. Selanjutnya kabupaten lainnya yang endemis (selalu ada kasus dalam 3 tahun terakhir) adalah Kabupaten Muaro Jambi, Bungo, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Tebo, Sarolangun dan Merangin, sementara kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh merupakan kabupaten sporadis (tidak setiap tahun ada kasus). Pada tahun 2011 tercatat sebanyak 1.815 kasus dengan 42 kematian karena DBD.

Gambar 2.5 Jumlah penderita DBD Provinsi Jambi Tahun 2003-2011 (Oktober)



Gambar 2.6 Incidence rate dan case fatality rate DBD di Provinsi Jambi Tahun 2003 – 2011 (s.d Oktober 2011)



Tahun 2011 terjadi peningkatan kasus dan kematian yang sangat bermakna dan telah masuk criteria kejadian luar biasa. Peningkatan kasus DBD ini antara lain disebabkan oleh dampak perubahan iklim (climate change), kemarau panjang pada periode bulan Juli – September, diprediksi meningkatkan suhu optimum (32-35°C) yang dapat menyebabkan potensi frekuensi feeding (menghisap darah) nyamuk aedes lebih sering, ukuran tubuh nyamuk lebih kecil → lebih agresif → siklus hidup lebih panjang, sehingga resiko penularan menjadi 3x lipat lebih tinggi. Dan curah hujan yang sedang dalam breeding places (tempat-tempat perindukan) nyamuk aedes, sehingga populasinya meningkat. Selain pengaruh perubahan iklim peningkatan kasus ini juga dimungkinkan oleh tidak diiringinya upaya terpadu pemberantasan pada nyamuk dewasa melalui “**fogging/pengasapan**” dengan upaya pemberantasan jentik (**PSN = Pembarantasan Sarang Nyamuk/tempat perindukan**) yang terus menerus.

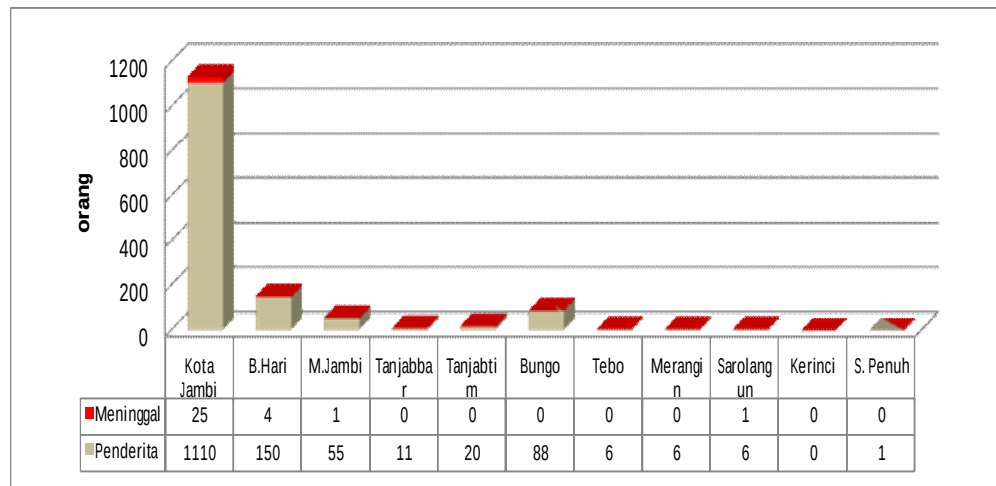
b. Penyakit Malaria

Jumlah kasus malaria di Provinsi Jambi yang dilaporkan adalah sebesar = 6.575 orang (Angka kesakitan malaria/annual Parasite Incidence= 2,09/1000 penduduk. Angka kesakitan malaria tahun 2011 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan (Annual Parsite Incidence tahun 2010 = 1,57/1000 penduduk). Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan cakupan malaria klinis yang dikonfirmasi secara laboratorium (cakupan tahun 2010 = 58,4% (malaria klinis = 41.640 orang, diperiksa laboratorium = 24.336 orang, positif malaria = 4.682 orang); tahun 2011 = 80,6% (malaria klinis = 54.476 orang, diperiksa secara laboratorium = 43.887, positif malaria = 6.575 orang) dan surveilans malaria juga lebih baik.

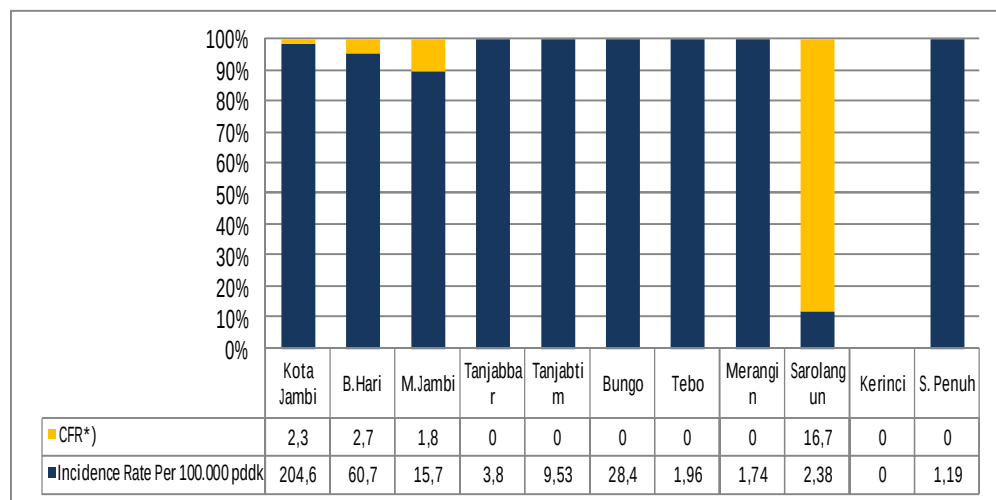
Sehingga dengan meningkatnya cakupan penemuan kasus melalui pemeriksaan malaria klinis secara laboratorium,

maka adanya peningkatan malaria positif yang ditemukan dan berpengaruh terhadap peningkatan angka kesakitan malaria tahunan/annual parasite incidence.

Gambar 2.7 Jumlah penderita Malaria di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2011



Gambar 2.8 CFR dan IRP Malaria di Kabupaten/kota Provinsi Jambi Tahun 2011



c. Imunisasi

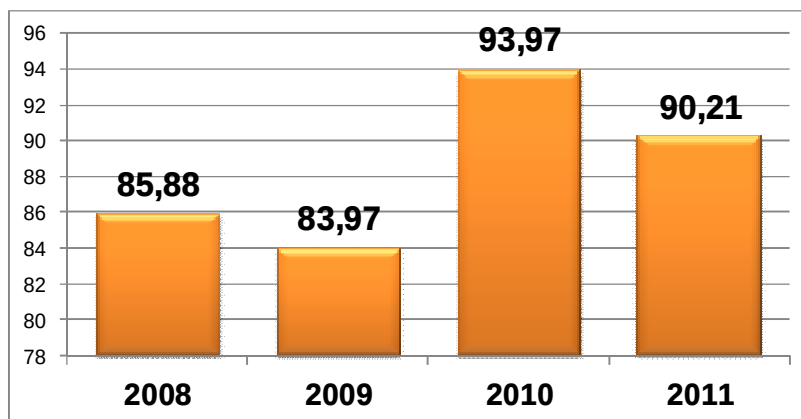
Kegiatan program imunisasi dalam rangka akselerasi pencapaian GAIN UCI (Gerakan Akselerasi Imunisasi Nasional Universal Child Immunization) tahun 2010 – 2014, salah satunya adalah pencapaian laporan cakupan imunisasi dasar bayi.

Tabel 2.13 Cakupan Imunisasi BCG, Polio 1, Campak Per Kab/Kota di Provinsi Jambi (s.d Oktober Tahun 2011)

NO	Kabupaten/Kota	Sasaran Bayi	HB0 (<7 hr)	BCG (%)	Polio1 (%)	DPT/ HB3 (%)	Polio4 (%)	Campak (%)
1	Kerinci	5.627	60,4	74,9	71,1	69,1	68,5	68,8
2	Merangin	8.109	64,8	82,9	80,9	82,7	82,7	81,9
3	Sarolangun	6.314	76,1	86,4	82,8	76,4	74,8	78
4	Bungo	7.728	66,5	81,3	80,1	80,8	79,9	77,6
5	Tebo	6.575	72,5	82,5	82,3	81	80,5	78,9
6	Tanjab Barat	6.563	50,8	68,8	71,9	71,6	72	72,6
7	Tanjab Timur	3.674	57,5	70,6	71,8	69,6	69,9	69,2
8	Batang Hari	5.098	74,3	86,9	87,7	83,5	83,2	83,2
9	Muaro Jambi	8.344	59,3	76,4	77,9	77,8	79,2	71,5
10	Kota Jambi	12.817	97,9	101	104,6	89,5	94,2	94,3
11	Kota Sei Penuh	1.658	84,7	89,4	89,9	86	86,1	93,6
Provinsi Th. 2011		72.507	71	83,3	83,6	79,8	79,7	80,5

Penyebab dari rendahnya capaian dari Kabupaten/Kota adalah belum semua Puskesmas yang melaporkan pelaksanaan imunisasi ke Kab/Kota. Berikut persentase cakupan desa/ kelurahan UCI di provinsi Jambi tahun 2008-2011 seperti yang terlihat pada gambar 2.9 dibawah ini :

Gambar 2.9 Persentase Cakupan Desa/Kelurahan UCI Provinsi Jambi Tahun 2008-2011



Sedangkan cakupan Cakupan Desa/Kelurahan UCI Menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2011 dapat dilihat pada tabel 2.14 dibawah ini :

Tabel 2.14 Persentase Cakupan Desa/Kelurahan UCI Menurut Kab/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2011

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskes mas	Jumlah Desa/ Kel	Desa/ Kel UCI	%
1	Kerinci	16	209	157	75.12
2	Merangin	14	213	130	61.03
3	Sarolangun	11	127	99	77.95
4	Bungo	18	136	132	97.06
5	Tebo	13	105	83	79.05
6	Tanjab Barat	16	70	61	87.14
7	Tanjab Timur	17	92	83	90.22
8	Batang Hari	13	113	109	96.46
9	Muaro Jambi	18	133	132	99.25
10	Kota Jambi	20	62	62	100.00
11	Kota Sei. Penuh	5	69	68	98.55
Provinsi Th. 2011		161	1.329	1.199	90,21
Provinsi Th. 2010		161	1.329	1.116	93.97
Provinsi Th. 2009		161	1.329	1.116	83.97
Provinsi Th. 2008		156	1.268	1.089	85.88

2.2.1.2.2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATAHER

Pada tahun anggaran 2011 program yang telah dilaksanakan oleh RSUD Raden Mattaher sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan perawatan, beberapa kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dan perawatan pasien RSUD Raden Mattaher. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dimaksud yaitu melaksanakan evaluasi terhadap 20 bagian Standar pelayanan Minimum di RSUD Raden Mattaher yaitu : Unit Gawat Darurat, Rawat Jalan, Rawat Inap, Bedah Sentral, Persalinan dan Perinatologi, Intensiv (ICU/ICCU), Radiologi, Laboratorium Patologi Klinik, Rehabilitasi Medik, Farmasi, Gizi, Rekam Medik, Pengelolaan Limbah, Ambulan/Kereta Jenazah, Pemulasaran Jenazah, Hemodialisa, Administrasi Manajemen, Pelayanan

Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit, Pelayanan Loundri dan Medical Chek Up.

Secara umum penilaian dimaksud sudah pada indikator baik, hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian oleh UKG-PPP, walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan. Pada pelaksanaan kegiatan di RSUD Raden Mattaher ada beberapa indikator yang di ukur dan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.15 Indikator RSUD. Raden Mattaher Jambi Tahun 2007 s.d 2011

NO	INDIKATOR	2007	2008	2009	2010	2011	KET
1	Kunjungan Rawat Jalan	147.451	150.350	142.703	158.189	119.467	Kunj
2	Rawat Inap	18.078	16.855	17.066	15.004	16.835	Orang
3	Bed Occupancy Rate	89,63	81,7	76,25	72,7	82,7	%
4	Bed Turn Over	58,89	54,9	53,16	48,2	52,4	Kali
5	Length of stay	4,4	4,3	4,23	4,5	4,7	Hari
6	Turn Over Internal	0,6	1,2	1,63	2,1	1,2	Hari
7	Gross Death Rate	5,3	5,20	4,92	6,34	5,98	%
8	Nett Death Rate	3,01	2,30	2,57	3	3,14	%
9	Kunjungan IGD	14.103	15.345	18.130	16.143	24.039	Kunj
10	Operasi Besar	1.749	1.637	1.774	1.827	2.200	Kali
11	Operasi Sedang	629	458	654	732	748	Kali
12	Operasi Kecil	4.809	4.158	5.341	6.415	9.002	Kali
13	Penderita Keluar Hidup	17.125	15.981	16.225	14.052	15.811	Orang
14	Penderita Keluar Mati < 48 Jam	408	394	402	494	483	Orang
15	Penderita Keluar Mati > 48 Jam	545	498	439	458	541	Orang
Jumlah TT Tersedia		307	307	321	315	321	TT

Sumber : Rekam Medik RSUD Raden Mattaher Tahun 2011

Dari tabel di atas terlihat perbandingan indikator pelayanan pasien di RSUD Raden Mattaher antara tahun 2010 dengan tahun 2011 antara lain, BOR pada tahun 2010 sebesar 72,70% meningkat menjadi 82,70% tahun 2011. Melihat kondisi tersebut, maka sudah perlu untuk meningkatkan jumlah tempat tidur di rumah sakit, sehingga rumah sakit dapat menampung pasien tanpa terlebih dahulu antri seperti sekarang ini. BTO pada tahun 2010 sebesar 48,20 meningkat menjadi 52,40 kali pada tahun 2011, LOS pada tahun 2010 selama 4,5 hari menjadi 4,7 hari pada tahun 2011, hal ini diakibatkan oleh jumlah pasien yang berpenyakit kronis dan pasien ulangan sehingga masa hari rawat menjadi lebih panjang.

TOI dari 2,1 hari pada tahun 2010 menjadi 1,2 hari pada tahun 2011, menggambarkan padatnya hunian tempat tidur di RSUD Raden Mattaher. GDR 6,34% pada tahun 2010 menjadi 6,14% pada tahun 2011 dan NDR 3,00% pada tahun 2010 menjadi 3,23% pada tahun 2011. Penurunan GDR menunjukkan semakin membaiknya pelayanan pada rawat inap, namun NDR semakin meningkat akibat pasien rujukan dari rumah sakit dan layanan lainnya ke RSUD Raden Mattaher dalam kondisi buruk.

Disamping itu indikator lainnya yang dapat di uraikan adalah jumlah kunjungan rawat jalan, menurun dari 158.189 kunjungan pada 2010 menjadi 119.467 pada tahun 2011. Berbagai hal yang mengakibatkan turunnya kunjungan rawat jalan antara lain, berfungsinya sistem rujukan yang diterapkan oleh PT. Askes yaitu pelayanan dasar dilayani di Puskesmas dan Rumah Sakit sebelum di rujuk ke RSUD Raden Mattaher.

Khusus pelayanan Jamkesmas dan Jamkesmasda dari bulan ke bulan selama tahun 2011 meningkat secara drastis, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.16 Kunjungan Rawat Jalan RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2011

Bulan	Total Pelayanan	Jamkesmas		Jamkesmasda	
		Jumlah	%	Jumlah	%
Januari	10.200	1.081	10,6	153	1,5
Februari	10.981	2.176	19,82	125	1,14
Maret	10.726	1.322	12,33	196	1,83
April	10.038	1.257	12,52	160	1,59
Mei	10.636	1.259	11,84	191	1,8
Juni	10.301	1.284	12,46	188	1,83
Juli	10.434	1.314	12,59	210	2,01
Agustus	8.044	889	11,05	140	1,74
September	8.847	1.319	14,91	185	2,09
Oktober	9.718	1.542	15,87	218	2,24
November	9.380	973	10,37	652	6,95
Desember	10.162	896	8,82	802	7,89
Total	119.467	15.312	12,82	3.220	2,7

Sumber : Rekam Medik RSUD Raden Mattaher, 2011

Dari data di atas terlihat bahwa selama tahun 2011, dari total pelayanan rawat jalan sebesar 119.467 kunjungan, terdapat 15.312 kunjungan atau sebesar 12,82% pasien yang menggunakan kartu Jamkesmas dan 3.220 kunjungan atau sebesar 2,70% pasien yang menggunakan fasilitas Jamkesmasda serta sisanya pasien umum dan pasien askes.

Kemudian pola penyakit rawat jalan yang datang berobat ke RSUD Raden Mattaher selama tahun 2011 dikategorikan sepuluh penyakit terbanyak adalah sebagai berikut :

Tabel 2.17 Sepuluh Penyakit Terbesar Rawat Jalan RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2011

No	Penyakit	Total	Presentase
1	Penyakit Hypertensi Lainnya	18.496	30,4
2	ISPA	7.044	11,6
3	DM	6.098	10
4	Bronchitis Acute	5.143	8,4
5	TBC Paru BTA (+)	4.714	7,7
6	Arthritis Reumatoid Lainnya	4.687	7,7
7	Penyakit Jantung Lainnya	4.409	7,2
8	Penyakit Kulit Lainnya	3.829	6,3
9	Gastritis, Duodenitis	3.583	5,9
10	OMA	2.931	4,8
Total		60.934	100

Sumber : Rekam Medik RSUD Raden Mattaher, 2011

Selanjutnya pasien rawat inap dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.18 Jumlah Pasien Rawat Inap Rsud Raden Mattaher Jambi Tahun 2011

Bulan	Total Pelayanan	Jamkesmas		Jamkesmasda		Jampersal	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Januari	1.285	293	22,8	163	12,68	-	-
Februari	1.150	279	24,26	157	13,65	-	-
Maret	1.347	305	22,64	228	16,92	-	-
April	1.325	310	23,39	239	18,03	-	-
Mei	1.398	307	21,95	239	17,09	-	-
Juni	1.372	300	21,86	247	18	-	-
Juli	1.496	375	25,06	224	14,97	-	-
Agustus	1.413	349	24,69	214	15,14	-	-
September	1.373	347	25,27	256	18,64	-	-
Oktober	1.618	483	29,85	224	13,84	32	1,97
November	1.522	381	25,03	293	19,25	16	1,05
Desember	1.536	393	25,58	321	20,89	8	0,52
JUMLAH	16.835	4.122	24,48	2.805	16,66	56	0,33

Sumber : Rekam Medik RSUD Raden Mattaher

Dari data di atas terlihat bahwa selama tahun 2011, dari total pelayanan rawat inap sebesar 16.835 orang, terdapat 4.122 orang atau sebesar 24,48% pasien yang menggunakan kartu Jamkesmas dan 2.805 orang atau sebesar 16,66% pasien yang menggunakan fasilitas Jamkesmasda dan 56 orang atau 0,33% menggunakan fasilitas Jampersal serta sisanya pasien umum dan pasien askes.

Jenis penyakit yang diderita pasien rawat inap pada umumnya termasuk dalam 10 jenis penyakit terbesar di RSUD Raden Mattaher selama tahun 2011 dengan katagori sebagai berikut :

Tabel 2.19 Sepuluh Penyakit Terbesar Rawat Inap Rsud Raden Mattaher Jambi Tahun 2011

No	Penyakit	Total	Presentase
1	Diare & Gastroenteritis	826	18,2
2	Demam Berdarah Dengue	710	15,6
3	Malaria	569	12,5
4	Dyspepsia	512	11,3
5	Diabetes Mellitus	434	9,6
6	TB Paru Lainnya	383	8,4
7	Hipertensi	290	6,4
8	Penyakit Appendiks	282	6,2
9	Stroke Haemorrhagic	275	6,1
10	Gagal Ginjal Lainnya	256	5,6
Total		4.537	100

Sumber : Rekam Medik RSUD Raden Mattaher. 2011

Yang juga tidak kalah pentingnya adalah kunjungan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan jumlah tindakan operasi yang meningkat pesat seperti diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.20 Kunjungan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Jumlah Tindakan Operasi

No	Pelayanan	Tahun		Peningkatan		Satuan
		2010	2011	JUMLAH	%	
1	Kunjungan IGD	16.143	24.039	7.896	48,91	Kunjungan
2	Operasi Besar	1.827	2.200	373	20,42	Kali
3	Operasi Sedang	732	748	16	2,19	Kali
4	Operasi Kecil	6.415	9.002	2.587	40,33	Kali

2. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasana

Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, baik internal maupun eksternal RSUD sebagai Rumah Sakit Pendidikan, maka berbagai upaya yang telah dilaksanakan antara lain : In House Training, pendidikan dan pelatihan di luar RS serta Temu ilmiah Sedangkan untuk mendidik siswa-siswa sekolah kesehatan yang ada di Provinsi Jambi dan bagi mahasiswa Kedokteran Universitas Jambi dibuat suatu kerja sama antara RSUD Pendidikan Raden Mattaher dengan 17 Institusi Kedokteran/Pendidikan Kesehatan serta MoU RSUD Pendidikan Raden Mattaher dengan RS Jejaring. Kemudian untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan tersebut disusun sistem penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis perjanjian kerja sama.

Ikatan kerjasama tersebut meliputi kegiatan praktek klinik keperawatan, kebidanan, gizi, kesehatan gigi, farmasi, analisis kimia, kesehatan lingkungan, kepaniteraan klinik junior dan senior, pengambilan data, penelitian dan magang. Untuk kegiatan praktek klinik dengan jumlah mahasiswa sebanyak 1.240 orang, pengambilan data/penelitian sebanyak 159 orang dan magang mahasiswa sebanyak 9 orang.

Kegiatan pelatihan di dalam rumah sakit (in house training) berlangsung sebanyak 7 kali dengan jumlah peserta sebanyak 310 orang, sedangkan untuk pendidikan dan pelatihan di luar rumah sakit pada tahun 2011 sebanyak 291 orang dengan rincian tenaga struktural sebanyak 102 orang, dokter spesialis sebanyak 28 orang, dokter umum/gigi sebanyak 25 orang, keperawatan sebanyak 64 orang, penunjang sebanyak 33 orang, dan administrasi sebanyak 39 orang. Kemudian untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan di RSUD Raden Mattaher, beberapa peralatan yang dilaksanakan pengadaannya bersumber dari dana APBD, DAK, APBN.

3. Program Sistim Administrasi Rumah Sakit dan Badan Layanan Umum.

Sejalan dengan peningkatan mutu layanan administrasi dan Badan Layanan Umum Daerah, RSUD Raden Mattaher telah menyusun program Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS). Dengan dibangunnya jaringan dan program tersebut diharapkan Sistim Pencatatan dan Administrasi RS akan berjalan dengan cepat, tepat dan akurat.

Demikian juga untuk mendukung prosedur penatalaksanaan sistem keuangan BLUD, RSUD Raden Mattaher juga telah bekerja sama dengan BPKP untuk menyusun Sistem dan prosedur Penatausahaan Keuangan RS dan Sistem Penyusunan Laporan Keuangan sehingga Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengeluaran dan Pendapatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

2.2.1.2.3. RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

Sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi mendapatkan penghasilan berupa retribusi pelayanan kesehatan yang berasal dari Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap, Pelayanan ASKES, Pelayanan Jamkesmas dan Pelayanan Jamkesda.

Pendapatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dari penerimaan retribusi tersebut, 20% diantaranya disetor ke Kas Daerah dan 80% digunakan untuk membiayai operasional kegiatan rumah sakit yang tidak dibiayai oleh APBD. Namun, sesuai Keputusan Gubernur Jambi No.149/Kep.Gub/RSJD/2011 tanggal 7 April 2011, Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah, dimana 100% pendapatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dapat digunakan langsung untuk membiayai operasional kegiatan rumah sakit.

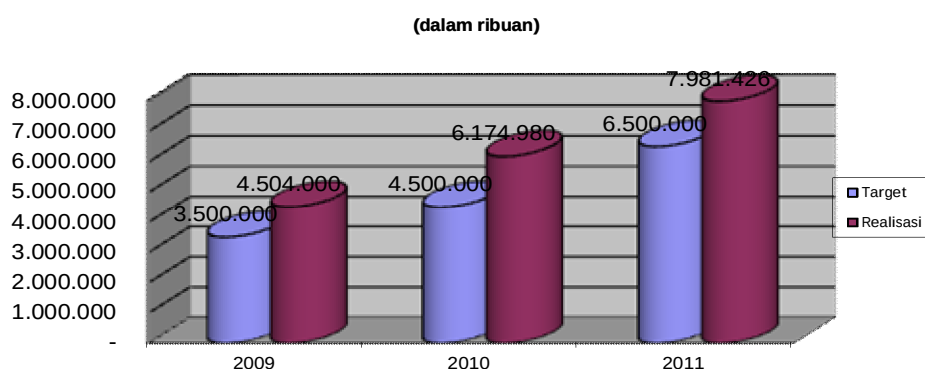
Pada tahun 2011, pendapatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi sebesar Rp7.981.426.142 . Pendapatan ini berasal dari dana APBD-P TA. 2011 sebesar Rp6.500.000.000, serta dana tambahan dari sisa TA. 2010 sebesar Rp1.481.426.141. Untuk jelasnya, berikut ditampilkan tabel rincian target dan pendapatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011.

Tabel 2.21 Rincian Target dan Realisasi Pendapatan

No	Rincian Penerimaan	Target Penerimaan	Realisasi
1	Pelayanan Rawat Jalan	550.000.000	578.967.650
2	Pelayanan Rawat Inap	400.000.000	476.999.900
3	ASKES	350.000.000	488.904.177
4	JAMKESDA	300.000.000	257.071.485
5	JAMKESMAS	4.900.000.000	3.899.113.484
6	Penerimaan Lain-Lain	-	256.787.500

Pendapatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2011 ini meningkat sebesar 77% dibanding pendapatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi tahun 2010. Berikut ditampilkan grafik pendapatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 dan 2011.

Gambar 2.10 Grafik Pendapatan RS Jiwa Jambi Tahun 2010 - 2011



Program-program yang dilakukan pada tahun 2011 antara lain :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi dalam menunjang operasional pelayanan administrasi perkantoran.

Anggaran yang disediakan untuk program/kegiatan ini adalah sebesar Rp317.242.800,00 dengan realisasi sebesar Rp295.247.118,00.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk menghasilkan suatu organisasi yang berdedikasi dan memiliki sumber daya manusia yang baik sebagai kekuatan internal dalam menghadapi tantangan kemajuan di bidang kesehatan khususnya kesehatan jiwa dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Alokasi dana untuk pelaksanaan program ini adalah sebesar Rp277.080.000 dengan realisasi sebesar Rp263.834.490,00. Kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis.

3. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dan bahan kimia habis pakai sebagai salah satu penunjang pokok dalam upaya penyembuhan pasien. Anggaran yang disediakan untuk penyediaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan adalah sebesar Rp878.000.000,00 yang berasal dari 2 (dua) kegiatan baik kegiatan pengadaan obat yang didanai dari APBD (sebesar Rp778.000.000,00) maupun yang didanai dari pendapatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi tahun 2011 (sebesar Rp100.000.000,00). Realisasi belanja dari kegiatan ini adalah sebesar Rp744.194.504,00 (APBD dan Pendaatan rumah sakit).

4. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Arah Kebijakan program ini adalah upaya pelayanan kesehatan yang prima khususnya pelayanan kesehatan jiwa dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Indikator Kinerja program ini adalah meningkatnya cakupan upaya kesehatan masyarakat yang terjangkau dan bermutu pada pelayanan kesehatan dasar, pengembangan dan penunjang. Alokasi dana untuk program ini adalah sebesar Rp30.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp28.896.000,00. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup pemenuhan bahan praktek dan percontohan untuk mendukung pemulihan kesehatan.

5. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Arah kebijakan program ini adalah menghasilkan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar mutu melalui kegiatan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan.

Indikator Kinerja program ini adalah meningkatnya mutu pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM). Anggaran yang disediakan untuk program ini adalah sebesar Rp154.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp153.880.800,00

6. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Arah Kebijakan program ini adalah upaya penyediaan sarana dan prasarana rumah sakit yang menunjang upaya pelayanan kesehatan prima.

Indikator Kinerja program ini adalah tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit baik kualitas maupun kuantitas yang mendukung upaya kesehatan prima. Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini adalah pembangunan rumah sakit berupa pembangunan Turap gedung rawat inap kelas III, pembuatan selasar Gedung Rawat Inap kelas III, Pembangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan Pembangunan Instalasi Air Limbah (IPAL). Alokasi belanja untuk kegiatan ini sebesar Rp2.391.187.200,00 dengan realisasi sebesar Rp2.049.418.210,00.

7. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa

Arah Kebijakan program ini adalah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala instasi pengolahan limbah Rumah Sakit serta kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp104.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp97.950.000,00.

8. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

Arah Kebijakan program ini adalah kegiatan peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD kearah pelayanan yang menuju pelayanan Rumah Sakit yang terakreditasi . Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp6.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.291.376.101,00.

Capaian/Perubahan Data Mikro Sektor (2009 dan 2011)

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan di tahun 2011 berupa penambahan 1 unit gedung rawat inap kelas III (MPKP) hal ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan ruang rawat inap bagi pasien kurang mampu/miskin yang memiliki kartu jamkesmas. Pada tahun 2011, pasien yang berobat dengan menggunakan kartu jamkesmas sebanyak 2.343 orang atau menurun sebesar 17,62% dari tahun 2009. Berikut disajikan tabel jumlah pasien jamkesmas tahun 2009 dan 2011.

Tabel 2.22 Jumlah Pasien Jamkesmas Tahun 2009 dan 2011

No	URAIAN	Tahun 2009	Tahun 2011
1	Pelayanan Rawat Jalan	2.844	2343
2	Pelayanan Rawat Inap	396	464

Selain itu, di tahun 2011 ini, dilaksanakan pengadaan 2 unit mobil jabatan untuk pejabat eselon III.a dan 1 unit kendaraan roda 2 untuk pejabat eselon IV.

Capaian/Perubahan Data Makro Sektor (2009 dan 2011)

Secara makro, pelaksanaan program/kegiatan di tahun 2011 berdampak pada peningkatan kinerja para aparatur. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan kunjungan pasien baik rawat jalan maupun rawat inap dari tahun sebelumnya serta indikator lain yang dapat dijadikan acuan dalam menilai kinerja aparatur di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi.

Berikut disajikan tabel utilisasi/pemanfaatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi tahun 2009 dan 2011.

Tabel 2.23 Utilisasi/Pemanfaatan RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 dan 2011

URAIAN	SATUAN	TAHUN	
		2009	2011
1. Kunjungan Pasien R. Jalan	Kunjungan	13.009	13.538
2. Kunjungan Pasien R. Inap	Kunjungan	2.940	3.711
3. Jumlah Tempat Tidur	Buah	200	200
4. Bor Occupancy rate (BOR)	%	73,72	80,40%
5. Bed Turn Over (BTO)	Kali	3,39	9,06
6. Lenght of Stay (LOS)	Hari	41,98	21,06
7. Turn Over Internal (TOI)	Hari	27,39	7,88
8. NDR (Nett Death Rate)	%	0	0
9. GDR (Gross Death Rate)	%	0,01	0

2.2.1.3. PEKERJAAN UMUM

Dalam rangka mendukung aktivitas sosial ekonomi daerah, kesiapan infrastruktur merupakan salah satu aspek penentu arah dan perkembangan dinamika sosial, aktivitas ekonomi serta fungsi-fungsi distribusi. Arah pembangunan infrastruktur ditujukan pada upaya mengakselerasi perkembangan daerah secara menyeluruh dengan memenuhi ketersediaan sarana dan prasarana yang belum sebanding dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Secara finansial pemenuhan infrastruktur memang belum mampu menjangkau pendekatan suplai yang bertujuan merangsang investasi. Namun dengan kemampuan terbatas upaya berkelanjutan berdasarkan

tingkat kebutuhan masyarakat terus dilakukan melalui langkah-langkah peningkatan, pemeliharaan serta perbaikan tata kelola yang diharapkan mampu memacu terciptanya efisiensi dan efektivitas pembangunan secara luas dan merangsang tumbuh kembangnya perekonomian di Provinsi Jambi.

Penanganan infrastruktur Pekerjaan Umum merupakan salah satu urusan wajib prioritas dalam kebijakan pembangunan Provinsi Jambi yang menjadi bagian penopang utama peningkatan perekonomian dan kemandirian daerah. Perhatian ini telah dinyatakan sebagai salah satu prioritas utama dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2010-2015, serta terlihat jelas dalam pengalokasian anggaran daerah, dimana porsi terbesar memang digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pekerjaan Umum. Selama tahun 2011, alokasi anggaran untuk urusan wajib bidang pekerjaan umum menyerap 26,39% dari total belanja langsung APBD 2011 atau senilai Rp511.731.691.999,00. Dari alokasi tersebut telah direalisasikan sebesar Rp422.748.306.420,00. atau 82,61%.

Indikator-indikator capaian program selama tahun 2011 sektor Infrastruktur dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kebinamargaan

Bina Marga bertanggung jawab terhadap implementasi pembangunan infrastruktur jalan yang bertujuan meningkatkan arus barang dan jasa serta mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah melalui program peningkatan jalan dan jembatan. Pendistribusian kegiatannya berdasarkan pendekatan kewilayahan (Wilayah I s.d. Wilayah VII) melalui kegiatan-kegiatan berbentuk peningkatan dan pemeliharaan rutin jalan Provinsi sepanjang 1.480,51 kilometer serta rehabilitasi/pemeliharaan jalan wilayah perkotaan dengan alokasi dana sebesar Rp304.789.000.000,00.

Salah satu prioritas penanganan infrastruktur jalan adalah membuka keterisolasian wilayah-wilayah produksi pertanian utama yang berada di wilayah Barat dan Tengah Provinsi Jambi. Kegiatan ini juga bertujuan secara tidak langsung untuk mengurai

kemandegan (*bottlenecking*) yang selama ini dianggap menjadi faktor utama rendahnya Nilai Tukar Petani Provinsi Jambi dan fluktuasi inflasi perdesaan. Oleh karena itu, sejak tahun 2011 pembangunan jalan wilayah V (Kabupaten Merangin) berbentuk peningkatan ruas jalan dan jembatan Simpang Pulau Rengas – Jangkat (*Multiyears*); ruas Bangko – Kerinci; serta ruas TKA-Peninjau–Lubuk Mengkuang - Batas Sumbar hampir memenuhi 50% alokasi APBD Kebinamargaan Provinsi Jambi. Sisanya tersebar di seluruh ruas jalan lainnya. Selain itu, juga dilaksanakan kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan yang tersebar di Kabupaten/kota.

Secara keseluruhan, penanganan jalan dan jembatan yang telah dilaksanakan yaitu: peningkatan jalan efektif 114,54 km atau 7,74% dari total panjang jalan Provinsi yang menyerap 60,13% alokasi anggaran Bina Marga tahun 2011 dan pelaksanaan pekerjaan fungsional sepanjang 711,79 km atau 48,08% dari total panjang jalan Provinsi yang menyerap 54,48% alokasi anggaran Bina Marga. Dengan total penanganan jalan hanya sepanjang 852,33 km, atau 57,57% terindikasi bahwa APBD 2011 masih jauh dari rasio kecukupan. Padahal di sisi lain laju kerusakan masih cukup tinggi terkait adanya eksploitasi sumberdaya alam yang penanganannya tidak dapat hanya mengandalkan pemeliharaan semata. Kenyataan ini dapat dilihat dari laporan statistik kondisi jalan hingga bulan Desember 2011: 1) Kondisi Baik sepanjang 488,34 Km atau (32,98%); 2) Kondisi Sedang sepanjang 564,75 Km atau (38,15%); 3) Kondisi Rusak Ringan sepanjang 287,87 Km atau (19,44%); dan 4) Kondisi Rusak Berat sepanjang 139,55 Km atau (9,43%). Persentase kenaikan terbesar adalah jalan yang berkondisi sedang dengan kenaikan sebesar 7,97% dibanding kondisi Oktober 2010 sebesar 30,18%. Sedangkan jalan yang berkondisi baik hanya naik sebesar 5,11% dibanding periode yang sama sebesar 27,27%.

Berdasarkan analisa, rumusan kelayakan rasio kecukupan yang ideal sesuai target RPJM dengan laju kerusakan seperti saat sekarang adalah 20 : 80, atau 296,102 km pekerjaan efektif dan

1.184,408 km pekerjaan fungsional/ pemeliharaan yang apabila diuangkan secara total dibutuhkan sedikitnya 545 Milyar berdasarkan harga berlaku tahun 2011.

Menghitung kemampuan pekerjaan efektif rerata beberapa tahun terakhir yang hanya sejumlah 100 kilometer atau hanya sebesar 6,75%, telah memperlihatkan betapa rendahnya kemampuan APBD untuk memberikan keyakinan pemenuhan pencapaian target peningkatan kondisi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD yaitu sekitar 45% menjadi 75%. Oleh karena itu sejak tahun 2011 ini telah disusun strategi penanganan jalan melalui pemanfaatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dan Perbekalan Dinas Pekerjaan Umum yang bertindak selaku unit pemeliharaan rutin jalan serta berkolaborasi dengan penempatan mandor-mandor jalan yang bertanggungjawab terhadap pengawasan jalan per 10 km. Diharapkan strategi ini dapat diujicobakan mulai Tahun 2012, sehingga optimalisasi anggaran dapat segera dicapai.

Sedangkan untuk penanganan jembatan selama tahun 2011 yang meliputi: pembangunan baru, rehabilitasi dan pemeliharaan jembatan, pembangunan *box culvert* ternyata baru tertangani sepanjang 30 m' atau 11,15% dari target RPJM sepanjang 269 m'. Penanganan selama tahun 2011 telah menyerap anggaran sebesar Rp4.052.502.000,00 dan masih terdapat kekurangan sebanyak 88,85% atau rata-rata 22,21% (59,75 m') per tahun selama 4 tahun ke depan atau dengan kata lain masih dibutuhkan anggaran rata-rata Rp8.071.233.150,00 per tahun.

Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan program kebinamargaan terdapat beberapa permasalahan antara lain: 1) kegiatan tahun jamak (*multiyear*) pembangunan jalan tahap tahun I dengan target pekerjaan dan tingkat serapan anggaran masih sangat rendah. Hal ini selain diakibatkan oleh proses administrasi yang panjang (kontrak Kerja Bulan Agustus 2011), medan jalan yang sangat berat untuk mobilisasi material dan peralatan, kondisi cuaca juga tidak mendukung. Hingga saat ini progres fisik baru mencapai

12% dari target tahun 2011 atau baru mencapai 2,4% dari target keseluruhan hingga akhir tahun 2013; 2) Masalah kelangkaan aspal yang mengakibatkan ada beberapa pekerjaan yang tidak mampu diselesaikan hingga bulan Desember 2011. Kendala ini sangat memberikan dampak yang sangat luas terhadap beberapa ruas jalan seperti : jalan Peninjau–Lubuk Mengkuang; Sungai Bahar-Durian Luncuk, Sei Duren-Sei Buluh, Simpang Panerokan-Sungai Bahar, Batas Kerinci-Sanggaran Agung; Rehab/Pemeliharaan Jalan Simp. Sawmil-Simp. Logpon, Ma. Tebo - Pulau Temiang - Tanjung; dan Pengaspalan Jalan Ds. Air Batu-Sp. Guguk Kecamatan Sungai Manau. Meskipun telah dilakukan pemutusan kontrak untuk kegiatan yang belum mampu diselesaikan oleh Pihak ketiga namun memberikan pengaruh langsung terhadap rendahnya penyerapan anggaran kebinamargaan yang berdampak terhadap kinerja secara umum. Kedua permasalahan di atas telah berkontribusi terhadap besaran SiLPA APBD tahun 2011. Antisipasi terjadinya permasalahan telah disusun agar tidak terulang pada tahun-tahun yang akan datang. Salah satunya adalah melaksanakan pelelangan paket-paket pekerjaan yang lebih dipercepat untuk memberikan ruang dan waktu perencanaan terhadap implementasi pekerjaan yang lebih baik.

2. Sumber Daya Air

Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi dengan target terpeliharanya bendungan/waduk, saluran pembawa dan pembuang serta bangunan pelengkap lainnya untuk memberikan jaminan operasional terhadap wilayah irigasi seluas 5.504 ha (kewenangan Provinsi) pada wilayah-wilayah produksi utama di Provinsi Jambi. Hal ini bertujuan untuk memberikan dampak peningkatan produktivitas sektor pertanian dan kepada masyarakat luas secara umum. Oleh karena itu, pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya lebih diarahkan pada kegiatan rehabilitasi daerah irigasi, bendung dan operasional dan pemeliharaan Daerah Irigasi serta

pengawasan pekerjaan. Pelaksanaan kegiatan juga dilaksanakan pada beberapa kabupaten/kota terutama pada wilayah-wilayah potensi sumberdaya pertanian secara luas.

Selain itu, masalah pengendalian daya rusak air juga merupakan prioritas dan diterjemahkan dalam pelaksanaan program turap/talud/bronjong melalui kegiatan perencanaan survey investigasi dan desain (SID), pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan serta pengawasan turap, penahan tebing, *checkdam* dan pelindung tebing. Target capaian pembangunan yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam mengantisipasi terjadinya banjir dan longsor dilakukan secara bertahap setiap tahun. Secara keseluruhan, target capaian dengan melakukan perencanaan survey identifikasi dan desain (turap/talud/bronjong) selama 5 (lima) tahun sepanjang 6.400 meter, sumur air dalam sebanyak 20 lokasi dan normalisasi sungai sepanjang 21.000 m. Sedangkan dalam implementasinya baru mampu disusun rencana desain sepanjang 2.833 meter (44,27%) yang meliputi pembangunan turap, penahan tebing sungai, pelindung tebing sungai dan lokasi sumur air dalam.

Selanjutnya, terkait dengan penyelenggaraan Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku lebih diarahkan pada pembangunan sumur dalam pada wilayah-wilayah sulit seperti pembangunan sumur di wilayah timur Provinsi Jambi.

Dalam rangka pemenuhan target-target di atas, dalam tahun 2011, bidang Sumberdaya Air memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp60.705.412.000,00 dengan serapan sebesar Rp54.684.625.274,00 (98,77%) dan capaian yang meliputi: 1) Kegiatan Rehabilitasi Jaringan irigasi seluas 4015 ha dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi seluas 5504 ha. telah mampu dilaksanakan rehabilitasi saluran pembawa sepanjang : 2.560 meter, pembangunan saluran pembuang sepanjang : 4.329 meter, rehabilitasi jalan inspeksi : 8.650 meter dan pemeliharaan saluran irigasi sepanjang : 65.233 meter. 2) Kegiatan Rehabilitasi jaringan rawa seluas 7500 ha dan Pemeliharaan Jaringan Rawa seluas 4600

ha telah mampu dilaksanakan rehabilitasi saluran rawa sepanjang 128.473 meter dan pemeliharaan saluran rawa sepanjang 158.650 meter, 3) Pengamanan Sungai dan Danau telah dilaksanakan pembangunan bronjong sepanjang 120 meter di 2 lokasi, pembangunan talud sepanjang 82 meter di 1 lokasi, Rehabilitasi Check Dam sebanyak 1 unit, dan normalisasi sungai sepanjang 2429 meter, 4) penyediaan sumur air dalam untuk pemenuhan air baku sebanyak 27 unit dengan capaian hingga tahun 2011 sebanyak 6 unit atau 2,2%.

3. Cipta Karya

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi di berbagai aspek kehidupan dan kebutuhan masyarakat Provinsi Jambi, diperlukan upaya peningkatan, pengembangan dan penyediaan kebutuhan dasar (*basic needs*) wilayah. Kebutuhan dasar tersebut berupa infrastruktur yang memadai, sehingga secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan semakin memadainya sarana dan prasarana, diharapkan akan mampu bermanfaat luas terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Terkait dengan program keciptakaryaan, diarahkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya; pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong; dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang secara keseluruhan bertujuan pada pencapaian target *Millenium Development Goals (MDG's)*.

Implementasi pelaksanaan program antara lain pembangunan, rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana instansi pemerintah yang meliputi kantor-kantor pemerintahan dan rumah dinas pejabat pemerintah; program Pemberdayaan Komunitas Perumahan melalui Kegiatan Fasilitas pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat berbentuk pembangunan dan rehabilitasi fasilitas umum seperti mesjid, pembuatan sumur, rehabilitasi rumah tradisional dan pemenuhan fasilitas dasar lainnya; pembangunan tugu pers,

penyusunan DED Jembatan Gantung, Jam Besar dan *landscape* (Revitalisasi Kawasan Kota Seberang) dan perencanaan teknis lainnya termasuk Supervisi Rehabilitasi Rumah Tradisional, Pembangunan Rumah Cinderamata Cantik Kabupaten Sarolangun, Rehab Tugu Jam Kota Baru dan Pembangunan RTH Tanggo Rajo Jambi. Alokasi anggaran Cipta Karya sebesar Rp47.392.000.000,00 dengan serapan sebesar Rp43.733.926.350,00 (62,28%).

4. UPTD Balai Pengujian (Urusan Pekerjaan Umum)

Dalam penyelenggaraan pembangunan, yang menjadi salah satu tujuan adalah untuk mewujudkan mutu pembangunan prasarana fisik bidang jalan, pengairan dan gedung yang sesuai Standar Nasional Indonesia dan Standar lainnya serta mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan. UPTD Balai Pengujian mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan Teknis dan Teknis Penunjang dalam bidang pelayanan jasa pengujian kualitas Tanah, Geologi dan Bahan Bangunan. Secara umum Laboratorium mempergunakan metode uji Standar Nasional Indonesian (SNI), dan Standar Internasional (ASTM) serta standar-standar baku mutu lainnya. Dalam rangka mengantisipasi tuntutan perkembangan teknologi dan pelayanan kepada pihak ketiga dan masyarakat maka UPTD Balai Pengujian telah mendaftar ke KAN pada tahun 2010 untuk diakreditasi dan sudah di Asessmen Awal pada tanggal 26–27 Juli 2011 oleh Asessor Komite Akreditasi Nasional sesuai ISO/IEC 17025 : 2005.

UPTD Balai Pengujian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp655.600.000,00 dengan serapan sebesar Rp645.093.550,00 (98,40%).

5. UPTD Balai Peralatan dan Perbekalan

Dalam upaya mengantisipasi terhadap tingginya tingkat kerusakan jalan di Provinsi Jambi, diperlukan adanya optimalisasi pemanfaatan alat berat milik Pemerintah. Dengan alokasi anggaran tahun 2011 sebesar Rp16.539.780.000 telah dilaksanakan pengadaan alat berat sebanyak 2 *fleet* terdiri atas: Bulldozer D3,

Vibro Roller 10 ton, Excavator on Treck, Motor Greder, Whell Loader Back Hoes, Dump Truck, dan Mobil Tronton; yang secara operasional ditempatkan di 2 (dua) wilayah: 1) Kabupaten Merangin untuk penanganan wilayah Barat dan 2) Kota Jambi untuk penanganan wilayah Timur. Keduanya direncanakan sebagai unit pemeliharaan rutin jalan dan dilaksanakan tahun 2012 dalam bentuk swakelola.

2.2.1.4. PENATAAN RUANG

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang, sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasilguna dan berdayaguna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang, dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana disebutkan diatas, Pemerintah Provinsi Jambi tahun 201 telah berkomitmen untuk melaksanakan kewenangan urusan penataan ruang dengan percepatan penyelesaian RTRW Provinsi Jambi tahun 2011-2031. Melalui program penataan ruang telah dilakukan kegiatan Peningkatan manajemen pengendalian, pemanfaatan ruang provinsi Jambi. Selain itu, juga melalui Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam dilakukan kegiatan koordinasi perencanaan infrastruktur dan penataang ruang dengan fokus pada penguatan kelembagaan dengan pembentukan Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Provinsi Jambi tahun 2011.

Sebagai salah satu keberhasilan Provinsi jambi, bahwa RTRW Provinsi Jambi tahun 2011-2031 telah diberikan persetujuan Substansi oleh Kementerian Pekerjaan Umum, berikut juga

Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Bappeda Provinsi Jambi telah mendapatkan persetujuan substansi yang sama. Ini merupakan suatu keterpaduan dan koneksitas antar Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendorong percepatan penyelesaian RTRW serta mendapatkan apresiasi pemerintah dengan mempunyai Provinsi Jambi secara bersamaan mendapatkan persub. Terkait dengan usulan perubahan fungsi masih dalam proses verifikasi (uji konsistensi) dan penyelesaian tahap akhir oleh Tim Terpadu Kementerian Kehutanan RI.

Dalam tahun 2011, UPT Bina Teknik dan Tata Ruang memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp1.000.000.000 penyerapan sebesar Rp978.209.300,00 (97,82%) dengan output kegiatan meliputi : Aplikasi Database Parsial Bidang Pekerjaan Umum, Sistem Informasi Jasa Konstruksi Dinas PU Provinsi Jambi, Studi dan Inventarisasi Pola Ruang Kawasan Perbatasan Kabupaten Kerinci dengan Kota Sungai Penuh, dan Studi dan Inventarisasi Pola Ruang Kawasan Perbatasan Kabupaten Bungo dengan Kab. Tebo.

2.2.1.5. PERUMAHAN

Penanganan urusan perumahan rakyat, merupakan salah satu upaya dalam menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, bersih, estetik dan nyaman. Penanganan urusan ini mencakup permasalahan perumahan/ penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, drainase dan persampahan, terutama di daerah perkotaan. Perwujudan permukiman yang teratur dan tertata rapi, merupakan dambaan masyarakat dan pemerintah. Dalam mewujudkan upaya ini, dilakukan restrukturisasi kawasan-kawasan yang disinyalir mampu menimbulkan kekumuhan dan kurangnya penataan.

Tahun 2011, dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di provinsi Jambi yang berorientasi pada tujuan untuk pemenuhan rumah layak huni dan pengurangan perumahan kumuh telah diarahkan pada prioritas pembangunan Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE). Program ini merupakan salah satu fokus dalam RPJMD Provinsi Jambi tahun 2010-2015 dengan kegiatan

bedah rumah dengan alokasi dana sebesar 23,820 milyar untuk 2.802 unit rumah di 50 Kecamatan. Bantuan bedah rumah ini didasari oleh hasil *verifikasi data by name by address* penduduk miskin di Provinsi Jambi sesuai Data BLT yang diterbitkan BPS. Kegiatan ini juga telah memberikan dampak yang sangat nyata bagi penerima bantuan dan juga bagi Kabupaten/kota yang secara langsung akan terkait dengan berkurangnya penduduk miskin di Provinsi Jambi. Program ini juga secara simultan dilakukan oleh SKPD lainnya termasuk bea siswa dan sertifikat rumah yang telah menerima bantuan bedah rumah tersebut.

Dalam upaya perbaikan permukiman yang dilakukan, pada hakekatnya merupakan terobosan untuk menciptakan suasana permukiman rumah swadaya yang bersih dan nyaman. Oleh karena itu dalam mendukung terciptanya tujuan tersebut, melalui program pengembangan perumahan telah dilaksanakan peningkatan jalan lingkungan sepanjang 38.431 M' dan drainase 3.146 M' yang tersebar di wilayah Kota Jambi dan Kabupaten/Kota lainnya. Dari target yang menjadi indikator capaian hingga 2015 yaitu sepanjang 192.000 M', untuk tahun 2011 telah mampu terpenuhi capaian kinerja sebesar 20%.

Dalam pelaksanaan program SAMISAKE, pekerjaan bedah rumah dilakukan dengan bekerjasama pihak TNI dan masih ditemui beberapa masalah terutama terkait dengan biaya yang telah ditetapkan tidak mendapatkan keringanan pembebasan pajak bahan material dari Kantor Pajak Provinsi Jambi.

Terhadap program pengembangan perumahan, ini merupakan salah satu Pemerintah Provinsi Jambi dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan kawasan permukiman di Kabupaten/Kota yang sesungguhnya setiap tahun menerima usulan ataupun permohonan dari Kab/kota untuk peningkatan jalan lingkungan maupun sarana prasarana pemukiman lainnya. Jika ditelaah berdasarkan kewenangan itu menjadi salah satu kendala bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk melaksanakannya.

Menindaklanjuti permasalahan-permasalahan diatas, Pemerintah Provinsi Jambi akan segera menyusun petunjuk pelaksanaan dan teknis untuk tahun 2012 dengan memberikan langsung kepada Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan kegiatan melalui SKPD Kecamatan dan Kelurahan. Terkait dengan pembebasan pajak, telah diupayakan dengan menyampaikan surat permintaan kepada pimpinan Kantor Pajak, namun belum dapat diakomodir dengan berbagai alasan. Terkait dengan pengembangan perumahan, akan menjadi salah satu poin penting yang akan ditindaklanjuti agar ke depan tidak menjadi suatu kesalahan baik dalam penganggaran maupun pelaksanaan kegiatan.

2.2.1.6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Bappeda merupakan institusi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Gubernur dalam mempersiapkan dan menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) serta melakukan evaluasi terhadap rencana pembangunan.

Pada tahun anggaran 2011 untuk urusan perencanaan melalui Bappeda Provinsi Jambi telah dianggarkan dana sebesar Rp11.538.116.700 yang dipergunakan untuk mendanai program sebagai berikut :

- 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;** program ini bertujuan mempersiapkan rencana pembangunan daerah untuk tahun 2012, serta melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan tahun sebelumnya.

Adapun output dari program ini adalah terlaksananya kegiatan forum SKPD, Konsultasi Publik, Pra Musrenbang dan Musrenbang Provinsi Jambi; tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan APBD dan terlaksananya rapat koordinasi APBN di Provinsi Jambi; Tersusunnya LKPJ Gubernur Jambi Tahun 2010.

Dalam pelaksanaan kegiatan diatas terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain sering terlambatnya pelaksanaan musrenbang Kab/Kota sehingga Provinsi harus menunggu hasil Musrenbang Kab/Kota; bahan LKPJ sering terlambat disampaikan oleh SKPD dan perkembangan data tidak dilengkapi narasi penjelasan yang baik.

Solusi terhadap permasalahan tersebut di atas adalah dengan membuat jadwal pelaksanaan musrenbang Kab/Kota dengan mengikuti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 secara konsisten; memperbaiki narasi LKPJ dengan mengkoordinasikannya dengan SKPD terkait.

2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.

Program ini bertujuan untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan ekonomi secara makro, guna menghasilkan sinergitas antar sektor dan antar pelaku ekonomi. Dalam rangka mencapai program tersebut telah dilaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya: 1) Penyusunan Model Marketing Pariwisata, 2) Koordinasi Perencanaan Bidang Pengembangan Ekonomi, 3) Sosialisasi RPJMD 2011-2015, 4) Penyusunan Key Performance Indicator, 5) Koordinasi dan Perencanaan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan, 6) Koordinasi dan Perencanaan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, 7) Penyusunan Model Pengembangan Desa Mandiri Pangan Terintegrasi PNPM.

Dengan terlaksananya program ini maka: 1) Tersusunnya model marketing pariwisata, yang dapat dijadikan sebagai inovasi baru dalam mempromosikan dan memasarkan destinasi wisata di Provinsi Jambi, 2) Terlaksananya koordinasi perencanaan pengembangan ekonomi, guna mendukung pencapaian target

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas dan berkelanjutan, 3) Tersosialisasikannya RPJMD Provinsi Jambi kepada berbagai pemangku kepentingan, khususnya pihak kabupaten/kota se Provinsi Jambi, 4) Tersusunnya Key Performance Indicator, sebagai instrumen yang baku dalam menentukan kinerja suatu sektor/SKPD. 5) Terlaksananya koordinasi perencanaan dalam pengendalian kerusakan hutan dan lahan, guna memadu-serasikan program dan kegiatan dari SKPD teknis. 6) Terlaksananya koordinasi perencanaan pada sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan, sebagai sektor yang dominan dan penggerak utama (prime mover) ekonomi kerakyatan di Provinsi Jambi, 7) Tersusunnya model pengembangan Desa Mandiri Pangan yang terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat sebagai alternatif dalam merancang dan mengembangkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di desa Mandiri Pangan.

3. Program Perencanaan Sosial Budaya

Program ini bertujuan tercapainya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan program perencanaan sosial budaya melalui beberapa kegiatan antara lain; Perencanaan dan koordinasi Bidang Pemerintahan dan SDM; Perencanaan dan Koordinasi program penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan program ini diharapkan dapat menciptakan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan perkembangan Demokrasi Provinsi Jambi kearah yang lebih baik, tersusunnya Renstra Ketenagakerjaan Provinsi Jambi, tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jambi, tersusunnya Renstra HIV/AIDS dan Narkoba, Rencana Aksi Daerah MDGS, Analisis Ketimpangan Gender, tersusunnya laporan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), tersusunnya laporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TK-PKD) dan tersusunnya dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Provinsi Jambi, serta tersusunnya dokumen Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jambi.

4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.

Hasil yang telah dicapai adalah terlaksananya peningkatan koordinasi perencanaan dan pengelolaan infrastruktur wilayah melalui koordinasi Badan Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Jambi yang secara rutin melakukan Rapat Koordinasi BKPRD Provinsi dengan BKPRD Kabupaten/Kota dan Rapat Pokja Perencanaan Tata Ruang Provinsi Jambi, tujuan dilaksanakannya koordinasi dalam forum BKPRD adalah dalam rangka percepatan penyelesaian RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota.

Selanjutnya melalui kegiatan koordinasi tersebut, BKPRD Provinsi Jambi berhasil memberikan Rekomendasi Gubernur kepada 9 (sembilan) Kabupaten dan 2 (Kota) secara serentak setelah dilaksanakan Rapat Koordinasi BKPRD dalam rangka Evaluasi Raperda RTRW Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, yang mengantarkan Kabupaten/Kota dalam pembahasan Raperda RTRW Kabupaten/Kota dalam forum BKPRN guna memperoleh Persetujuan Substansi Menteri Pekerjaan Umum. Secara nasional, Provinsi Jambi mendapat apresiasi sebagai Provinsi tercepat dalam penyelesaian pembahasan RTRW Kabupaten/Kota. Provinsi Jambi juga telah memperoleh Persetujuan Substansi dari Menteri Pekerjaan Umum atas penyelesaian pembahasan dan dokumen RTRW Provinsi Jambi.

Dokumen RTRW Provinsi Jambi Tahun 2011 – 2031 telah dapat diselesaikan bersama Rancangan Perda (Raperda) RTRW Provinsi, Album Peta RTRW Provinsi dan buku Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. KLHS dapat diselesaikan dengan hasil yang sangat baik atas kerjasama antara pihak donatur (DANIDA International – Denmark), Direktorat Jenderal Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri dan Bappeda Provinsi Jambi. Kementerian Dalam Negeri dibawah Direktorat Jenderal Bina Bangda akan menjadikan Buku KLHS Provinsi Jambi tersebut sebagai best practice bagi Provinsi lain yang sedang menyusun dokumen KLHS.

Sementara itu, yang menjadi kendala dalam penyelesaian Perda RTRW Provinsi Jambi adalah dari substansi kehutanan masih menunggu keluarnya Persetujuan Substansi Menteri Kehutanan. Hal ini terkait dengan usulan perubahan fungsi yang masih dalam proses verifikasi (uji konsistensi) dan penyelesaian tahap akhir oleh Tim Terpadu Kementerian Kehutanan RI. Proses verifikasi Tim Terpadu ini telah dimulai sejak Desember 2010 hingga saat ini masih dalam penyelesaian Tahap akhir.

Kegiatan Pemantapan Database Infrastruktur berbasis Spasial, telah diperoleh hasil capaian tersedianya database infrastruktur yang menjadi arahan prioritas dalam pengembangan Infrastruktur di Provinsi Jambi. Dalam Kegiatan ini terdapat beberapa keluaran diantaranya Penyusunan Master Plan Danau Sipin, Penyusunan Inventarisasi Data Kawasan Pertanian sawah di Provinsi Jambi dan Penyusunan Database Hasil Survey Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan. Semua kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat analisis dan arahan dalam rencana pengembangan infrastruktur dan penataan ruang di wilayah Provinsi Jambi.

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengolahan dan Pemanfaatan Citra Satelit Penginderaan Jauh, telah terselenggara dengan baik atas kerjasama dengan pihak Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan PT SEKALA yang berpusat di Canggu, Bali sebagai tenaga instruktur. Para Peserta terdiri dari Dinas teknis terkait di Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi. Melalui kegiatan ini diharapkan keterampilan dasar pemetaan dapat dikuasai oleh SDM di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota dalam rangka mengolah data-data spasial sebagai dasar bagi kebijakan bidang Penataan Ruang, Guna Lahan dan bidang teknis keruangan lainnya.

5. Program Kerjasama Pembangunan

Tujuan program ini adalah untuk memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi kerjasama pembangunan daerah. Melalui program ini, pada tahun 2011 Provinsi Jambi menjadi tuan

rumah Rakorgub Belajasumba yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI dan dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, gubernur – gubernur dan SKPD terkait se-wilayah BELAJASUMBA serta nara sumber dari Kementerian PU, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perhubungan.

Selain itu, sebagai koordinator komite bidang penelitian Rakorgub se-Wilayah Sumatera, Provinsi Jambi juga menjadi tuan rumah rapat komite bidang penelitian. Rapat ini dihadiri oleh Bappeda dan Balitbangda se-Wilayah Sumatera dan menghasilkan program penelitian bersama yang selanjutnya dibahas dalam Rakorgub se-Wilayah Sumatera. Dalam pelaksanaan program ini di tahun 2011 tidak ditemui kendala yang berarti.

6. Program Pengembangan Data dan Informasi

Program ini bertujuan dalam rangka menyediakan data dan menyebar luaskan informasi kepada stakeholders dan untuk keperluan perencanaan program Pembangunan. Untuk mencapai hal tersebut pada tahun 2011 dilaksanakan melalui kegiatan Pendataan Masyarakat Miskin, kegiatan Pelayanan Data dan Publikasi serta kegiatan Pengembangan Sistem Pemusatan Data Pembangunan Daerah.

2.2.1.7. PERHUBUNGAN

Pembangunan bidang Perhubungan pada Tahun 2011 bertujuan untuk mencapai terwujudnya penyelenggaraan perhubungan yang lancar, tertib, teratur, aman, nyaman, selamat dan terjangkau sehingga tercipta pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien dalam rangka akselerasi kegiatan ekonomi daerah. Isu yang saat ini sudah menjadi salah satu permasalahan nasional adalah tingginya tingkat kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kendaraan angkutan yang melebihi kemampuan jalan di Provinsi Jambi. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan diimplementasikan melalui program dan kegiatan tahun 2011 lebih difokuskan pada aspek pengendalian dan pengawasan angkutan

barang. Untuk mendukung arah dan tujuan pembangunan tersebut dilaksanakan melalui penyediaan sarana dan prasarana keselamatan perhubungan. Selain itu, juga untuk peningkatan pelayanan perhubungan yang cepat, tertib, efektif dan efisien, dalam penanganannya dititik beratkan pada pengaturan lalu lintas dan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas armada lalu lintas di Provinsi Jambi.

Tahun 2011, urusan perhubungan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp11.589.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.555.665.457,00 atau sebesar 95,16%. Yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Perhubungan, yaitu Dinas Perhubungan pada Tahun 2011.

Dari pelaksanaan pembangunan ini telah dilaksanakan peningkatan parasarana dan fasilitas perhubungan uji layak jalan serta tertib administrasi kendaraan bagi kendaraan umum selama satu tahun sebanyak 397 unit kendaraan dan secara keseluruhan jumlah akumulasi uji layak di Provinsi Jambi sebanyak 22.057 unit. Selain itu, dalam rangka menginfentarisasi jumlah angkutan yang memiliki pelayanan izin trayek baik angkutan dalam provinsi maupun luar provinsi telah terdata terjadi lonjakan kendaraan angkutan penumpang yang cukup tinggi yaitu 529 unit untuk AKAP dan 1.113 untuk AKDP jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu AKAP 154 unit, dan AKDP 1.139 unit. Hal ini menggambarkan terjadi lonjakan mobilitas orang dan barang ke provinsi jambi yang dapat diasumsikan bahwa tingkat perekonomian yang semakin meningkat. Disamping itu, dampak yang nyata tentunya telah menjadikan jasa transportasi darat sebagai salah satu perhubungan antar wilayah serta memacu pertumbuhan perekonomian secara merata di wilayah Provinsi Jambi. Terhadap pemenuhan fasilitas perhubungan, telah dilaksanakan pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Timbang Kendaraan Bermotor (JTKB) dan Pelebaran Jalan Masuk/Keluar dan Saluran Air di JTKB Bukit Baling. Hingga Tahun 2011, JTKB di Provinsi Jambi sebanyak 5 Unit di Kabupaten Batang Hari, Muaro Jambi, Sarolangun, Bungo, dan Sungai Penuh. Jika dilihat dari

data statistik Perhubungan, arus pengangkutan yang tinggi melewati JTKB Muaro Jambi sebanyak 51.118 kendaraan dan Batanghari sebanyak 58.246 kendaraan. Apabila kita bandingkan dengan sarana dan prasarana terminal masih belum optimal dimana yang menggunakan komputerisasi baru 2 (dua) JTKB.

Selanjutnya, terhadap program peningkatan dan pengamanan lalu lintas dengan menitik beratkan pada pemeliharaan rambu-rambu jalan dan pemeliharaan traffic light serta melaksanakan kegiatan Patroli Jalan Raya telah dilaksanakan Pengadaan Lampu Lalu Lintas simpang tiga Bangko, Pengadaan Pagar Pengaman jalan di Kabupaten Kerinci sepanjang 300 meter, Pengadaan pagar pengaman jalan di Jalan Jembatan Batang Hari II Simpang Niaso sepanjang 200 meter, Pengadaan dan Pemasangan warning light di JTKB 2 paket, Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan di Simpang Niam- Merlung sepanjang 122 meter, Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas di Jalan Ma. Bulian-Tempino 110 unit, Pengadaan dan Pemasangan rambu lalu lintas di jalan Ness sebanyak 100 unit, Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas di Jalan Simpang Niam- Merlung 122 unit, Pengadaan dan Pemasangan Rambu jalan di Ma. Tembesi-Sarolangun sepanjang 350 buah, dan pengadaan dan pemasangan rambu jalan di Jalan Jembatan Batang Hari II di Simp. Niaso sebanyak 180 buah serta pengadaan dan pemasangan rambu sungai sebanyak 63 unit. Selain itu, juga dilaksanakan penyusunan design manajemen dan rekayasa lalu lintas di Jalan Sultan Thaha Jambi. Dengan dilakukannya penyediaan berbagai prasarana pendukung lalu lintas dan rambu-rambu ini baik untuk transportasi darat maupun laut, diharapkan dapat berimplikasi pada semakin menurunnya angka kecelakaan dan meningkatnya keselamatan dan kenyamanan mobilitas.

Terhadap transportasi udara, hingga tahun 2011 terjadi peningkatan frekwensi penerbangan yaitu : Pesawat masuk dan keluar sebanyak 6.082 kali dengan jumlah penumpang 759.315 orang. Disamping itu, juga dalam meningkatkan Bandara Sulthan

Thaha Syaifuddin yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura telah dilakukan kerjasama terutama rencana pengembangan Bandara menjadi Bandara Internasional dengan kapasitas penerbangan skala nasional dan internasional.

Beberapa permasalahan Sektor Perhubungan selain pelanggaran lebih muatan angkutan barang, sumber daya manusia dan, minimnya anggaran pembangunan sarana prasarana perhubungan adalah berkurangnya kenyamanan dan ketidak tertiban pelayanan angkutan udara. Untuk mengurangi dan mengeliminir terjadinya permasalahan-permasalahan tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi secara bertahap terus melakukan pembenahan dan peningkatan sarana prasarana, pengaturan, perencanaan serta kualitas sumber daya manusia.

2.2.1.8. LINGKUNGAN HIDUP

Program pembangunan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi merupakan prioritas pembangunan ke 4 (empat) dalam RPJMD Provinsi Jambi yakni "*Menciptakan pengelolaan sumber daya alam secara terpadu dengan mengedepankan penataan ruang dan lingkungan*". Pada tahun 2011 program dan kegiatan dibiayai melalui sumber dana APBD murni Provinsi Jambi sebesar Rp3.099.337.900,00 dan APBD Perubahan sebesar Rp861.930.000,00. Program dan kegiatan yang dilaksanakan terbagi dalam 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan. Program dan kegiatan dimaksud sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

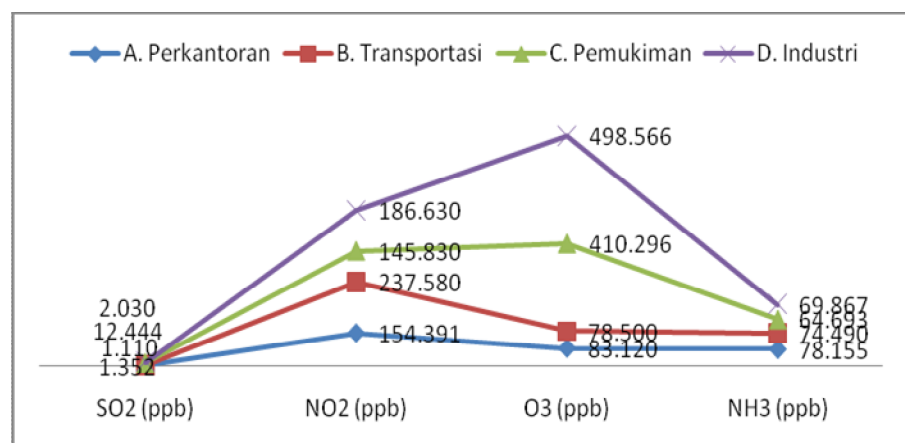
1.1. Pemantauan Kualitas Lingkungan

Indikator Kinerja Program berupa : 1). Pemantauan kualitas air sungai lintas kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi, 2). Pemantauan kualitas udara ambien di wilayah Provinsi Jambi, 3). Pemantauan Bahan Perusak Ozon. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air dapat diketahui bahwa Sungai Batanghari dalam status tercemar sedang sampai berat. Bagian dari Sungai Batanghari yang

mengalami tercemar berat adalah Desa Pasar Tebo Kec.Tebo Tengah Kab.Tebo. Bahan pencemar yang masuk berupa bahan organik yang berasal dari aktivitas pasar. Sementara Desa Sanggaran Agung Kecamatan Keliling Danau dan Desa Muara Imat Kec.Batang Merangin Kabupaten Kerinci terdapat pencemaran terhadap logam Mangan (Mn) sementara Kecamatan Hamparan Rawang dan Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh terdapat pencemaran zat besi (Fe). Diduga penyebab dari pencemaran ini adalah tingginya pemakaian dosis pupuk sehingga unsur yang tidak terserap oleh tumbuhan akan terbawa dalam aliran air sungai.

Kualitas udara di Provinsi Jambi berdasarkan hasil pemantauan di 11 kab/kota dengan lokasi pantau perkantoran, transportasi, wilayah pemukiman dan area industri terhadap unsur SO_2 , NO_2 , CO_2 serta NH_3 menunjukkan bahwa kualitas udara masih dibawah baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.11 Kualitas Udara di Provinsi Jambi Tahun 2011



Berdasarkan kualitas udara yang terpantau di sejumlah wilayah tersebut maka dapat dikatakan bahwa Provinsi Jambi masih memiliki kualitas udara yang masih baik dan aktivitas yang ada belum mencemari udara. Namun demikian upaya

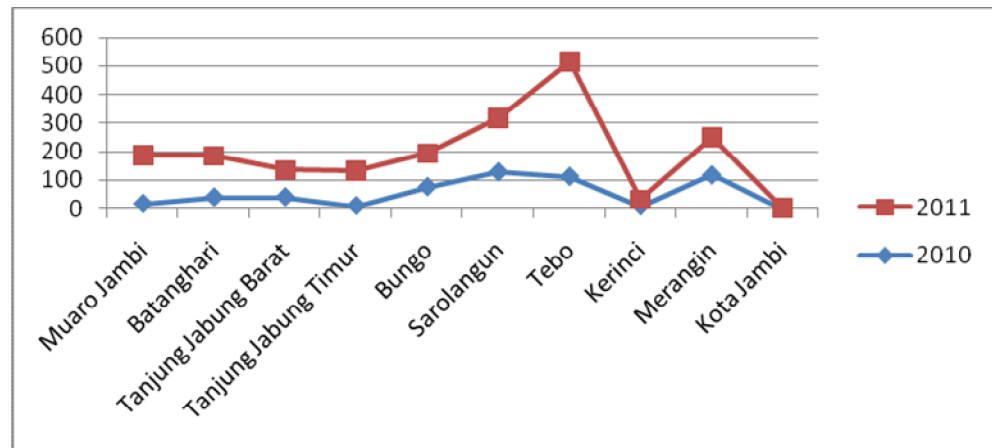
preventif pengadaan Ruang Terbuka Hijau disekitar area tersebut tetap dibutuhkan sebagai penyedia oksigen bagi kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya.

Pemantauan Bahan Perusak Ozon (BPO) telah dilaksanakan terhadap usaha yang mempunyai potensi untuk menghasilkan zat perusak ozon, seperti usaha servis AC mobil/kulkas, dan bengkel. Pemantauan dilakukan pada 4 (empat) kabupaten pada 18 sampel perusahaan, dimana Kab. Merangin 4 (empat) perusahaan, Kab. Bungo 7 (tujuh) perusahaan, Kab. Batanghari 4 (empat) perusahaan dan Kab. Tanjab Barat 3 (tiga) perusahaan . Jika dilihat dari penggunaan BPO dalam setahun sebesar 1.456 kg, maka ini tergolong tinggi. Perlu upaya untuk mencari solusi terhadap barang substitusi penggunaan BPO agar tidak memberi dampak lebih buruk bagi lapisan ozon.

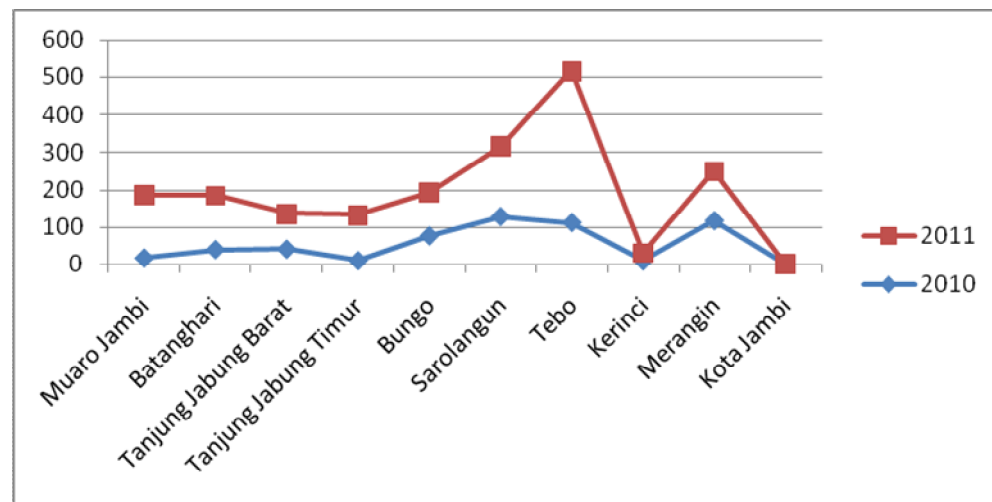
2. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Salah satu sasaran yang tertuang dalam program ini adalah peningkatan kualitas kebijakan konservasi SDA dan kualitas penyuluhan lahan dan hutan sehingga terlestarnya keanekaragaman hayati. Kegiatan yang telah dilaksanakan berupa : 1). *Penilaian Menuju Indonesia Hijau (MIH)* untuk Provinsi Jambi telah dilaksanakan pada awal Oktober 2011 di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Bungo. 2). *Pelaksanaan Koordinasi dan Sosialisasi Kebakaran Lahan dan Hutan* telah dilaksanakan di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Berdasarkan pemantauan sampai dengan Desember 2011 jumlah Hot Spot di Provinsi Jambi sebanyak 1.396 titik. Gambaran hotspot Provinsi Jambi dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.12 Jumlah Hot Spot Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Jambi Tahun 2011



Gambar 2.13 Perbandingan Jumlah Hot Spot (titik api) Tahun 2010 dan 2011



Berdasarkan kedua grafik diatas maka pada tahun 2011 periode bulan Juni sampai Oktober terdapat peningkatan titik api, hal ini berkaitan dengan dimulainya musim kemarau. Sementara jika dibandingkan dengan tahun 2010 maka jumlah titik api pada tahun 2011 lebih banyak dari tahun sebelumnya. Untuk beberapa kabupaten tertentu seperti Sarolangun, Tebo dan Merangin memerlukan perhatian yang lebih serius, hal ini berkaitan dengan peningkatan emisi karbon. Sesuai dengan komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam pertemuan

KTT G 20 di Pittsburg Amerika Serikat dalam menurunkan emisi karbon hingga 26% maka pada tahun 2012 mitigasi kebakaran lahan/hutan akan lebih ditingkatkan lagi dan dilakukan lebih terarah sesuai dengan waktu dibutuhkan dan lokasi dimana titik api tersebut terjadi.

3. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup

Sasaran kegiatan yang dilakukan adalah : 1). *Peningkatan kualitas data dan system informasi pengelolaan lingkungan hidup*, 2). *Pembuatan Data base website BLHD Provinsi Jambi* telah selesai dilaksanakan pada akhir Nopember 2011. 3). *Pembuatan leaflet* sebanyak 1.000 lembar sudah 100% dilakukan pencetakan serta 4). Pelaksanaan operasional mobil hijau sampai dengan Desember 2011 yaitu telah dilaksanakan antara lain Sosialisasi Mobil Hijau sebanyak 15 kali dan pameran sebanyak 3 kali.

2.2.1.9. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1) Program Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Tujuan Program ini adalah meningkatkan penyelenggaraan tata pemerintahan desa, penanaman nilai kegotongroyongan, pemanfaatan dan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG). Melalui program ini dilakukan pembinaan terhadap desa dan kelurahan dalam pengelolaan pemerintahannya. Pada tahun 2011 ini berdasarkan hasil penilaian lomba desa, Desa Pinang Merah Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin masuk ke dalam 10 besar desa terbaik seluruh Indonesia, yang selama ini belum pernah diraih oleh Provinsi Jambi. Dalam pemanfaatan dan penerapan TTG, dalam gelar TTG Tingkat Nasional, beberapa produk yang berasal dari Provinsi Jambi juga memperoleh apresiasi yang baik dengan terjualnya beberapa alat-alat hasil penerapan TTG seperti alat deteksi gempa dan alat press kelapa sawit.

2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Perdesaan

Melalui program ini sebagai bagian dari pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan telah memberikan dampak pada penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam membangun di wilayah perdesaan. Saat ini untuk mendukung perencanaan pembangunan, telah tersusun RPJMDesa di lokasi PNPM Mandiri Perdesaan untuk mengintegrasikan perencanaan di tingkat desa sebanyak 912 desa yang telah menyusun RPJMDesa. Selain itu, masyarakat juga telah menunjukkan partisipasinya dalam pembangunan sebesar 2,56% dari jumlah keseluruhan kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui PNPM Mandiri Perdesaan.

3) Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan

Melalui program ini dibina kelompok-kelompok perempuan peduli lingkungan, yang turut aktif dalam pelestarian lingkungan termasuk dalam memprakarsai gerakan tanam danelihara pohon. Selain itu, juga dilakukan pembinaan melalui pendekatan sosial budaya kepada masyarakat mengenai kesetaraan dan keadilan gender, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai peran dan tugas perempuan langsung di masyarakat melalui pendekatan sosial budaya yang berlaku di masyarakat itu sendiri.

4) Program Peningkatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak

Sampai dengan saat ini melalui program ini P2TP2A sebagai unit pelayanan terpadu untuk menangani permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tindakan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, telah menangani sebanyak 33 kasus selain pendampingan apabila berkaitan dengan hukum. Melalui kegiatan ini P2TP2A juga berhasil mengembalikan seorang anak yang diterlantarkan kepada keluarganya dari Provinsi Kepulauan Riau.

5) Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak

Dalam upaya mendukung penyusunan anggaran yang responsif gender, telah dilatih 20 orang *focal point* dari setiap kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, selain 25 orang *focal point* yang ada di SKPD-SKPD Provinsi Jambi. Kelompok kerja PUG Provinsi Jambi juga telah terbentuk, sehingga koordinasi penyusunan anggaran responsif gender dapat dilakukan dengan baik. Dalam penguatan kelembagaan perlindungan anak juga telah terbentuk Forum Anak Daerah Provinsi Jambi, yang bertujuan untuk memberikan hak-hak anak dalam peri kehidupannya, seperti hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, hak untuk berekspresi dan hak untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. Melalui Forum Anak Nasional telah dikukuhkan 5 orang duta anak Indonesia yang salah satunya berasal dari Provinsi Jambi.

6) Peningkatan Partisipasi Perempuan di Daerah Perdesaan

Program ini ditujukan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif perempuan yang dilakukan secara terpadu oleh SKPD-SKPD terkait. Melalui Forum Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP) telah ditentukan rencana pengembangan usaha ekonomi produktif perempuan pada masing-masing kabupaten, dengan demikian sejak awal kegiatan pengembangan ekonomi perempuan dapat diintegrasikan.

2.2.1.10. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1. Program Peningkatan Keluarga Berencana

Dalam rangka pengendalian jumlah penduduk maka salah satu Program yang dilaksanakan adalah Peningkatan Keluarga Berencana, dengan capaian Program pada tahun 2010 adalah sebagai berikut : akseptor KB aktif mencapai 493.416 dari jumlah PUS sebanyak 615.826 atau sebesar 80,12 %, dengan 4.480 peserta KB baru dari 4.487 PPM atau sebesar 99,84 %. Sementara peserta KB baru pria mencapai 349 akseptor.

Pelayanan KB juga dilakukan kepada akseptor-akseptor yang berada di wilayah-wilayah perbatasan dengan provinsi tetangga, untuk memperluas jangkauan pelayanan

2. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga

Untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, juga dilakukan pembinaan melalui Gerakan Sayang Ibu (GSI), yang dilaksanakan di Kecamatan-kecamatan melalui pembentukan Satuan Tugas GSI pada setiap kecamatan.

2.2.1.11. SOSIAL

Pada tahun 2010 angka kemiskinan Provinsi Jambi sebesar 257.539 jiwa atau 8,34 %, jumlah tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 8,77% dari jumlah penduduk atau sekitar 270.817 jiwa, begitu juga dengan jumlah angka pengangguran tahun 2009 : 69.857 orang, dengan berbagai program kegiatan angka tersebut diakhir tahun 2010 dapat ditekan menjadi 60.055 jiwa.

Permasalahan yang dihadapi Provinsi Jambi dalam mengatasi angka kemiskinan dan pengangguran, secara fungsional, kewenangan dan keuangan yang terbatas. Untuk itu perlu adanya sinergisitas program dan anggaran antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran.

1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program ini didukung oleh kegiatan Pemutakhiran data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) dan Makam Pahlawan Nasional (MPN), peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN), peningkatan kapasitas Badan Kerjasama Koordinasi Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Jambi, adapun hasil dari program ini adalah tersedianya data PMKS dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), terpeliharanya TM dan MP, terlaksananya peringatan HKSAN di Provinsi Jambi serta, terlaksananya peningkatan kapasitas BKKKS Provinsi Jambi.

2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

Untuk mencapai sasaran program ini didukung Kegiatan Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin (pendampingan), pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di lokasi Bina Purna. Dengan terlaksananya program ini dapat memberdayakan keluarga fakir miskin dan meningkatkan kesejahteraan 1.000 KK serta memberdayakan KAT sebanyak 32 KK.

3. Program Pembinaan Anak Terlantar

Untuk mencapai sasaran program ini didukung oleh kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar, melakukan kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan korban bencana dan orang terlantar, melalui program ini telah dilaksanakan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar sejumlah 60 orang anak terlantar.

4. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti jompo

Untuk mencapai sasaran program ini dilakukan kegiatan pelayanan kebutuhan panti Asuhan/Panti Jompo, dengan melakukan pembinaan kepada 70 orang Lansia di UPTD Panti Sosial Tresna Werdha “Budi Luhur” Jambi.

5. Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba)

Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan usaha bagi eks penyandang penyakit sosial dengan tujuan para penyandang masalah sosial dapat berperan ditengah masyarakat sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.

2.2.1.12. KETENAGAKERJAAN

Bidang ketenagakerjaan pada tahun 2011 melaksanakan tiga program yang meliputi Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, Program peningkatan kesempatan Kerja dan program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Dengan program Program/kegiatan tersebut

jumlah angka pengangguran dapat ditekan menjadi 58,8 ribu orang, menurun dari tahun lalu sebesar 60.055 orang.

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja, Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan (Subsidi Program) dengan Lembaga Pelatihan Swasta, Pemetaan Lulusan BLK, Peningkatan Profesionalisme TK dan Instruktur, Sosialisasi Kios 3 in 1.

Capaian dari program tersebut telah menghasilkan tersedianya peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja sehingga pencari kerja yang terampil dengan didukung oleh peralatan yang lengkap, menciptakan tenaga kerja yang berdaya guna, terlaksananya pelatihan kerjasama yang baik dengan pihak swasta dengan harapan menciptakan tenaga kerja terampil, terciptanya sosialisasi dan promosi program melalui klinik produktivitas, bertambahnya pengetahuan bagi para tenaga kerja, terlaksananya Bimbingan Tehnis Total Faktor Produksi untuk menambah pengetahuan bagi para tenaga kerja, terlaksananya Bimbingan Tehnis Konsultasi dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja UKM agar tenaga kerja lebih berproduktivitas dengan cara UKM, bertambahnya pengetahuan para tenaga kerja dalam bidang manajemen usaha dan para pencari kerja dapat menciptakan lapangan kerja sendiri.

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Untuk mencapai sasaran program ini didukung oleh kegiatan Pengembangan Kesempatan Kerja Dalam dan Luar Negeri dan Monitoring Pengendalian Penggunaan TKA, Monitoring Kesempatan Kerja Sektoral dan Koordinasi Penanggulangan Pengangguran, Koordinasi Pengiriman TK ke Provinsi Jatim, Penyusunan Program, RTKD dan Analisa Keberhasilan Program, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penempatan, Pengumpulan, Pengolahan

Analisis, Penyebaran Informasi Pasar Kerja, Pembentukan Kelompok Wira Usaha baru Sektor Informal dan Pendayagunaan TKPMP, Penyusunan Profil Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik.

Melalui program ini telah terkelolanya data ketenagakerjaan yang memudahkan para pencari kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan keterampilannya, terlaksananya Pengembangan Kesempatan Kerja baik di Dalam maupun di Luar Negeri, tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Daerah, terlaksananya monitoring Kesempatan Kerja Sektoral dan Koordinasi Penanggulangan Pengangguran dengan tersusunnya profil ketenagakerjaan.

3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program ini bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja melalui kegiatan Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Monitoring UMP serta THR, Pembahasan dan Survey Kebutuhan Hidup Layak serta UMP, Pengembangan Mekanisme Lembaga Kerjasama Tripartit, Pelaksanaan Program PBTA sesuai Pergub No.21 Tahun 2008. Hasil yang dicapai dari program ini antara lain terlaksananya sosialisasi dan monitoring UMP serta THR dan semakin meningkatnya mekanisme kerjasama lembaga tripartit.

2.2.1.13. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Bidang ketenagakerjaan pada tahun 2011 melaksanakan tiga program yang meliputi Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, Program peningkatan kesempatan Kerja dan program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Dengan program Program/kegiatan tersebut jumlah angka pengangguran dapat ditekan menjadi 58,8 ribu orang, menurun dari tahun lalu sebesar 60.055 orang.

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja, Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan (Subsidi Program) dengan Lembaga Pelatihan Swasta, Pemetaan Lulusan BLK, Peningkatan Profesionalisme TK dan Instruktur, Sosialisasi Kios 3 in 1.

Capaian dari program tersebut telah menghasilkan tersedianya peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja sehingga pencari kerja yang terampil dengan didukung oleh peralatan yang lengkap, menciptakan tenaga kerja yang berdaya guna, terlaksananya pelatihan kerjasama yang baik dengan pihak swasta dengan harapan menciptakan tenaga kerja terampil, terciptanya sosialisasi dan promosi program melalui klinik produktivitas, bertambahnya pengetahuan bagi para tenaga kerja, terlaksananya Bimbingan Tehnis Total Faktor Produksi untuk menambah pengetahuan bagi para tenaga kerja, terlaksananya Bimbingan Tehnis Konsultasi dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja UKM agar tenaga kerja lebih berproduktivitas dengan cara UKM, bertambahnya pengetahuan para tenaga kerja dalam bidang manajemen usaha dan para pencari kerja dapat menciptakan lapangan kerja sendiri.

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Untuk mencapai sasaran program ini didukung oleh kegiatan Pengembangan Kesempatan Kerja Dalam dan Luar Negeri dan Monitoring Pengendalian Penggunaan TKA, Monitoring Kesempatan Kerja Sektoral dan Koordinasi Penanggulangan Pengangguran, Koordinasi Pengiriman TK ke Provinsi Jatim, Penyusunan Program, RTKD dan Analisa Keberhasilan Program, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penempatan, Pengumpulan, Pengolahan Analisis, Penyebaran Informasi Pasar Kerja, Pembentukan Kelompok Wira Usaha baru Sektor Informal dan Pendayagunaan

TKPMP, Penyusunan Profil Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik.

Melalui program ini telah terkelolanya data ketenagakerjaan yang memudahkan para pencari kerja yang sesuai dengan tingkat pendidikan dan keterampilannya, terlaksananya Pengembangan Kesempatan Kerja baik di Dalam maupun di Luar Negeri, tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Daerah, terlaksananya monitoring Kesempatan Kerja Sektoral dan Koordinasi Penanggulangan Pengangguran dengan tersusunnya profil ketenagakerjaan.

3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program ini bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja melalui kegiatan Melalui program ini telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Monitoring UMP serta THR, Pembahasan dan Survey Kebutuhan Hidup Layak serta UMP, Pengembangan Mekanisme Lembaga Kerjasama Tripartit, Pelaksanaan Program PBTA sesuai Pergub No.21 Tahun 2008. Hasil yang dicapai dari program ini antara lain terlaksananya sosialisasi dan monitoring UMP serta THR dan semakin meningkatnya mekanisme kerjasama lembaga tripartit.

2.2.1.14. PENANAMAN MODAL

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Pelaksanaan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama bertujuan untuk menumbuhkan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif. Dalam upaya mewujudkan sasaran dari program peningkatan promosi dan kerjasama ini, Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu telah melaksanakan beberapa kegiatan yang antara lainnya adalah; Kegiatan Peningkatan Kerjasama strategis (kemitraan) untuk pengembangan investasi dan pemutakhiran data informasi investasi daerah; Kegiatan

Inventarisasi Potensi Investasi Daerah Tertinggal; Kegiatan Fasilitas Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal; Kegiatan peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal; Kegiatan Pameran dan Temu usaha di dalam negeri; Kegiatan Pameran dan Temu usaha di Luar Negeri.

Hasil atau output dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut, dapat dilaporkan antara lain;

- 1) Terlaksananya temu usaha kemitraan antara usaha besar dengan UMKM di dua Kota yaitu Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Dari pelaksanaan tersebut, terinventarisir berbagai permasalahan yang antara lainnya, adalah adanya keengganan para pelaku UMKM untuk meminjam modal usaha melalui Perbankan (Gap Pelayanan Perbankan), karena tingginya Suku Bunga, ketidaktahuan pengusaha dan terbatasnya agunan para pengusaha.
- 2) Terlaksananya Inventarisasi Potensi Investasi daerah tertinggal yang belum dikelola secara optimal. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut, maka telah tersedia data Potensi Investasi Daerah Tertinggal di Provinsi Jambi dan dalam 3 bahasa.
- 3) Terlaksananya Fasilitas koordinasi Kerjasama Bidang Penanaman Modal. Dengan terlaksananya kegiatan tersebut, dihasilkan Dari kegiatan tersebut dihasilkan kesepakatan bahwa terhitung tanggal 23 Juni 2011, BKPM Pusat tidak akan memproses lagi seluruh aplikasi PMDN, tapi diserahkan kepada Daerah. Pusat hanya memproses perizinan untuk PMA. Untuk itu Daerah harus melakukan penguatan penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal untuk mendapatkan pelimpahan/pendelegasian wewenang seluruh perizinan dan non perizinan penanaman modal dari Gubernur/Bupati/Walikota. PTSP harus didukung ketersediaan pelayanan perizinan dan non perizinan

penanaman modal secara on-line (SPIPISE) dengan mekanisme kerja dan prosedur perizinan yang jelas dan transparan (tersedianya informasi prosedur dan perizinan serta biaya yang jelas). Guna menciptakan iklim usaha yang kondusif, dapat dilakukan dengan memantapkan kemitraan KADIN dengan Pemprov, memantapkan kelembagaan/ Forum Investasi Daerah (BKPMPI), Perdagangan, Bappeda dan Kadin, membentuk Forum Promosi dan Investasi Daerah untuk memantapkan kebijakan investasi dari segi potensi, kemudahan informasi serta komunikasi secara intensif.

- 4) Terlaksananya pembinaan dan pengendalian penanaman modal terhadap 226 perusahaan PMDN/PMA. Dengan terlaksananya kegiatan ini, telah dihasilkan Buku Profil Perusahaan di Provinsi Jambi Tahun 2011.
- 5) Diikutinya beberapa pameran dan temu usaha baik dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Pelaksanaan program ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi investor lokal maupun asing. Untuk mencapai sasaran program telah dilaksanakan kegiatan yang antara lain; Kegiatan Koordinasi Pembinaan Perizinan PM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Terlaksananya kegiatan ini telah memberikan hasil yang antara lain; terinventarisasinya izin-izin yang dimiliki oleh Perusahaan berupa SP, IUT, APIT, IMTA dan Izan-izin yang diberikan oleh Kab./Kota; tersusunnya Leaflet Jenis dan Persyaratan Perizinan Penanaman Modal.

3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.

Program ini bertujuan memberikan informasi kepada investor mengenai potensi sumberdaya serta ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki, agar dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Provinsi Jambi. Untuk mencapai sasaran

dari program tersebut, telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Proposal Peluang Investasi dengan output kegiatan tergalinya potensi Investasi yang akan dikembangkan di Provinsi Jambi, sehingga mampu memberikan masukan kepada para calon investor. Hasil dari kegiatan ini antara lainnya adalah tersusunnya data Peluang Investasi Daerah di Provinsi Jambi dan tersusnya Buku Proposal Peluang Investasi Daerah di Provinsi Jambi dalam 3 bahasa.

Capaian indikator dari pelaksanaan beberapa program pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu terlihat beberapa kemajuan yang tergambar pada :

1. PMDN dengan rencana investasi sebesar Rp75,86 triliun terealisasi sebesar Rp16,34 triliun.
2. Rencana investasi PMA dalam bentuk Rupiah ditargetkan sebesar Rp3,86 triliun dengan realisasi Rp4,44 triliun.
3. Rencana investasi PMA ditargetkan sebesar US \$ 2.753.167.000,00 dengan realisasi sebesar US \$ 4.904.933.000,00

2.2.1.15. KEBUDAYAAN

Kebudayaan merupakan bagian penting dalam pembangunan. Kebudayaan terkait dengan persoalan karakter dan mental bangsa yang menentukan keberhasilan pembangunan. Untuk itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi dalam melaksanakan tupoksinya melalui program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan kekayaan Budaya

Sasaran program ini adalah untuk meningkatkan Nilai-nilai budaya, seni dan film yang dapat memberikan makna pembangunan nasional dalam segenap dimensi kehidupan masyarakat serta memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa. Selain itu juga guna meningkatkan apresiasi masyarakat terutama kalangan pendidikan terhadap nilai sejarah dan budaya daerah Jambi. Dengan dukungan dana sebesar Rp2.335.192.425,00 program ini dilaksanakan pada Tahun 2011.

Realisasi program ini mendorong terlaksananya Pendataan Kepurbakalaan Situs Merangin bersama dengan Tim Geologi Pusat menuju pengembangan menjadi Global GeoPark Network, Pendataan Lanjutan Tahap III Situs Percandian Muaro Jambi menuju pengakuan World Heritage oleh UNESCO, Pameran koleksi Museum Negeri Jambi dan Museum Perjuangan Rakyat Jambi dalam kegiatan Jambi Emas Expo 2011 dan Festival Candi Muara Jambi, Pekan Kejuangan Rakyat Jambi, Pameran Alat Musik Nusantara di Museum Negeri Jambi yang diikuti oleh seluruh Provinsi di Indonesia, Pekan Pesona Budaya Jambi Expo 2011, dan pembuatan CD Interaktif Pariwisata Jambi.

Adapun data pengunjung Museum Negeri Jambi pada Tahun 2010 sebanyak 33.029 orang dan sebanyak 35.065 orang pada Tahun 2011. Untuk Museum Perjuangan Rakyat Jambi jumlah pengunjung sebanyak 18.251 orang pada Tahun 2010 dan sebanyak 16.004 orang pada Tahun 2011.

2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Sasaran program ini bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan dalam menyerap nilai budaya yang positif guna memperkaya khazanah budaya bangsa yang berlandaskan moral spiritual, norma dan etika. Program ini didukung dana sebesar Rp865.556.500,00 yang dijabarkan melalui kegiatan: Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah.

Dengan program ini telah terlaksana Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah antara lain dengan melaksanakan Gita Bahana Nusantara di Jakarta, Pergelaran Kesenian daerah Jambi didalam daerah maupun diluar daerah, Pembuatan Film Dokumenter Upacara Basale Suku Anak Dalam, Serta Dewan Kesenian Jambi (DKJ).

2.2.1.16. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olah Raga telah disusun 6 program pokok yaitu 1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan; 2) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda; 3) Program Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat dan Berprestasi dengan Lembaga Instansi Lain; 4) Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga; 5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga; 6) Program Kebijakan dan Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan.

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program ini bertujuan meningkatkan wawasan kebangsaan yang dilandasi iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, menghormati supremasi hukum dan ikut menegakan demokrasi. Untuk mendukung program ini pada tahun 2011 dianggarkan dana sebesar Rp1.115.951.500,00.

Dengan alokasi anggaran tersebut telah dilaksanakan Kegiatan Seleksi, Pelatihan dan Rekreasi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi dan Nasional terhadap anggota PASKIBRAKA sebanyak 58 Orang (56 orang untuk tingkat Provinsi dan 2 Peserta untuk tingkat Nasional) jumlah anggaran untuk kegiatan ini Rp613.972.500,00. Serta kegiatan Bulan bakti pemuda. Dalam kegiatan bulan bakti pemuda ini terdapat beberapa kegiatan yaitu kegiatan pemilihan pemuda pelopor, kegiatan napak tilas jejak pahlawan yang dilaksanakan di Kabupaten Bungo, kegiatan pengembangan kreatifitas pemuda, kegiatan lokakarya pemuda. Jumlah anggaran untuk kegiatan bulan bakti pemuda ini sebesar Rp501.979.000,00

2. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Kecakapan Hidup Pemuda

Program ini bertujuan memberikan keterampilan kepada para pemuda agar mereka dapat meningkatkan produktifitas

kerja, meningkatkan dan menunjang ekonomi pemuda agar dapat mengurangi ketergantungan pada orang lain serta ikut bersaing dalam pasar kerja. Untuk mendukung program ini pada tahun 2011 dianggarkan dana sebesar Rp603.402.500,00.

Melalui program ini telah dilaksanakan: kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda sebanyak 25 orang, Kegiatan pembinaan Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP-3), Kegiatan Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN), Kegiatan seleksi Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP), Seleksi Kegiatan Kapal Pemuda Nusantara (KPN) .

3. Program Kerjasama Peningkatan Olahragawan Berbakat dan Berprestasi dengan Lembaga Instansi Lain

Program ini bertujuan memberikan pembinaan dan peningkatan prestasi para atlit terutama atlit cabang olahraga prestasi, kegiatan ini mulai dari latihan sampai mengikuti even-even olahraga Nasional maupun regional. Untuk mendukung program ini pada tahun 2011 dianggarkan dana sebesar Rp1.137.082.750,00

Pada tahun 2011 dilaksanakan kegiatan Invitasi Olahraga Tradisional kegiatan ini telah ditentukan oleh Kemenpora dengan Cabang Olahraga Dagongan, Enggrang, Terompah panjang dan lomba marathon 10 K yang dilaksanakan di Kabupaten Muaro Jambi. Disamping itu juga kegiatan pekan olahraga seni pesantren daerah (POSPEDA) bekerjasama dengan kementerian Agama Provinsi Jambi dengan cabang olahraga Senam, Atletik, Tenis Meja, Pencak Silat, Bulu Tangkis, sepak Takraw dan Catur. Kegiatan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS), kegiatan ini adalah puncaknya olahraga pelajar dan untuk mengukur sejauh mana prestasi pelajar dalam bidang olahraga yang selama 2 tahun diberikan pembinaan oleh Dispora Provinsi seluruh Indonesia. Pada tahun 2011 kegiatan POPNAS dilaksanakan di Provinsi Riau, dan kontingen dari Provinsi Jambi berhasil masuk dalam 10 besar dari 33 Provinsi dengan jumlah medali sebanyak 3 emas, 10 perak dan 11 perunggu.

4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Program ini bertujuan menanamkan pengertian/ pemahaman tentang fungsi dan peranan olahraga bagi kehidupan manusia secara individu maupun secara masyarakat dengan semboyan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Untuk mencapai sasaran program ini didukung dana sebesar Rp1.377.131.500,00. Pada tahun 2011 Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) menampung atlet pelajar sebanyak 20 orang dengan cabang olahraga Renang, Senam, Judo, Angkat Besi. Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar Cacat Nasional (POPCANAS) yaitu olahraga Pelajar bagi penyandang Cacat dan diikuti 100 Atlet Penyandang Cacat Pelajar . Adapun cabang Olahraga yang diperlombakan yaitu Atletik, Renang, dan Tenis Meja.

5. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Olahraga

Program ini bertujuan menyediakan sarana prasarana olahraga sebagai fasilitas untuk menunjang pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga, dengan alokasi dana sebesar Rp2.855.814.100,00

6. Program Kebijakan Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan

Program ini bertujuan untuk mensinergikan program Provinsi dengan Kabupaten Kota agar dalam penyusunan program pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan tetap berpedoman pada Visi dan Misi serta kebijakan Pemerintah Daerah Masing-masing kabupaten kota dengan prinsip program tersebut benar-benar menyentuh kebutuhan dunia kepemudaan dan keolahragaan daerah Jambi. Pada tahun 2011 dialokasikan dana sebesar Rp377.464.060,00.

Secara umum masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan adalah masih kurangnya perhatian masyarakat terhadap fungsi dan peranan pemuda dalam pembangunan,

hal ini dapat dilihat dari terbatasnya jumlah pemuda yang terlibat dalam proses pembangunan terutama di daerah pedesaan. Untuk mengatasi masalah tersebut dilakukan koordinasi dan sosialisasi agar Kabupaten dapat meningkatkan atau mempertajam program kerja yang benar-benar menyentuh akar permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan di daerah Jambi.

2.2.1.17. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Untuk mewujudkan visi dan misi Kesbangpol Provinsi Jambi diidukung dengan program prioritas terdiri dari :

1. Program Perwujudan Demokrasi Yang Makin Kokoh

Program ini bertujuan untuk meningkatkan perwujudan demokrasi yang dijabarkan dengan kegiatan antara lain: Fasilitasi Pemilu dan Pemilukada serta pengembangan Partisipatif daerah, dengan penyelenggaraan Lokakarya Evaluasi penyelenggaraan Pemilukada se Provinsi Jambi Kabupaten/Kota terdiri dari unsur Kakan/Kaban Kesbangpol, Linmas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kabag Pemerintahan Kabupaten/Kota, Unsur PNS Parpol, Organisasi Kepemudaan, Ormas, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkup Provinsi serta pemantauan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada sampai prosesi pelantikan Bupati. Sedangkan dalam Peningkatan dan pengembangan Kualitas proses politik bagi lembaga Parpol dalam rangka persiapan dan kesiapan bagi kader dan lembaga politik dengan mengadakan rapat verifikasi yang berkaitan dengan SPJ untuk bantuan parpol serta laporan atas kepengurusan Parpol kepada Pemerintah daerah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

2. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Melalui program ini telah terlaksananya Pemantauan, monitoring dan evaluasi keberadaan/eksistensi ORPOL, ORMAS, LSM, OKP dan Lembaga Keagamaan. Untuk mengetahui

perkembangan keberadaan eksistensi dan tersusunnya laporan data ORMAS setiap tahunnya, sehingga dapat ter-updatenya buku direktori PARPOL, ORMAS, OKP di Provinsi Jambi, serta terselenggaranya forum diskusi dan Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik yang diikuti oleh unsur Kesbangpol, Linmas, Ketua KPU, Kabag Pemerintahan Setda Kab/kota, Unsur PNS di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, PARPOL, OKP, ORMAS, BEM dan LSM.

Dalam hal ini dapat dilihat hasil terhadap perkembangan keberadaan organisasi kemasyarakatan dan kelembagaan selama tahun 2011 pada tabel:

Tabel 2.24 Data Organisasi Kemasyarakatan dan Kelembagaan Provinsi Jambi Tahun 2011.

NO	Organisasi	Jumlah	Ket
1	Ormas / LSM Kesamaan Fungsi	173	Ormas Aktif 33
2	Ormas / Asosiasi	39	LSM Aktif 33
3	Ormas / Yayasan	24	
4	Ormas / Keagamaan	29	
5	Ormas / Profesi	18	
6	Ormas / Kepemudaan	28	
7	Ormas / Peguyuban	19	
8	Ormas / Kegiatan	44	
Jumlah		374	

Sumber Data : Kesbangpol Provinsi Jambi

3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa, terhadap generasi muda di lingkungan pendidikan SLTA, untuk memahami kesadaran berbudaya dalam rangka peningkatan rasa persatuan dan kesatuan dalam menjaga keutuhan bangsa dan bernegara, sedangkan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dengan terlatihnya tenaga pembaharuan kebangsaan dan terfasilitasinya Forum Pembauran Kebangsaan di daerah.

4. Program Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Tujuan dilaksanakan Program ini dalam rangka memfasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan dan idiologi di lingkungan generasi muda (santri/ santriwati) kabupaten/kota, sehingga dapat peningkatan penamtapan wawasan kebangsaan bela negara melaui PKBN di daerah.

5. Program Peningkatan Keamanan dan Keyamanan Lingkungan.

Secara umum program ini bertujuan untuk menciptakan kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah dengan kegiatan pembinaan dan pemantapan eksistensi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), agar terjadi hubungan harmonis antar unsur intelijen daerah, aparatur pemerintah dan masyarakat sehingga dapat terdeteksi dini, tangkal dini, cegah dini dan antisipasi dini sehingga dapat menciptakan situasi keamanan, ketertiban yang kondusif. Serta terlaksananya pemantauan dalam pelaksanaan pemilukada Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Tanjab Timur, Sarolangun, Bungo dan Kota Sungai Penuh.

6. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan tindak kriminal.

Dalam pelaksanaan Program ini ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya Pembinaan dan pemantauan orang asing, LSM Asing Non Government Organization (NGO) dan lembaga asing, untuk itu telah dilaksanakan Rakor dan Konsultasi dan koordinasi tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap pemantauan kegiatan orang asing, Tenaga Kerja Asing (TKA), NGO Asing, Peneliti kunjungan maupun lalulintas orang asing sehingga terdata dengan baik terutama di Kabupaten Tanjab Barat, Tanjab Timur Bungo, Kerinci Batanghari dan Merangin.

Pembinaan aparaturnya dan penanganan konflik dalam upaya peran serta masyarakat menjaga keutuhan berbangsa dan bernegara untuk itu telah dilaksanakannya koordinasi antar Kesbangpol, Linmas Kabupaten/Kota dan instansi terkait di daerah sehingga masyarakat dapat bekerjasama dalam menjaga kebersamaan kehidupan dalam masyarakat dalam melaksanakan pemantauan konflik dan situasi di Kabupaten Kerinci, Sarolangun, Tebo Tanjab Barat dan Bungo.

Sedangkan dalam Pembinaan dan pengembangan Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) dalam rangka menciptakan keharmonisan antar umat dengan harapan terbinanya dan terkembangannya FKUB yang berkelanjutan, untuk itu telah dilaksanakan Rapat internal wanhata dan pengurus FKUB, Rakorda FKUB se Provinsi dan dialog interaktif permasalahan FKUB dan pemecahannya.

7. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan.

Program ini dalam rangka Pembinaan dan Pemantapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat dan penanggulangan bencana (Permendagri No. 12 Tahun 2006) sehingga dapat deteksi dini, tangkal dini, antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bentrok, agar tercipta rasa aman dan tentram dilingkungan masyarakat. Memberikan sosialisasi terhadap pengurus FKDM Kab/Kota dalam rangka mengantisipasi , menjaga, keamanan , ketertiban masyarakat sebagai jejaring komunikasi terhadap pemerintah dalam mendeteksi timbulnya keamanan,

Hambatan dalam pelaksanaan Program ini kurangnya dukungan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mensukseskan FKDM tersebut, untuk itu diharapkan pemerintah setempat dapat mengalokasikan dan pendukung kegiatan sehingga dapat membentuk kepengurusan FKDM di setiap kecamatan.

2.2.1.18. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

2.2.1.18.1. Sekretariat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan urusan wajib yang menyangkut pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, maka pada tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp553.251.730.683,35 dengan tingkat realisasi sebesar 93,67% atau setara dengan Rp518.204.062.123,83. Dari total dana tersebut, tersebar pada 9 (sembilan) Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi, dengan uraian sebagai berikut:

A. Biro Umum

Pada tahun 2011, Biro Umum Setda. Provinsi Jambi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp56.140.369.500,00 dengan tingkat penyerapan sebesar Rp46.365.707.003,00 atau setara dengan 82,59% yang diarahkan untuk melaksanakan 4 (empat) program pembangunan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini, secara umum bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang terdiri dari 15 kegiatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp20.372.663.925,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp17.152.106.040,00 atau terealisasi sebesar 84,19%. Adapun output yang dihasilkan adalah terselenggaranya kegiatan administrasi perkantoran yang meliputi penyediaan surat, listrik, logistik, perlengkapan dan peralatan kantor.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan aparatur. Untuk mencapai tujuan tersebut, anggaran yang dialokasikan

adalah sebesar Rp32.758.670.575,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp27.446.984.856,00 atau 83,79%. Adapun output yang dihasilkan adalah tersedianya kendaraan dinas, perlengkapan rumah dinas jabatan, perlengkapan gedung kantor dan terpeliharanya gedung kantor, kendaraan dinas serta rumah dinas.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan disiplin aparatur di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Untuk mencapai tujuan tersebut, dialokasikan dana sebesar Rp505.700.000,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp493.805.000,00 atau 97,65%. Adapun output yang dihasilkan adalah tersedianya sarana dan prasarana peningkatan disiplin aparatur. Secara umum permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya kesadaran aparatur untuk bersikap disiplin dan mematuhi segala ketentuan yang berlaku. Untuk itu, sebagai upaya solusi pemecahan masalah tersebut, adalah dengan mengintensifkan Pengawasan Melekat dan melaksanakan peraturan tentang disiplin PNS secara proporsional.

4. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah.

Program ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kedinasan untuk Kepala daerah dan wakil kepala daerah sehingga memperlancar pelaksanaan pemerintahan. Untuk mencapai tujuan tersebut, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp2.503.335.000,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp1.272.811.107,00 atau 50,85%. Adapun output dari pelaksanaan program tersebut adalah terselenggaranya kegiatan kedinasan dan pemerintahan yang baik dan lancar.

B. Biro Ekonomi Pembangunan dan SDA

Pada tahun 2011, alokasi anggaran Biro Ekonomi Pembangunan dan Sumberdaya Alam sebesar Rp3.286.746.800,00 diarahkan untuk melaksanakan 6 (enam) program pembangunan sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan

Pada tahun 2011 dialokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp1.140.756.000,00 dengan tingkat realisasi mencapai Rp937.454.262,00 atau 82,18%. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Tersedianya data pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, sebagai bahan masukan pelaksanaan APBD yang akan datang.
- b. Terhimpunnya data pelaporan realisasi APBD Provinsi Jambi sebagai bahan evaluasi pelaksanaan APBD.
- c. Terlaksananya fasilitas administrasi pada Biro Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam.
- d. Terpantaunya perkembangan fisik pembangunan APBD Provinsi Jambi di lapangan.

2. Program Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan Ekonomi di Bidang Penanaman Modal, BUMD/BUMN dan Pendapatan Keuangan

Alokasi anggaran untuk program ini pada tahun 2011 berjumlah Rp148.600.000,00 dengan tingkat realisasi mencapai Rp148.320.000,00 atau 99,81%. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Terhimpunnya data hasil pelaksanaan pembangunan bidang Pendapatan dan Keuangan.
- b. Terhimpunnya data hasil pelaksanaan pembangunan bidang Penanaman Modal.
- c. Terhimpunnya data hasil pelaksanaan pembangunan bidang BUMD/ BUMN dan Kerjasama Secara umum,

3. Program Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan Ekonomi di bidang Koperindag

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembinaan dan fasilitas pembangunan di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2011 dialokasi anggaran untuk program ini Rp145.619.200,00 dengan tingkat realisasi mencapai Rp145.043.500,00 atau 99,60%. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Terhimpunnya data harga kebutuhan bahan pokok masyarakat
- b. Terhimpunnya laporan hasil pelaksanaan pembangunan bidang koperindag

4. Program Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan Ekonomi di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Alokasi anggaran untuk program ini pada tahun 2011 berjumlah Rp325.071.600,00 dengan tingkat realisasi mencapai Rp325.054.700,00 atau 99,99%. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Terhimpunnya data pelaporan hasil pelaksanaan fasilitas dan koordinasi pembangunan dan pengembangan bidang kebudayaan dan pariwisata.
- b. Laporan administrasi pembangunan Biro Ekbang dan SDA.
- c. Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Jambi dalam kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang bertaraf nasional (antara lain Pekan Raya Jakarta)

5. Program Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan di Bidang PU, Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran untuk program ini Rp410.200.000,00 dengan tingkat realisasi mencapai Rp407.514.000,00 atau 99,35%. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Terjalannya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang bina marga, pengairan, cipta karya, pemukiman dan bidang pekerjaan umum lainnya.
- b. meningkatkan pembinaan pengelolaan bidang kepelabuhan dan Terjalannya koordinasi pembangunan bidang perhubungan serta penyelenggara sektor jasa transportasi umum
- c. Terjalannya koordinasi lintas daerah Kabupaten/Kota dalam pengendalian pengelolaan lingkungan hidup dan terhimpunnya laporan pemantauan keadaan lingkungan hidup di Provinsi Jambi.

6. Program Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Alam

Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran untuk program ini Rp1.116.500.000,00 dengan tingkat realisasi mencapai Rp1.075.392.700,00 atau setara dengan 96,32%. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Keikutsertaan pada Kegiatan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Tahun 2011 dalam rangka mewujudkan petani mampu, maju dan mandiri serta mempunyai profesionalisme melalui karya dan keterampilan.
- b. Terhimpunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang kelautan, perikanan dan peternakan.
- c. Terhimpunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang sektor pertanian, ketahanan pangan dan penyuluhan
- d. Terpantaunya penyaluran pupuk bersubsidi
- e. Terhimpunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang ESDM, Kehutanan dan Perkebunan.
- f. Terfasilitasinya upaya penyelesaian konflik lahan perkebunan

C. Biro Hukum

Pada tahun 2011, Biro Hukum Setda Provinsi Jambi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.180.895.000,00 dengan realisasi

sebesar Rp2.157.901.400, atau 98,95% untuk melaksanakan 5 (lima) program pembangunan sebagai berikut :

1. Program Pembentukan Hukum

Program ini secara umum bertujuan untuk menyelenggarakan berbagai forum publik, dalam rangka penyusunan ranperda, diskusi dan konsultasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp245.193.000,00 dengan realisasi sebesar Rp233.793.000,00 atau 95,35%. Adapun output dari program ini adalah tersusunnya naskah Rancangan Peraturan Daerah.

Permasalahan dalam pelaksanaan program ini diantaranya: belum seluruh SKPD mengetahui prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Permendagri No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pada masa yang akan datang, perlu dilaksanakan sosialisasi tentang Permendagri tersebut.

2. Program Perencanaan Hukum

Secara umum program ini bertujuan untuk menciptakan produk-produk Hukum yang sesuai dan selaras dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp603.771.000, realisasi sebesar Rp597.926.050,00 atau 99,03%. Dari pelaksanaan program ini hasil yang diperoleh:

- a. Tersusunnya Peraturan/Keputusan/Instruksi Gubernur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Terinventarisir dan terevaluasinya peraturan daerah kab/kota, peraturan bupati/walikota sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Terciptanya koordinasi lintas instansi terkait dalam penyusunan penyempurnaan produk hokum dan korelasinya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Akses Publik Terhadap Informasi Hukum

Program ini bertujuan untuk mengimplementasikan metode pengembangan terhadap kesadaran Hukum dan HAM, produk-produk hukum melalui lembaran daerah dan berita daerah, dengan alokasi dana sebesar Rp1.116.836.000,00 yang terealisasi sebesar Rp1.112.977.350,00 atau 99,65%.

Output dari program ini adalah terselenggaranya lokakarya HAM dan tersosialisasinya produk-produk hukum kepada para stakeholders serta terhimpunnya produk hukum daerah, terselenggaranya Bimbingan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) di 3 (tiga) Kabupaten/Kota dan penyelesaian permasalahan dan keluhan hukum, tersedianya data dan informasi Peraturan Perundang-undangan dan terlaksananya urusan tata usaha dan program kerja biro.

4. Program Pengkajian Kasus HAM

Program ini bertujuan untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah pelanggaran HAM dengan alokasi anggaran sebesar Rp90.095.000,00 yang terealisasi sebesar Rp89.550.000 atau 99,40%.

Adapun output dari program ini adalah terinventarisasi dan telah terlaksananya pengkajian terhadap kasus pelanggaran HAM.

5. Program Pendataan dan Pembinaan PPNS

Program ini bertujuan untuk melaksanakan pendataan dan penyegaran bidang tugas PPNS. Untuk mencapai tujuan dari program ini, dialokasikan anggaran sebesar Rp125.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp123.655.000,00 atau 98,92%. Dari penyelenggaraan kegiatan untuk mendukung program ini, diperoleh output terlaksananya pendataan dan penyegaran tugas PPNS.

D. Biro Humas dan Protokol

Pada tahun 2011, Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jambi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp13.643.060.000,00 dengan tingkat penyerapan dana sebesar Rp13.229.141.225,00 atau 96,97% yang diarahkan untuk melaksanakan 4 (empat) program pembangunan sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pembinaan media lokal, sehingga output dari program ini adalah tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, dengan alokasi anggaran Rp1.347.839.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.323.773.100,00 atau 98,21%, adapun kegiatan utamanya adalah penyediaan bahan bacaan bagi pejabat eselon II dan III seluruh SKPD Pemerintah Provinsi Jambi dengan jumlah total sebanyak 47 media cetak dan belanja modal dalam rangka peningkatan kualitas kehumasan dan keprotokolan.

2. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

Secara umum tujuan dari program ini adalah terciptanya hubungan yang harmonis dan kerja sama yang baik antara Pemerintah Provinsi dengan Dinas Instansi baik ditingkat Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan Pemerintah Pusat dan dalam rangka mencapai kinerja yang optimal dari tugas keprotokolan. Untuk mencapai tujuan dari program ini, dialokasikan anggaran sebesar Rp1.277.754.000,00 dengan tingkat penyerapan sebesar Rp1.277.027.579,00 atau setara dengan 99,94%. Adapun output dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya kunjungan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah.

3. Program penghimpunan data dan penyebarluasan informasi pembangunan daerah Provinsi Jambi

Program ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi tentang pembangunan di Provinsi Jambi, melalui penyediaan sarana publikasi dan informasi masyarakat, untuk itu dialokasikan dengan sebesar Rp10.536.764.000,00 dengan tingkat realisasi Rp10.227.783.776,00 atau setara dengan 97,07%. Dari hasil pelaksanaan kegiatan ini, output yang dihasilkan berupa majalah, tabloid dan lain-lain serta sosialisasi penggunaan internet sebagai media publikasi pembangunan.

4. Program pengembangan pemetaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana teknologi informasi

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pelayanan telekomunikasi serta penerimaan, pengiriman dan penyampaian berita sandi dan berita biasa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp480.703.000,00 dengan tingkat realisasi Rp400.556.800,00 atau setara dengan 83,33%. Adapun kegiatannya berupa peningkatan sarana dan prasarana komunikasi. untuk tahun 2011 penerimaan berita mencapai 2.165 surat (4.075 lembar) dan pengiriman berita sebanyak 2.794 Surat (6.096 lembar).

E. Biro Pemerintahan

Pada tahun 2011, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi mendapat lokasi anggaran sebesar Rp5.852.834.500,00 dalam pelaksanaan telah terealisasi Rp2.338.079.506,00 atau 39.95% untuk melaksanakan 4 (empat) program pembangunan sebagai berikut:

1. Program Satu Milyar Satu Kecamatan (Samisake)

Salah satu kegiatan dalam Program SAMISAKE adalah Sertifikasi tanah gratis bagi rumah yang dibedah, dengan tujuan memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat kurang mampu, serta mendukung upaya pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di Provinsi

Jambi. Diperoleh output terbitnya sertifikat tanah gratis bagi masyarakat kurang mampu di provinsi Jambi.

Jumlah dana untuk kegiatan ini sebesar Rp3.176.000.000,00 yang diperuntukan bagi pensertifikatan tanah sebanyak 3.176 persil. Realisasi pelaksanaan sertifikat gratis adalah sebanyak 191 persil atau 6%, masih dalam proses di BPN 369 persil atau 11,6%.

Relatif rendahnya pelaksanaan sertifikasi ini antara lain disebabkan ada sebagian sudah mempunyai sertifikat, masalah kepemilikan. Permasalahan lain terkait dengan sertipikat gratis ini adalah tidak adanya pos biaya operasional langsung pengukuran ke lapangan.

2. Program Pengembangan Batas Wilayah

Program ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tata batas antar Provinsi Jambi dengan provinsi tetangga dan antar kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi. Untuk program ini dianggarkan dana sebesar Rp784.177.500 dengan serapan senilai Rp679.472.756 atau 86,65%.

Dari pelaksanaan program tersebut diperoleh output antara lain:

- a. Terwujudnya tertib administrasi di bidang Pembakuan Nama Rupa Bumi di wilayah NKRI khususnya di kab/kota se-Provinsi Jambi.
- b. Terlaksananya sosialisasi, konsultasi, koordinasi dan verifikasi batas antara Provinsi Jambi dengan Provinsi tetangga.
- c. Tercapainya kesepakatan kerjasama di wilayah perbatasan.

3. Program Pembinaan dan Fasilitas Pemerintahan dan Otda di Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Kesatuan Bangsa

Tujuan program ini adalah meningkatkan kemampuan dan kemandirian daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang berkualitas dan bertanggung jawab, menanamkan semangat kebangsaan, keamanan dan ketertiban untuk

mewujudkan iklim yang kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mendukung program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp1.310.604.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.170.503.450,00 atau 89.31%.

Dari pelaksanaan kegiatan ini diharapkan sebagai berikut :

- a. Terciptanya kondisi daerah yang tentram, tertib, teratur serta terciptanya stabilitas daerah untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- b. Meningkatnya pemahaman aparat penyelenggara administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- c. Meningkatnya optimalisasi dan sinkronisasi pengelolaan SIAK di Kab/kota sehingga diperoleh persamaan persepsi dalam meningkatkan pelayanan dibidang kependudukan.
- d. Terselenggaranya tertib administrasi pertanahan di provinsi Jambi.

4. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Dalam rangka mendukung peningkatan dan kelancaran tugas-tugas kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, untuk mewujudkan provinsi, kabupaten/kota yang mandiri melalui kerja sama antar unsur Forkopimda, pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah lainnya. Pada tahun 2011, untuk program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp519.833.000,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp299.996.300,00 atau sebesar 57,71%. Relatif rendahnya penyerapan anggaran tersebut dikarenakan pada Kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Forkopimda untuk pelaksanaan semester II tidak dapat dilaksanakan menggunakan dana APBD, oleh karena itu untuk kegiatan Rakor Forkopimda selanjutnya menggunakan dana dekonsentrasi (APBN). Dari pelaksanaan program tersebut diperoleh output yaitu terkoordinasi dan terkendalinya program/kegiatan lintas sektor serta kegiatan pusat dan daerah.

5. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Pada tahun 2011 program ini mendapat dana sebesar Rp62.220.000,00 dengan realisasi sebesar Rp45.107.000,00 atau 72,50%, yang dialokasikan untuk 1 (satu) kegiatan yaitu Rapat Koordinasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.

Output yang didapat dari kegiatan ini adalah terkoordinasikannya sistem kependudukan dan catatan sipil kabupaten/kota se-provinsi Jambi, dengan kelompok sasaran kegiatan adalah dinas/badan/kantor pengelola administrasi kependudukan dan catatan sipil.

F. Biro Kesejahteraan Masyarakat

Pada tahun 2011, Biro Kesejahteraan Masyarakat Setda Provinsi Jambi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp5.078.315.000,00 dengan tingkat penyerapan sebesar Rp4.896.233.888,00 atau setara dengan 96,41% yang diarahkan untuk melaksanakan 2 (dua) program pembangunan sebagai berikut :

1. Program pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang kehidupan umat beragama

Tujuan dan sasaran program pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang kehidupan umat beragama adalah terpelihara dan termanfaatnya rumah ibadah serta kenyamanan para jamaah dalam beribadah, terciptanya hubungan silaturahmi antar umat beragama dan antar umat seagama, terwujud dan terciptanya SDM yang islami dan berprestasi.

2. Program pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang sosial masyarakat

Tujuan dan sasaran Program pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan sosial di bidang sosial masyarakat adalah :

- Terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera

- Meningkatnya wawasan nasionalisme masyarakat sebagai warga NKRI,
- Tersusunnya program kegiatan bidang kesejahteraan rakyat yang berbasis kepada kebutuhan masyarakat

G. Biro Organisasi

Pada tahun 2011, Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi mendapat alokasi anggaran sebesar Rp2.203.000.000,00 dengan tingkat penyerapan sebesar Rp2.094.441.700 ,00 atau 95,07% yang diarahkan untuk melaksanakan 4 (empat) program pembangunan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini, secara umum bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi bidang kepegawaian di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Untuk mencapai tujuan tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp228.377.700,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp227.925.250,00 atau terealisasi sebesar 99,80%. Adapun output yang dihasilkan adalah terinventarisirnya data tentang PNS dilingkup Sekretaris Daerah baik tentang pengangkatan, kenaikan pangkat, jumlah pegawai yang mutasi, jumlah PNS yang pensiun dan yang diberhentikan. Secara umum permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan kinerja program adalah belum disusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Administrasi. Untuk itu, sebagai solusi kedepan diupayakan melalui penyusunan SOP pelayanan administrasi.

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Program ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kompetensi jabatan dan analisis jabatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp496.091.800,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp493.811.800,00 atau 99,54%. Adapun output yang dihasilkan adalah tersusunnya Peraturan Gubernur tentang instrumen analisis jabatan, jenis dan jumlah tenaga fungsional.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur lingkup Setda Provinsi Jambi. Untuk mencapai tujuan tersebut, anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp152.880.000, dengan tingkat realisasi sebesar Rp152.880.000,00 atau 100%. Adapun output dari pelaksanaan anggaran tersebut adalah terkirimnya PNS dilingkungan Setda Provinsi Jambi yang mengikuti diklat, kursus dan lain-lain.

4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi dan Hukum di Bidang Kesadaran Hukum, Kelembagaan dan Peraturan Daerah.

Untuk mendukung keberhasilan program ini dialokasikan anggaran dana sebesar Rp1.325.650.500,00 dan teralisasi sebesar Rp1.219.824.650,00 atau 92,02%. Adapun output dari pelaksanaan kegiatan pada program ini adalah :

- a. Tersusunnya LAKIP Tahun 2010, RKT Pemerintah Propinsi Jambi Tahun 2011 dan LAKIP Sekretariat Daerah Propinsi Jambi Tahun 2010
- b. Tersusunnya Peraturan Gubernur tentang Tata Naskah Dinas dan terlaksananya Sosialisasi Tata Naskah dinas yang diarahkan sebagai langkah strategis dalam upaya terciptanya pelayanan yang dihadapi aparatur pemerintahan yang prima, transparan dan akuntabel. Terlaksananya rapat koordinasi Perangkat Daerah Kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, workshop Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta sosialisasi kebijakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan penerapan tata pemerintahan yang baik.

H. Biro Ekonomi Pembangunan dan SDA

Pada tahun 2011, alokasi anggaran Biro Ekonomi Pembangunan dan Sumberdaya Alam sebesar Rp3.286.746.800,00 diarahkan untuk melaksanakan 6 (enam) program pembangunan sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan

Program ini bertujuan untuk memberikan pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan SKPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp1.140.756.000,00 dengan realisasi Rp937.454.262,00 atau 82,18%. Dari program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Tersedianya data pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, sebagai bahan masukan pelaksanaan APBD yang akan datang.
- b. Tertatanya administrasi pada Biro Ekonomi Pembangunan dan Sumber Daya Alam.
- c. Terpantaunya perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang di danai oleh APBD Provinsi Jambi.

2. Program Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan Ekonomi di Bidang Penanaman Modal, BUMD/BUMN dan Pendapatan Keuangan

Alokasi anggaran untuk program ini pada tahun 2011 berjumlah Rp148.600.000,00 dengan realisasi Rp148.320.000,00 atau 99,81%. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Terhimpunnya data Pendapatan dan Keuangan.
- b. Terhimpunnya data Penanaman Modal.
- c. Terhimpunnya data BUMD/BUMN dan Kerjasama Secara umum.

3. Program Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan Ekonomi dibidang KOPERINDAG

Pada tahun 2011 dialokasi anggaran untuk program ini Rp145.619.200,00 dengan realisasi sebesar Rp145.043.500,00 atau 99,60%. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Terhimpunnya data harga kebutuhan bahan pokok masyarakat
- b. Terhimpunnya laporan hasil pelaksanaan pembangunan bidang koperindag.

4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Ekonomi di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Alokasi anggaran untuk program ini pada tahun 2011 berjumlah Rp325.071.600,00 dengan tingkat realisasi mencapai Rp325.054.700,00 atau 99,99%. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Terhimpunnya data pelaporan hasil pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembangunan dan pengembangan bidang kebudayaan dan pariwisata.
- b. Laporan administrasi pembangunan Biro Ekbang dan SDA.
- c. Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Jambi dalam kegiatan di bidang kebudayaan dan pariwisata yang bertaraf nasional (antara lain Pekan Raya Jakarta)

5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan di Bidang PU, Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran untuk program ini Rp410.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp407.514.000,00 atau 99,35%. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Terjalinnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang bina marga, pengairan, cipta karya, pemukiman dan bidang pekerjaan umum lainnya.
- b. meningkatkan pembinaan pengelolaan pelabuhan dan terjalinnya koordinasi pembangunan bidang perhubungan serta penyelenggara sektor jasa transportasi umum.
- c. Terjalinnya koordinasi lintas daerah Kabupaten/Kota dalam pengendalian pengelolaan lingkungan hidup dan terhimpunnya laporan pemantauan keadaan lingkungan hidup di Provinsi Jambi.

6. Program Pembinaan dan Fasilitas Pembangunan Sumber Daya Alam

Pada tahun 2011 dialokasikan anggaran untuk program ini Rp1.116.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.075.392.700,00 atau 96,32%. Dari pelaksanaan program tersebut, diperoleh output sebagai berikut :

- a. Terkoordinirnya keikutsertaan Provinsi Jambi pada Kegiatan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Tahun 201, dalam rangka mewujudkan petani mampu, maju dan mandiri serta mempunyai profesionalisme melalui karya dan keterampilan.
- b. Tersedianya laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang kelautan, perikanan dan peternakan.
- c. Tersedianya laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang sektor pertanian, ketahanan pangan dan penyuluhan.
- d. Tertibnya penyaluran pupuk bersubsidi.
- e. Tersedianya laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang ESDM, Kehutanan dan Perkebunan.
- f. Terfasilitasinya upaya penyelesaian konflik lahan perkebunan.

I. Biro Aset

Biro Pengelolaan Asset dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan serta mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan membina penyelenggaraan kebijakan di bidang pengelolaan asset Pemerintah Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, pada tahun anggaran 2011 dialokasikan dana sebesar Rp13.521.769.450,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp13.012.524.149,00 atau setara dengan 96,23%.

Dari total anggaran yang ada pada Biro PAKD sebagaimana yang disajikan pada tabel di atas, Program SAMISAKE mendapat alokasi sebesar Rp5.685.500.000,00 atau setara dengan 42,05% dari total anggaran. Selanjutnya Program

Pengelolaan Kekayaan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.193.911.450 atau setara dengan 31,02%, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp2.663.001.750 atau setara dengan 19,69% dan Program Peningkatan Pengelolaan Asset dan Kekayaan Daerah sebesar Rp979.356.250 atau setara dengan 7,24%.

- A. Program SAMISAKE; dalam rangka penanganan masalah kebersihan khususnya masalah persampahan di Provinsi Jambi dan dalam upaya mendukung program pembangunan yang *pro environment*.
- B. Program Peningkatan Pengelolaan Asset dan Kekayaan Daerah; dalam rangka mencapai optimalisasi pengelolaan asset dan kekayaan daerah Pemerintah Provinsi Jambi.
- C. Program Pengelolaan Kekayaan Daerah; untuk mencapai efektivitas dan optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah, sehingga dapat didayagunakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2.2.1.18.2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD Provinsi Jambi diterapkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi tujuan, sasaran, visi dan misi, serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yaitu : Memberikan Pelayanan Administrasi kepada Anggota Dewan.

Gambaran umum mengenai bentuk program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam bidang administrasi Perkantoran. Untuk mencapai tujuan dari program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pada Tahun 2011 telah dialokasikan dana sebesar Rp6.989.295.440,00 yang meliputi kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air/Listrik,

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah, Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor, Penyediaan Bahan Bacaan dan Per-UU, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, Penyediaan Jasa Tenaga Penunjang Adm/Teknis. Melalui program/kegiatan Tahun Anggaran 2011 tersebut telah terealisasi dana sebesar Rp6.080.065.143,00 (86,99%).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta fasilitas kerja yang memadai sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif. Untuk mencapai tujuan dari program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Tahun 2011 telah dialokasikan dana sebesar Rp3.184.360.000,00 yang meliputi kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional, Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pengadaan Meubeuler, Pengadaan Komputer, Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas, Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Dinas, Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, dan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor. Melalui Program/Kegiatan TA 2011 tersebut telah terealisasi dana sebesar RP3.017.272.890,00 (94,75%).

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur bertujuan untuk meningkatkan disiplin Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. Untuk mencapai tujuan dari Program Peningkatan Disiplin Aparatur pada Tahun 2011 telah dialokasikan dana sebesar

Rp414.205.000,00 untuk Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya dan telah terealisasi sebesar Rp409.355.000,00 (98,83%).

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD Provinsi Jambi. Pada Tahun 2011 telah dialokasikan dana sebesar Rp154.000.000,00 dengan kegiatan Kursus, Pelatihan dan Bimbingan Teknis, dan telah terealisasi sebesar Rp120.750.000,00 (78,41%).

2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat dalam memfasilitasi kelancaran tugas-tugas DPRD sesuai Program dan Rencana Kinerja yang ditetapkan. Untuk mencapai tujuan program tersebut telah dianggarkan dana sebesar Rp15.421.747.160,00 dengan beberapa kegiatan yaitu: Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda, Rapat-rapat Paripurna DPRD, Reses, Kunker dan Peninjauan Lapangan, Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pembahasan Ranperda Inisiatif. Realisasi Program tersebut sebesar Rp14.232.654.836,00 (92,29%).

2.2.1.18.3. Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Menyadari peran penting Penelitian dan Pengembangan (Litbang) sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 5 dan UU no. 18 tahun 2003 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka Pemerintah Provinsi Jambi telah membentuk Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jambi ditetapkan dengan Perda No. 15 tahun 2008.

Tahun Anggaran 2011 Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Jambi memperoleh alokasi dana pembangunan melalui APBD Jambi sebesar Rp7.855.049.181 dan dana APBD Perubahan sebesar Rp300.000.000,00 yang tertuang dalam Program Penelitian dan Pengembangan.

2.2.1.18.4. Inspektorat Provinsi Jambi

Sejalan dengan visi Inspektorat Provinsi Jambi yaitu mewujudkan pemerintah daerah yang bersih, berwibawa, efisien, efektif melalui pengawasan yang profesional, maka pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran belanja langsung sebesar Rp6.346.136.000,00 dengan 6 program yaitu 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, 4) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, 5) Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, 6) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Selanjutnya dalam rangka mencapai misi dari Inspektorat Provinsi Jambi yaitu 1) Mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan yang efisien dan efektif, 2) Mendorong terwujudnya akuntabilitas publik oleh pemerintah daerah serta terciptanya aparatur yang bersih, 3) Meningkatkan kualitas hasil pengawasan dalam rangka pengambilan keputusan, 4) dan menumbuhkembangkan sinergi pengawasan di Provinsi Jambi, Inspektorat Provinsi Jambi telah dilaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dengan realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 sebesar Rp5.808.139.024,00 atau 91,53%.

Secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.25 Capaian Program Inspektorat Tahun 2011

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.635.144.900	1.491.580.424	91,22
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	420.444.100	414.392.700	98,56
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	28.500.000	28.500.000	100
4.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	3.691.908.000	3.598.484.000	97,47
5.	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	253.469.000	76.291.000	30,1
6.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	316.670.000	199.590.500	63,03
Jumlah		6.346.136.000	5.808.838.624	91,53

Dari data tersebut terdapat 2 (dua) program yang realisasinya belum maksimal yaitu Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu 1) Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 2) Kegiatan pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja. Guna pencapaian target dari program tersebut, Inspektorat Provinsi Jambi dalam hal peningkatan kualitas tenaga pemeriksa dan aparatur bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Kementerian Teknis lainnya. Peningkatan kualitas tenaga pemeriksa dan aparatur Inspektorat Provinsi Jambi sebagian besar telah terpenuhi dengan adanya pelatihan dan bimbingan teknis atas kerjasama tersebut, sehingga terjadi efisiensi dari program ini hingga 69.90%. Begitupula dengan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dengan realisasi anggaran sebesar 63,03%, hal inipun berdampak positif dengan adanya kerjasama dengan BPKP Provinsi Jambi, Itjen Kemendagri, Itjen Kementerian Teknis, dan Provinsi Lainnya dalam rangka penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

Kegiatan utama Inspektorat Provinsi Jambi berupa pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan tujuan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan daerah, disiplin aparatur dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan serta mendeteksi secara dini terhadap kecurangan pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan tersebut termasuk dalam program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dan pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.916.870.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.910.910.000,00 atau 99,69%. Pelaksanaan kegiatan ini berupa pemeriksaan/pembinaan terhadap 94 Objek Pemeriksaan (Obrik) dengan 94 penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau 94,69% dari target yang telah rencanakan sebelumnya.

Tindaklanjut hasil pemeriksaan sebagaimana rekomendasi yang diberikan oleh Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus diupayakan penyelesaiannya. Dari 561 temuan dengan 1.092 rekomendasi, Inspektorat Provinsi Jambi sampai dengan tahun 2011, telah ditindaklanjuti sebesar 60% dengan katagori selesai dan 40% katagori dalam proses. Jumlah kerugian negara telah ditarik sebesar Rp555.208.614,25 atau 51,26% dari seharusnya Rp1.083.036.476,17 selebihnya dalam katagori dalam proses yang meruapkan hasil pemeriksaan yang baru dilaksanakan pada tahun 2011.

Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap Pemerintah Provinsi Jambi sampai dengan tahun 2011 sebanyak 243 temuan dengan 334 rekomendasi. Atas rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti sebanyak 235 rekomendasi atau 70,39% sedangkan 99 rekomendasi atau 29,64% lainnya masih dalam proses. Selanjutnya hasil pemeriksaan BPK-RI periode 2009-2011 sebanyak 227 temuan dengan 600 rekomendasi, dari sejumlah rekomendasi tersebut Inspektorat

Provinsi Jambi telah melakukan percepatan terhadap tindak lanjut pada beberapa SKPD Provinsi Jambi dengan hasil selesai tindak lanjut sejumlah 368 rekomendasi atau 61,33% dan sisanya sejumlah 232 rekomendasi atau 38,67% pada katagori dalam proses, sisa rekomendasi tersebut merupakan hasil pemeriksaan yang baru selesai dilaksanakan pada tahun 2011.

Pelimpahan penyelesaian atas pengaduan masyarakat dari Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi Jambi cq. Inspektorat Provinsi Jambi dalam klasifikasi penyalahgunaan wewenang sebanyak 13 surat atau 30,95%, Kepegawaian/Ketenagakerjaan 13 pengaduan atau 30,95%, pertanahan/ perumahan sebanyak 4 surat atau 9,52%, Umum sebanyak 4 surat atau 9,52%, Korupsi/Pungutan liar sebanyak 3 surat atau 7,14%, Hukum Peradilan sebanyak 2 surat atau 4,76%, Pelayanan masyarakat sebanyak 1 surat atau 2,38% Tata Laksana Pemerintahan sebanyak 1 surat atau 2,38% Lingkungan hidup sebanyak 1 surat atau 2,38%. Sedangkan tujuan surat pengaduan masyarakat paling banyak ditujukan langsung kepada Gubernur Jambi yaitu sebanyak 15 surat atau 35,71%, Lembaga lain sebanyak 15 surat atau 35,71%, dan kepada Inspektorat Provinsi sebanyak 8 surat atau 19,05% dan Bupati/Walikota sebanyak 4 surat atau 9,52%.

Dari data tersebut Inspektorat Provinsi Jambi telah menindaklanjuti atas surat pengaduan tersebut berupa pemeriksaan, klarifikasi dan penegasan terhadap surat pengaduan dengan hasil; 10 surat pengaduan dilakukan pemeriksaan, 23 surat dilakukan klarifikasi, dan 1 surat belum ditindaklanjuti dan 8 surat tidak ditindaklanjuti.

2.2.1.18.5. Kantor Perwakilan

Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta mempunyai tugas pokok, menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga Provinsi (desentralisasi) dalam bidang penghubung yang menjadi kewenangan serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh

Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tugas perbantuan (desentralisasi) yang diberikan oleh Pemerintah Kepada Gubernur. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta mempunyai fungsi 1) Perumusan kebijakan, pengaturan perencanaan dan penetapan standar/pedoman, 2) Penghubung antara Pemerintah Daerah dengan Departemen, Lembaga Pemerintahan Non Departemen dan Swasta di Jakarta, 3) Pelayanan terhadap kepentingan Pemerintah daerah di Jakarta dan Daerah lainnya, 4) Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Daerah yang ada di Jakarta serta Daerah lainnya, 5) Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah di Jakarta, 6) Penghubung Pemerintah Kabupaten/Kota serta Legislatif dengan Lembaga Departemen 7) Pengelolaan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah, 8) Pengelolaan ketatausahaan dan 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Guna mewujudkan visi tersebut, maka Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta mempunyai misi yaitu 1) Melayani dan melakukan koordinasi untuk meningkatkan kualitas kerjasama Pemerintah Jambi dengan lembaga-lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah sehingga mempercepat jalannya Administrasi Pemerintah dan Pembangunan, 2) Mengoptimalkan kualitas pelayanan sarana prasarana dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan tugas, 3) Melaksanakan promosi pembangunan dalam rangka mengembangkan potensi daerah untuk meningkatkan investasi serta berperan aktif dalam upaya Pembinaan masyarakat Daerah Jambi sebagai asset dalam Pembangunan Daerah.

Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jambi sebagai “Show Window” dan pilar utama dalam pengembangan Potensi Daerah Provinsi Jambi yang dilaksanakan dalam peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah. Kegiatan tersebut masuk dalam

Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp952.051.000,00 dan terealisasi sebesar Rp919.093.438,00 atau 96,54%. Pelaksanaan kegiatan ini berupa kegiatan Fasilitas/Pembentukan kerjasama antar Daerah dalam penyediaan pelayanan publik mencapai 63,16% dan kegiatan Peningkatan seni Budaya Daerah Promosi dan Informasi mencapai 99,30%. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2011, dapat dilihat dari realisasi kontribusi, retribusi sewa mess Jambi yang meningkat sebesar Rp2.461.700.000,00 atau 29,39% dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp1.913.425.000,00 dengan peningkatan target sebesar 12,8%.

Secara keseluruhan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan dari sisi penyerapan keuangan sebesar 88.22% Dari data tersebut terdapat 1 (satu) program yang realisasinya belum maksimal yaitu program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah. Hal ini dikarenakan Kantor Perwakilan Pemprov Jambi telah bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan daerah serta Kantor Perwakilan yang ada diseluruh Indonesia guna peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, sehingga terjadi penghematan anggaran.

2.2.1.18.6. SEKRETARIAT KORPRI

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi adalah suatu wadah aktualisasi bagi anggota Korpri, keberlangsungan, dan kesinambungan pemerintahan sangat bergantung pada profesionalisme para anggota Korpri dalam menjalankan rencana, program dan kebijakan pemerintah. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sekretariat kopri tertuang dalam beberapa program prioritas yaitu :

- a) Program Pembinaan dan fasilitasi organisasi dan hukum di bidang kesadaran hukum, kelembagaan, peraturan daerah dilaksanakan kegiatan pembentukan Lembaga Konsultasi

Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI yang bertujuan melakukan pembinaan serta memfasilitasi pemasalahan organisasi dan hukum di Bidang Kesadaran Hukum dan Kelembagaan, dengan terbentuknya Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI Provinsi Jambi dapat menciptakan rasa aman bagi anggota KORPRI dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan.

- b) Program Kerjasama peningkatan olahragawan anggota KORPRI yang berbakat dan berprestasi. Untuk mencapai sasaran program peningkatan olahragawan anggota KORPRI dilaksanakan kegiatan MUSPROV BAPOR KORPRI dan kegiatan Pekan Olah Raga KOPRI Provinsi Jambi yang bertujuan untuk Meningkatkan kerjasama, solidaritas, kekompakan dan sportifitas antara sesama anggota KORPRI.

2.2.1.19. KEPEGAWAIAN

2.2.1.19.1. Badan Kepegawaian Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi, BKD adalah Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian. Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana di atas, BKD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis bidang kepegawaian ;epe
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian ;
- c. Pelayanan penunjang penyelengggaraan Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang telah ditetapkan;

- e. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengurusan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Daerah lainnya;
- g. Pembinaan di bidang kepegawaian terhadap seluruh Perangkat Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) sekaligus mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas maka pada tahun 2011 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi melaksanakan program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tujuan Program ini adalah memberikan dan menyediakan dukungan dan fasilitas yang memadai dan cukup untuk pelaksanaan tugas BKD Provinsi Jambi. Sasaran program adalah terlaksananya tugas pokok dan fungsi BKD Provinsi Jambi dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi Kepegawaian Provinsi Jambi dengan dukungan dan sebesar Rp598.534.675,00 dan telah terealisasi sebesar 82,11%,

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Tujuan program ini adalah meningkatkan daya dukung pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepegawaian BKD Provinsi Jambi dengan total anggaran sebesar Rp717.504.000,00 dan telah terealisasi sebesar 89,14%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Sasaran program peningkatan disiplin aparatur adalah terwujudnya sosok PNS yang taat dan patuh pada aturan dan tata tertib yang berlaku serta tersosialisasikannya Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana diharapkan setiap PNS mengerti akan kewajiban

dan haknya. Berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006, kedisiplinan ini akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pembinaan dan pengembangan disiplin PNS pada Pemerintah Provinsi Jambi. Adapun realisasi pelaksanaan program ini adalah sebesar 94,58% dan secara umum tidak ditemukan permasalahan dalam pelaksanaannya.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan kompetensi SDM aparatur yang profesional dan terampil guna mewujudkan pedoman kerja bagi seluruh aparatur. dalam pelaksanaannya program ini telah terealisasi sebesar 78,80%.

5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

Dana yang telah dianggarkan untuk pelaksanaan program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur adalah sebesar Rp2.741.415.600,00 dan telah terealisasi sebesar 92,52%.

2.2.1.19.2. Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah

1. Program Diklat Manajemen Pemerintahan

Program Diklat Manajemen Pemerintahan ditujukan untuk mendukung kapasitas dan kemampuan aparatur di dalam mengemban tugas penyelenggaraan pemberian pelayanan kepada masyarakat, penegak disiplin dan Akuntabilitas kinerja, dengan didukung kegiatan Diklat Manajemen Tata Pemerintah, Anggaran yang disediakan untuk program ini adalah sebesar Rp466.435.240,00 dengan realisasi sebesar Rp419.046.910,00 . Dengan terlaksananya program ini, dapat melatih peserta sehingga meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur di dalam mengemban tugas penyelenggaraan pemberian pelayanan kepada masyarakat, penegak disiplin dan Akuntabilitas kinerja.

1. Program Diklat Fungsional

Program ini bertujuan untuk mendukung kapasitas maupun kemampuan teknis para pejabat fungsional Diklat fungsional. Anggaran yang disediakan untuk program ini adalah sebesar Rp243.406.670,00 dengan realisasi sebesar Rp187.622.980,00. Dengan terlaksananya program ini dapat meningkatkan kapasitas maupun kemampuan teknis para pejabat fungsional Diklat fungsional. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini, secara umum tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam program ini.

2. Program Diklat Teknis

Untuk mencapai sasaran Program Diklat Teknis didukung oleh kegiatan, Diklat teknis Bendahara Keuangan Daerah pada SKPD, Diklat Teknis Pengelolaan barang Daerah. Dengan terlaksananya program ini, dapat meningkatkan kapasitas maupun kemampuan aparatur dalam penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan barang daerah.

Anggaran yang disediakan untuk program ini adalah sebesar Rp44.765.000,00 dengan realisasi sebesar Rp44.765.000,00.

3. Program Diklat Struktural

Tujuan dari program Diklat Struktural adalah untuk memperkuat kelembagaan dan kapasitas aparatur para pejabat struktural dan mengemban tugas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, dengan didukung kegiatan, Diklat Pim Tk IV, Diklat Pim Tk III, Diklat Prajabatan Gol I dan II , Diklat Prajabatan Gol III,. Anggaran yang disediakan untuk program ini adalah sebesar Rp813.848.000,00 dengan realisasi sebesar Rp797.024.350,00

Dengan terlaksananya program ini, dapat meningkatkan perkuatan kelembagaan dan kapasitas aparatur pejabat struktural dan mengemban tugas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

2.2.1.20 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.2.1.20.1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi dalam pelaksanaan sehari-harinya dibantu oleh Sekretariat KPID Provinsi Jambi, dimana Sekretariat KPID Provinsi Jambi ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 09 Tahun 2009, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi dan mempunyai fungsi menjembatani dan memfasilitasi tugas dan fungsi komisioner dengan tugas fungsi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Perencanaan Strategis KPID Provinsi Jambi sangat tergantung dari komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan kebijakan sistem penyiaran daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2003 tentang Penyiaran. Kebijakan Pemerintah Daerah diharapkan dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. terutama menyangkut kebijakan anggaran untuk penyelenggaraan sistem penyiaran daerah yang dituangkan dalam kebijakan APBD Provinsi Jambi kedepan.

Beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi faktor kunci keberhasilan antara lain menyangkut komitmen, kebersamaan, sinergitas, integritas dan profesionalisme, semua elemen yang terlibat dalam mengupayakan pencapaian cita-cita sistem penyiaran daerah di Jambi seperti dinyatakan dalam Visi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi.

Visi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jambi dirumuskan sebagai berikut : “Terwujudnya Sistem Penyiaran yang Berkeadilan, Bermartabat dan Bermanfaat guna Mendukung Jambi yang Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera 2015”

Misi dari KPID Provinsi Jambi dirumuskan sebagai berikut :

1. Membangun dan memelihara tatanan informasi di Provinsi Jambi yang adil,merata, dan seimbang;

2. Membantu mewujudkan infrastruktur bidang penyiaran di daerah yang tertib, teratur dan memiliki kepastian hukum;
3. Membangun iklim persaingan usaha di bidang penyiaran yang sehat dan bermartabat;
4. Mewujudkan program siaran yang berkualitas untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan bangsa, persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai dan budaya;
5. Mewujudkan profesionalisme di bidang penyiaran melalui pengembangan SDM;

Dalam mengimplementasikan perencanaan KPID Provinsi Jambi sangat tergantung dalam penyelenggaraan kebijakan sistem penyiaran daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Kebijakan Pemerintah Daerah diharapkan dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan, terutama menyangkut kebijakan daerah yang dituangkan dalam kebijakan sistem penyiaran daerah yang dituangkan dalam kebijakan selama tahun 2011.

Selama tahun 2011 Program yang telah dilaksanakan KPID meliputi dari:

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur.

Pelaksanaan program ini bertujuan untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan lingkungan kerja dan kebutuhan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari di Sekretariat KPID, berupa pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor, pengadaan kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit dan 3 unit roda 2 serta pemeliharaan rutin kendaraan dinas.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

Secara umum pelaksanaan Program ini dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Tenaga Sumber Daya Manusia yang profesional bagi tenaga Sekretariat KPID dengan

mengikuti pelatihan teknis pengolahan aset dan Program Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

3. Program Peningkatan Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

Secara umum pelaksanaan Program ini dalam rangka pelaksanaan menunjang pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi KPD antara lain:

1. Dilaksanakannya seleksi dan penetapan Anggota KPID sebanyak 7 orang sesuai dengan SK. Gubernur Jambi Nomor 78 Tahun 2011 tanggal 6 Juni 2011.
2. Pelaksanaan Bintel dan sosialisasi Literasi Media yang diikuti Generasi Muda kalangan pelajar SLTP dan SLTA, Evaluasi Dengar Pendapat dari kalangan masyarakat, media masa dan penyiar serta Games Pedes dalam rangka pencanangan nonton sehat yang diikuti kalangan pelajar.

2.2.1.20.2. Kantor Pengolahan Data Elektronik

Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Jambi merupakan salah satu Instansi Teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga – lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah tersebut bahwa Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Jambi mempunyai tugas pokok menyusun data dan informasi secara sistematis, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Gubernur dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi secara cepat, tepat dan akurat untuk menunjang proses pengambilan keputusan yang berdaya guna dan berhasil guna. Untuk mendukung peningkatan kualitas dan kinerja dari Kantor PDE dilaksanakan beberapa program kegiatan penunjang yaitu :

Program Pengembangan Komunikasi dan Media Masa

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa bertujuan memberikan pembinaan kepada setiap SKPD untuk lebih memahami tentang sistem informasi yang telah disediakan oleh KPDE sehingga sistem informasi dapat termanfaatkan secara maksimal.

Terselenggaranya program ini tidak terlepas dari dukungan sarana dan prasarana peralatan yang ada dan kerja sama antar instansi terkait, guna pemanfaatan Aplikasi yang telah dibangun semaksimal mungkin sehingga dapat membantu SKPD dalam mengabilan keputusan yang tepat sasaran.

2.2.1.21. KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Dalam rangka mewujudkan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi sebagai yang terdepan dalam penyajian informasi iptek dan kebudayaan serta sebagai lembaga yang profesional dan proporsional dalam tatanan Pemerintah daerah dibidang Perpustakaan dan kearsipan, maka target-target kinerja yang harus dicapai dalam mewujudkan keinginan tersebut adalah; Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kearsipan dengan standar minimal operasional; Tercapainya peningkatan ketatalaksanaan metoda pengelolaan, penataan dan layanan kearsipan. Terwujudnya pemberdayaan unit kearsipan yang mampu mengelola arsip menjadi sumber informasi lengkap, cepat dan tepat dalam penemuan kembali. Terciptanya arsiparis, tenaga pengelola arsip yang terampil dan profesional melalui pembinaan dan pelatihan perpustakaan dan kearsipan.

Untuk mewujudkan itu, terdapat 3 (tiga) program dengan pencapaian sebagai berikut :

1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Untuk mencapai Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, didukung oleh kegiatan; pendataan dan penataan serta akuisisi dan penelusuran arsip. Dengan terlaksananya

program ini, terwujudnya pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah dan terlaksananya penelusuran arsip.

2. Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

Untuk mencapai program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, didukung oleh kegiatan Produk perundang-undangan kearsipan dan citra Jambi dalam arsip serta peningkatan kerjasama. Dengan terlaksananya program ini, tersosialisasinya JRA kepegawaian dan citra Jambi dalam arsip serta meningkatkan kerjasama kearsipan dengan Provinsi tetangga seperti Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau dengan Jambi.

3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan

Untuk mencapai program peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan, didukung oleh kegiatan melaksanakan diklat penjenjangan arsiparis. Dengan terlaksananya program ini, terwujudnya pelaksanaan apresiasi kearsipan bagi pejabat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4.1.21.2. Perpustakaan

Peran Perpustakaan dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk bersaing perlu meningkatkan kualitas pustakawan dan layanan perpustakaan sehingga dapat mendorong masyarakat yang belajar menuju masyarakat madani yang sadar informasi yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan serta pembangunan yang berwawasan budaya dan lingkungan serta meletakkan landasan pembentukan watak kepribadian, pengamalan nilai-nilai budaya dan pola kebangsaan melalui pemberdayaan informasi serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mendukung peningkatan kualitas perpustakaan, terdapat 2 (dua) program dan 14 (empat belas) kegiatan dengan pencapaian sebagai berikut:

1. Program Pendidikan Menengah

Tujuan program ini adalah terwujudnya pemeliharaan bahan Perpustakaan dan pelestarian bahan Perpustakaan untuk Menurunkan tingkat kerusakan bahan perpustakaan, dengan didukung kegiatan Fumigasi (pengasapan) terhadap buku-buku perpustakaan dan perbaikan buku-buku perpustakaan.

Dengan terlaksananya program ini, terwujudnya pemeliharaan bahan Perpustakaan dan pelestarian bahan Perpustakaan serta Menurunnya tingkat kerusakan bahan perpustakaan

2. Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Tujuan program ini meningkatkan koleksi dan pelayanan perpustakaan untuk meningkatkan minat dan budaya baca, dengan didukung kegiatan Layanan perpustakaan umum, Layanan perpustakaan keliling, identifikasi koleksi, Pameran buku, Penerbitan literature sekunder perpustakaan, pengolahan bahan pustaka, penjilidan surat kabar dan majalah deposit, pengadaan bahan pustaka, Monitoring/pemantauan perpustakaan umum se Provinsi Jambi, Bimbingan minat baca dan Bintek tenaga pengelola masyarakat perpustakaan.

Dengan terlaksananya program ini, meningkatnya jumlah pengunjung serta terwujudnya perpustakaan keliling dan sirkulasi layanan bahan Perpustakaan sehingga terwujudnya pelayanan kepada Pemustaka. Meningkatnya budaya baca dikalangan masyarakat sehingg tercapainya tujuan dan sasaran gerakan masyarakat gemar membaca. Terlaksananya pengembangan koleksi deposit serta koordinasi sehingga terwujudnya jumlah koleksi deposit dan pendayagunaan. Terlaksananya seleksi Buku Perpustakaan; Jumlah Bahan Perpustakaan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan dan penerbitan litelatur sekunder sehingga tersedianya Koleksi Bahan Perpustakaan yang variatif. Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat tentang informasi Perpustakaan sehingga terwujudnya masyarakat gemar membaca.

2.2.1.22. KETAHANAN PANGAN

Program dan Kegiatan Badan Ketahanan Pangan selama Tahun 2011, dibiayai melalui 3 (tiga) sumber dana, yaitu ; APBD Provinsi Jambi, Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan (TP) dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Program yang dibiayai oleh APBD 1(satu) program yakni :

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program peningkatan ketahanan pangan terdiri dari 4 (empat) aspek : yakni aspek distribusi pangan, konsumsi, ketersediaan dan keamanan pangan. Berdasarkan aspek distribusi pangan utama terutama komoditi beras dimana hasil pemantauan harga stabil, fluktuasi harga kurang dari 25%. Hal ini karena adanya kegiatan penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat di sentra produksi. Berdasarkan aspek konsumsi pangan. Rata-rata konsumsi energi rumah tangga di Provinsi Jambi sudah mencukupi standar yang dianjurkan yaitu mencapai 2.062 kkal/kap/hr. Secara keseluruhan, rata-rata jumlah konsumsi energi rumah tangga di Provinsi Jambi sudah terpenuhi dan melebihi dari target PPH (2.000 kkal/kap/hr). Sedangkan dari aspek ketersediaan pangan, berdasarkan Neraca Bahan Makanan Provinsi Jambi Tahun 2011 dapat disimpulkan bahwa : 1). Ketersediaan energi dari bahan pangan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk provinsi Jambi sebesar Rp3.274 kkal/kap/hr. Angka tersebut telah melebihi AKG (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi 2008) sebesar 2.200 kkal/kap/hr. 2). Komposisi ketersediaan energi tersebut masih belum berimbang. Energi yang bersumber dari pangan hewani masih kurang dan baru mencapai 153 kkal/kap/hr, 57,95% dari AKG sebesar 254 kkal/kap/hr.

Sedangkan untuk kelompok pangan lainnya sudah melebihi ketersediaan ideal, untuk padi-padian mencapai 143,55%, umbi-umbian 134%, minyak dan lemak 363,64%, buah biji berminyak 274,24% , kacang-kacangan 103,63%, gula 123,64% serta sayur dan

buah 101,51%. Dari data ketersediaan energi tersebut dapat diketahui bahwa skor Pola Pangan Harapan (PPH) ditingkat ketersediaan, pada tahun 2011 sebesar 89,8.

Aspek keamanan pangan di Provinsi Jambi memperlihatkan bahwa terdapat penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) berdasarkan hasil analisa dan pengujian secara laboratories yang dilakukan bekerjasama dengan Balai POM Jambi terhadap 59 sampel makanan jajanan anak sekolah hasil sampling dari 6 Kabupaten dan 1 Kota terdapat pelanggaran dalam penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) pada sampel hasil sampling yang dilarang seperti zat pewarna Rhodamin B, Boraks dan Siklamat.

2.2.1.23 Penyuluhan Pertanian

Urusan wajib penyuluhan pertanian dilaksanakan melalui SKPD Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi Jambi. Untuk mencapai berbagai sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, maka telah dilaksanakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kegiatan antara lain; Pemberdayaan kelembagaan tani; pengembangan informasi dan teknologi penyuluh; penyusunan data base statistik kelembagaan penyuluh wilayah; monitoring dan evaluasi penyuluhan; koordinasi perencanaan dan perumusan program penyuluhan; Pemberdayaan kelembagaan tani; pekan daerah; pembinaan dan pelatihan SDM penyuluh dan petani.

Dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, didapat output dan hasil dari kegiatan antara lain;

1. Terlaksananya pembinaan lembaga penyuluhan Kabupaten/Kota dalam penyusunan program dengan hasil terciptanya keterpaduan dan sinergi program penyuluhan pada setiap tingkatan.
2. Tercetaknya Banner informasi teknologi penyuluhan pertanian dengan hasil terjadinya peningkatan pengetahuan masyarakat/ petani dan kelompok tani.

3. Tersusunnya data base statistik kelembagaan penyuluh dengan hasil tersedianya data base statistik kelembagaan penyuluh.
4. Terlaksananya Pekan Daerah Pertanian dan Perikanan Provinsi Jambi untuk persiapan mengikuti Pekan Nasional Pertanian dan Perikanan ke 13 tahun 2011 di Kabupaten Tenggara. Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut, bahwa Provinsi Jambi dapat mengikuti berbagai even yang diperlombakan pada PENAS dan adanya peningkatan wawasan serta pengetahuan petani.
5. Teridentifikasinya perkembangan kelembagaan penyuluh di Provinsi Jambi, dengan hasil kegiatan adanya solusi dalam pemecahan berbagai permasalahan pengembangan kelembagaan penyuluh.

Akumulasi dari pelaksanaan kegiatan tersebut, dapat dicapai indikator program pembangunan penyuluhan yaitu :

1. Peningkatan jumlah balai penyuluh dan posluh di Provinsi Jambi sebagaimana terlihat pada tabel berikut;

Tabel 2.26 Data Balai penyuluhan, Penyuluh dan posluh yang ada di Provinsi Jambi Tahun 2011

No	Kab/Kota	Kec	Desa/ Kel	BPP	Penyuluh	Posluh
1	Jambi	8	62	8	48	4
2	Ma. Jambi	11	152	8	119	-
3	Batanghari	8	113	8	101	62
4	Tebo	12	105	12	106	-
5	Bungo	17	144	13	184	131
6	Sarolangun	10	141	10	165	29
7	Merangin	24	203	15	222	120
8	Tanjab Timur	11	93	11	96	-
9	Tanjab Barat	13	71	13	72	-
10	Kerinci	12	209	12	225	75
11	Sungai Penuh	5	69	5	56	-
12	Provinsi	-	-	-	21	
Jumlah		131	1,362	115	1415	421

Data Dari Hasil Evaluasi Program Kegiatan Penyuluhan Set. Bakorluh 2011

2. Peningkatan jumlah kelembagaan tani di Provinsi Jambi.

a) Kelompok Tani

Kelembagaan tani mengalami peningkatan dari 14 persen pada tahun 2005 menjadi 17 persen di tahun 2011 atau terjadi peningkatan setiap tahunnya lebih kurang 20%.

Perkembangan kelanjutan dari kelembagaan tani terutama pada tingkat kemampuan kelompok tani disetiap tingkatan , untuk tingkat BDK ; 20%, Pemula; 45%, Lanjut; 28%, Madya; 7%, Utama% hal ini tingkat kemampuan kelompok tani di nominasi oleh Pemula dan lanjut.

Tabel 2.27 Data kelompok tani Kab/Kota se provinsi Jambi Tahun 2011

No	Kab/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa	Jumlah Poktan	Jumlah Anggota	Tingkat Kemampuan				
						BDK	P	L	M	U
1	Batang Hari	8	113	714	19.930	109	375	220	26	1
2	Sarolangun	10	141	616	16.014	-	250	336	30	-
3	Bungo	17	144	725	18.491	222	349	140	12	2
4	Tanjab Barat	13	70	813	22.064	164	423	203	23	-
5	Kota Sei. Penuh	5	68	448	9.485	175	184	80	9	-
6	Kerinci	12	209	1.311	31.356	430	505	322	52	2
7	Tebo	12	105	503	21.225	-	73	106	21	1
8	Kota Jambi	8	62	125	2.687	2	35	55	31	2
9	Tanjab Timur	11	93	1.110	19.895	203	282	185	119	19
10	Merangin	24	203	1.113	35.968	132	389	436	149	18
11	Muara Jambi	8	152	1.035	16.512	-	678	315	42	-
JUMLAH		128	1.361	8.377	213.627	1.561	3.297	2.099	495	48

b) Gapoktan

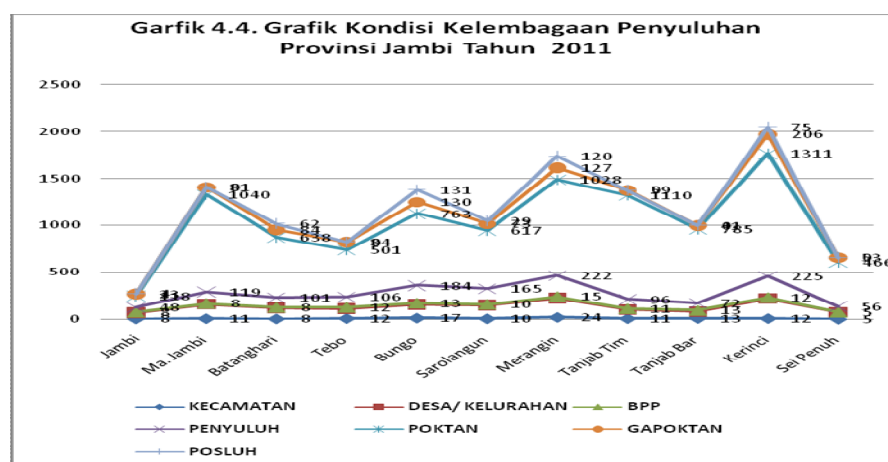
Kondisi Gapoktan sampai tahun 2011, untuk Gapoktan Puap berjumlah 652 gapoktan dan selebihnya gapoktan LDPM-Luep, Lumbung Pangan dan mandiri pangan, yang telah mencapai satu Gapoktan satu desa sehingga masih kurang 260 Gapoktan.

Tabel 2.27 Kondisi Gapoktan Provinsi Jambi 2011

NO	Kab/Kota	Kec	Desa/ Kel	Poktan	Gapoktan
1	Jambi	8	62	125	24
2	Ma. Jambi	11	151	1.035	143
3	Batanghari	8	113	714	108
4	Tebo	12	106	503	103
5	Bungo	17	146	725	107
6	Sarolangun	10	141	616	131
7	Merangin	24	203	1	149
8	Tanjab Tim	11	93	1	93
9	Tanjab Bar	13	70	813	70
10	Kerinci	12	209	2	122
11	Sei Penuh	5	69	448	53
Jumlah		131	1.363	4.983	1.103

c) Kelembagaan Penyuluhan

Gambar 4.16 Grafik Kondisi Kelembagaan Penyuluhan Provinsi Jambi Tahun 2011



d) Kelembagaan tani

Jumlah kelembagaan tani (kelompok tani) di Provinsi Jambi sebanyak 8.377 Kelompok tersebar di 1.362 Desa/ kelurahan 131 desa kecamatan dan 11 Kabupaten /kota. Dari jumlah kelompok tani tersebut yang terbanyak Kabupaten Kerinci sebanyak 1.137 Kelompok ,Kabupaten Merangin 1.060 kelompok, Kabupaten Kabupaten Tanjab Timur 796 Kelompok, Tanjab Barat 785 Kelompok.

2.2.2 URUSAN PILIHAN

2.2.2.1 Pertanian

2.2.2.1.1 Pertanian Tanaman Pangan

Pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha tanaman pangan dan hortikultura yang mampu menghasilkan produk mulai dari hulu sampai hilir.

Pembangunan tanaman pangan dan hortikultura memiliki orientasi untuk meningkatkan produktivitas dan produksi, efisiensi, nilai tambah dan daya saing sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani maupun masyarakat sekitarnya.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi sebagai SKPD yang melaksanakan sebagian dari fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang pertanian pada tahun anggaran 2011 memperoleh anggaran APBD Provinsi Jambi sebesar Rp14.855.000.000,00 yang dipergunakan untuk mendanai 9 program dengan 5 program utama, yaitu Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Peningkatan Produksi Pertanian, Program Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur/ Sarana Prasarana Pertanian dan Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Pasca Panen dan Pemasaran Hasil TPH (Domestik dan Internasional).

Dari program prioritas tersebut, pada tahun 2011 Provinsi Jambi mengalami peningkatan produksi padi sebesar 42.065 ton atau sebesar 6,69% jika dibandingkan tahun 2010, yaitu dari 628.828 ton GKG menjadi 670.893 ton GKG pada tahun 2011. Kenaikan produksi padi ini terjadi karena adanya peningkatan produktivitas sebesar 0,67 Kw/Ha (1,65%), serta didukung oleh peningkatan luas panen sebesar 7.636 Ha (4,96%).

Namun demikian, produktivitas tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015, yaitu sebesar 43,58 Kw/Ha, sementara produktivitas yang telah dicapai adalah sebesar 41,53 Kw/Ha. Hal tersebut disebabkan adanya musim kemarau yang cukup panjang di tahun 2011, sehingga lahan-lahan yang biasa ditanami padi ladang menjadi lebih kering dan pecah-pecah serta tidak memungkinkan untuk ditanami karena ketersediaan air tanahnya juga diragukan keberadaannya. Hal ini menyebabkan terjadinya penundaan jadwal tanam dan pergeseran musim tanam.

Komoditi Kedelai juga mengalami peningkatan produksi pada tahun 2011 yaitu dari 5.320 ton pada tahun 2010 menjadi 6.842 ton, atau meningkat sebesar 1.522 ton (28,61%), yang disebabkan karena peningkatan luas panen seluas 1.164 Ha (27,43%), demikian juga produktivitas kedelai yang mengalami peningkatan sebesar 0,12 Kw/Ha (0,93 %) dibanding tahun sebelumnya.

Untuk komoditi jagung, terjadi penurunan produksi jika dibandingkan dengan produksi pada tahun 2010 dari 30.691 ton menjadi 27.637 ton pada tahun 2011 atau mengalami penurunan sebesar 3.054 ton (9,95)%. Penurunan produksi jagung ini terjadi karena adanya pengurangan luas panen sebesar 979 Ha (11,82%) yang disebabkan oleh perubahan iklim yang ekstrim dan bencana alam kekeringan, sehingga banyak lahan produktif dan pertanaman yang mengalami Puso akibatnya terjadi pergeseran jadwal tanam.

Tabel 2.29 Perkembangan Realisasi Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Jambi Tahun 2010–2011

No	Uraian	2010	Aram III 2011	Perkembangan 2011 Thdp 2010	
				(+/-)	(%)
1.	<u>LUAS PANEN (Ha)</u>				
	Padi	153.897	161.533	7.636	4.96
	- Padi Sawah	124.557	136.321	11.744	9.43
	- Padi Ladang	29.320	25.212	-4.108	-14,01

No	Uraian	2010	Aram III 2011	Perkembangan 2011 Thdp 2010	
				(+/-)	(%)
	Jagung	8.280	7.301	-979	-11,82
	Kedelai	4.243	5.407	1.164	27,43
	Kacang Tanah	1.469	1.315	-154	-10,48
	Kacang Hijau	416	407	-9	-2,16
	Ubi Kayu	2.895	2.839	-56	-1,93
	Ubi Jalar	2.200	2.659	459	20,86
2. <u>PRODUKTIVITAS (Kw/Ha)</u>					
	Padi	40,86	41,53	0,67	1,65
	- Padi Sawah	43,15	43,54	0,39	0,91
	- Padi Ladang	31,15	30,69	-0,46	-1,47
	Jagung	37,07	37,85	0,78	2,12
	Kedelai	12,54	12,65	0,12	0,92
	Kacang Tanah	12,14	12,56	0,43	3,5
	Kacang Hijau	11,11	11,15	0,05	0,44
	Ubi Kayu	136,66	137,99	1,33	0,97
	Ubi Jalar	96,3	231,08	134,78	140
3. <u>PRODUKSI (Ton)</u>					
	Padi	626.828	670.893	42.065	6,69
	- Padi Sawah	537.505	593.520	56.015	10,42
	- Padi Ladang	91.323	77.373	-13.950	-15,27
	Jagung	30.691	27.637	-3.054	-9,95
	Kedelai	5.320	6.842	1.522	28,61
	Kacang Tanah	1.783	1.652	-131	-7,35
	Kacang Hijau	462	454	-8	-1,73
	Ubi Kayu	39.564	39.175	-389	-0,98
	Ubi Jalar	21.185	61.445	40.260	190

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2011

Nilai Tukar Petani (NTP)

Salah satu indikator yang dipergunakan untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai tukar petani (NTP) rata-rata Bulan Januari hingga Desember 2011, Sub Sektor Tanaman Pangan adalah 95,73 dan NTP rata-rata Sub Sektor Hortikultura adalah 93,96. Perkembangan NTP tahun 2011 selengkapnya dapat dilihat ada tabel berikut ini.

Tabel 2.30 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2011

No.	Bulan	Nilai Tukar Petani (NTP)	
		Sub sektor Tanaman Pangan	Subsektor Hortikultura
1.	Januari	96,84	96,77
2.	Februari	96,59	95,58
3.	Maret	96,39	94,88
4.	April	96,18	95,05
5.	Mei	96,89	94,76
6.	Juni	96,48	94,21
7.	Juli	96,04	94,29
8.	Agustus	94,96	93
9.	September	94,78	93,15
10.	Oktober	94,81	91,32
11.	November	95,5	92,07
12.	Desember	94,32	92,44
	Rata-rata	95,82	93,96

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2011

Menyikapi rendahnya NTP Provinsi Jambi pada tahun 2011, ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebabnya, yaitu :

- a. Indeks harga yang dibayarkan oleh petani (baik untuk keperluan rumah tangga petani ataupun untuk keperluan produksi pertanian) peningkatannya lebih cepat daripada indeks harga yang diterima petani, sehingga kemampuan nilai tukar petani menjadi lebih rendah.
- b. Terjadi transformasi pola konsumsi petani yang cenderung mengikuti pola konsumsi masyarakat perkotaan, dimana lebih banyak mengkonsumsi barang-barang yang sifatnya tidak produktif.
- c. Kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tambah terbesar ada pada kegiatan pengadaan dan perdagangan saprotan, alsintan, serta kegiatan pengolahan hasil dan perdagangan produk (*off-farm* dalam sistem agribisnis) yang jatuh pada mereka yang bukan petani, akibatnya nilai tambah yang dinikmati petani tetap kecil, sementara mereka yang berada pada ekonomi non-usahatani menikmati nilai tambah yang besar.

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, beberapa hal yang perlu dilakukan ke depan, antara lain : 1) Mengurangi beban belanja konsumsi rumah tangga petani dengan memberdayakan atau memanfaatkan pekarangan rumah untuk pengembangan tanaman pangan seperti cabe, sayur-sayuran, ikan, dll, 2) Meningkatkan peran Koperasi Agribisnis yang bergerak di tiga sub sektor: hulu, kegiatan usahatani dan hilir, serta menangani satu aliran produk sebagai bisnis inti (*core business*) sesuai dengan keunggulan masing-masing wilayah kabupaten/lokalita. Dengan demikian, pengembangan suatu komoditas mulai dari hulu sampai hilir dapat dilakukan, 3) Memperbaiki jalur distribusi/transportasi dari sentra produksi ke pasar, 4) Membangun gudang atau *Supply Base* untuk hasil pertanian yang mudah rusak, 5) Memperbaiki tata niaga produk pertanian, dan 6) Membangun industri hilir untuk barang jadi atau barang setengah jadi beserta kegiatan perdagangannya sehingga nilai tambah produk dapat dikuasai oleh petani.

1. Program Peningkatan Kesejahteraan petani

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani dalam rangka adopsi dan aplikasi penerapan teknologi yang sesuai dengan rekomendasi, sehingga nantinya diharapkan akan terjadi peningkatan produksi yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan serta kesejahteraan keluarga petani.

Pada Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dilaksanakan 3 kegiatan yaitu : a) Diklat Pasca Panen dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan sebanyak 1 angkatan dengan melibatkan 50 orang petani yang berasal dari Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi sebagai peserta; b) Diklat Agribisnis Kentang/Sayuran sebanyak 3 angkatan yang melibatkan 85 orang petani yang telah ditingkatkan pengetahuan serta keterampilannya, dan c) Diklat Agribisnis Padi Organik melatih petani sebanyak 25 orang dalam 1 angkatan.

2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program ini secara umum bertujuan mendorong terjadinya ketahanan pangan masyarakat. melalui pendekatan pengembangan kawasan, produksi dan sistem serta kelembagaan. Guna mendukung program tersebut maka dilakukan kegiatan untuk memfasilitasi segala sesuatu yang berhubungan dengan rancangan penyusunan program, anggaran, pengumpulan dan pelaporan serta kegiatan monitoring dan evaluasi yang berkaitan dengan ketahanan pangan masyarakat.

Melalui APBD Provinsi Jambi Tahun 2011 sebesar Rp775.937.500,00, melaksanakan program ini dengan melakukan kegiatan Pertemuan Mantri Tani, Rapat Teknis, Kegiatan Seminar serta Gelar Teknologi Pertanian yang dapat mendukung ketahanan pangan masyarakat.

3. Program Peningkatan Produksi Pertanian

Program Peningkatan Produksi Pertanian merupakan program yang memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembinaan dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, dengan tujuan antara lain : 1) Meningkatkan produksi dan produktivitas padi, jagung dan kedelai, 2) Meningkatkan produksi dan produktivitas sayuran organik, dan tanaman hias, 3) Meningkatkan pengembangan hortikultura, 4) Meningkatkan ketersediaan benih padi, benih sumber kedelai, jagung dan kacang tanah, benih sumber BPMT, kentang G1, G2 dan G3 di BBU, 5) Meningkatkan ketersediaan benih di penangkar, dan 6) Meningkatkan kelompok penangkar benih, dan meningkatnya ketersediaan benih padi gogo dan benih padi dataran tinggi hasil pemurnian.

4. Program Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur/ Sarana Prasarana Pertanian

Program Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur/Sarana Prasarana Pertanian merupakan program yang memfasilitasi

kegiatan-kegiatan pembinaan dengan tujuan antara lain sebagai berikut : a) Meningkatkan pengawasan pupuk dan pestisida di lapangan secara 6 tepat, b) Meningkatkan pembinaan pengembangan alsin dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan operator UPJA, c) Meningkatkan kelompok P3A/GP3A berprestasi, d) Meningkatkan kelompok tani TAM berprestasi, e) Meningkatkan ketersediaan SID cetak sawah, dan f) Meningkatkan produktivitas lahan.

5. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Pasca Panen dan Pemasaran Hasil TPH (Domestik dan Internasional)

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Pasca Panen dan Pemasaran Hasil TPH (Domestik dan Internasional) mempunyai tujuan antara lain : meningkatkan pengembangan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian serta meningkatkan promosi dan pelayanan informasi pasar.

Sementara itu, dari sisi Pendapatan Asli Daerah, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi pada tahun 2011 menargetkan PAD dari hasil retribusi jasa usaha berupa retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp161.000.000,00 (287,5%) dibanding target tahun 2010 yaitu sebesar Rp56.000.000,00. Realisasi tahun 2011 sebesar Rp165.056.000,00 (102,52%).

2.2.2.1.2 PERKEBUNAN

Pada tahun anggaran 2011 sektor perkebunan melalui Dinas Perkebunan provinsi Jambi memperoleh anggaran APBD Provinsi Jambi melalui APBD Murni sebesar Rp8.200.000.000,00 dan APBD Perubahan sebesar Rp10.171.300.000,00 dengan total dana Rp18.371.300.000,00 yang dipergunakan untuk mendanai program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Kegiatan yang dilakukan antara lain Pembinaan Perusahaan Perkebunan Besar dan RSPO, Pengembangan

Asosiasi Petani Perkebunan, Pelatihan Petani dan Petugas dalam Penentuan Kadar Karet Kering, Pembinaan Penangkar Benih Perkebunan dan Pelatihan Petugas Pengawas Benih Tanaman serta pemberdayaan pondok Pesantren di bidang perkebunan juga pembibitan kelapa sawit bersubsidi.

2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Kegiatan yang dilakukan program ini adalah dengan meningkatkan promosi dan Peluang Pasar serta Kerjasama IMT-GT, peningkatan Pengolahan dan Mutu Hasil Perkebunan (Model UPPB), Pembinaan dan Informasi Harga Pasar Lelang Karet serta Agribisnis Pemanfaatan Sabut dan Tempurung Kelapa, Pengawasan Peredaran Mutu Bibit Perkebunan dan Tata Niaga TBS serta Penerapannya, juga pengembangan/Peningkatan Jalan Produksi.

3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Untuk peningkatan penerapan teknologi pertanian telah dilakukan Fasilitasi Penyelesaian Gangguan Usaha Perkebunan (GUP), Pelatihan SID Aspek Pengelolaan Lahan dan Air, Pembinaan, Pengamatan, Pengendalian OPT Perkebunan dan Operasional UPPT, UPTD dan LH, Perbanyakan, Penyebaran dan Bintek Perbanyakan Agens Hayati, Pembinaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Alam, Dampak Lingkungan serta Percontohan Penerapan PLTB, Penyediaan Sarana Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan.

4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.

Kegiatan utama yang dilakukan dengan anggaran yang cukup besar, antara lain :

- 1) Pengembangan Karet Rakyat seluas 1.500 Ha. Kegiatan ini telah dimulai tahun 2006 yang lalu sampai dengan tahun 2011 telah dilaksanakan peremajaan dan pengembangan

karet rakyat melalui berbagai sumber pembiayaan seluas 86.127,4 Ha. Pengembangan karet sumber dana APBD P Provinsi tahun 2011 ini, dilaksanakan seluas 1.500 Ha yang didistribusikan bagi 7 kabupaten yaitu : Ma. Jambi 100 ha, Kabupaten Batanghari 250 ha, Kabupaten Bungo 250 ha, Kabupaten Tebo 275 ha, Kabupaten Sarolangun 275 ha, Kabupaten Merangin 300 ha dan Tanjab Barat 50 ha.

- 2) Pengembangan Kopi Robusta seluas 50 Ha yang dipusatkan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh memberikan dampak multi efek juga bagi peremajaan kebun kopi rakyat, meningkatkan penggunaan benih unggul kopi, meningkatkan produktivitas kopi rakyat, meningkatkan pendapatan petani kopi serta menggerakkan ekonomi di pedesaan wilayah sentra kopi. Adapun sejak tahun 2006 s/d tahun 2011 kebun kopi rakyat yang telah diremajakan adalah seluas 540 Ha.
- 3) Pengembangan/Peningkatan Jalan Produksi sepanjang 104,5 km melalui berbagai sumber dana (APBD dan Ditjen PLA) sejak 2006 telah dilaksanakan Pengembangan/peningkatan Jalan Produksi sepanjang 149,5 km. Jalan Produksi ini dilaksanakan di wilayah perkebunan rakyat, kondisi fisik jalan berupa pembentukan badan jalan selebar 6 m termasuk bahu dan parit di kedua sisinya serta diberi pengerasan. Adapun kegiatan ini memberikan manfaat bagi petani perkebunan berupa : membuka akses ke areal perkebunan rakyat, melancarkan transportasi dari dan ke kebun dalam pengangkutan sarana produksi dan produk hasil, serta membuka peluang pemasaran, sehingga meningkatkan harga jual dan menambah pendapatan petani, selain itu juga meningkatkan nilai harga lahan/kebun.
- 4) Pengembangan Sarana Irigasi Tata Air Mikro seluas 950 Ha melalui berbagai sumber dana (APBD dan Ditjen PLA) sejak 2006 s.d 2010 telah dilaksanakan Pengembangan / peningkatan Sarana Irigasi Tata Air Mikro seluas 2.302 ha.

Tata Air Mikro ini dilaksanakan di wilayah perkebunan kelapa rakyat di areal pasang surut, kondisi fisik Tata air mikro berupa embentukan parit-parit dan pintu air sederhana diantara blok-blok kebun kelapa. Hal ini dapat memberikan manfaat bagi petani kelapa dalam mengatur keluar masuknya air pasang, mengurangi dampak mengendapnya zat logam yang beracun bagi tanaman kelapa dan menghindari tergenangnya lahan.

- 5) Pembibitan Kelapa Sawit Bersubsidi sebanyak 70.000 batang. Adapun manfaat kegiatan ini adalah menekan penggunaan dan peredaran bibit kelapa sawit palsu, memenuhi kebutuhan petani akan benih unggul dengan harga terjangkau serta meningkatkan produktivitas kelapa sawit rakyat. Komoditi kelapa sawit dan karet mempunyai harga yang cukup baik sepanjang tahun 2011 dan tidak terlalu berfluktuasi.

2.2.2.1.3 PETERNAKAN

Pada tahun anggaran 2011 bidang peternakan melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi memperoleh anggaran APBD Provinsi Jambi sebesar Rp10.113.000.000,00 yang dipergunakan untuk mendanai program berikut:

1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program ini bertujuan untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dan penyakit hewan yang bersifat zoonosis (menular kepada manusia) strategis. Penyakit hewan strategis yang ditangani adalah SE (*Septicaemia epizooticae*), *Brucellosis*, AI (*Avian Influenza*), *Anthrax* dan *Rabies*. Untuk itu melalui program ini telah dilaksanakan vaksinasi SE terhadap ternak besar sebanyak 7.010 dosis; vaksinasi rabies sebanyak 2.000 dosis dan sosialisasi tentang penyakit rabies melalui penyebaran brosur rabies sebanyak 1.000 lembar.

Dalam menunjang kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan maka difungsikan laboratorium kesehatan hewan dan kesmavet (kesehatan masyarakat veteriner). Kegiatan yang dilakukan berupa pemeriksaan spesimen hewan, pangan asal hewan dan hasil pangan asal hewan yang dikirimkan oleh instansi teknis Kabupaten/Kota. Selain itu juga dilakukan pengambilan sampel secara langsung untuk jenis penyakit tertentu pada daerah yang diduga berpotensi sebagai sumber penular penyakit hewan strategis. Kegiatan laboratorium pada tahun 2011 antara lain berupa pembelian bahan kimia, pengadaan alat-alat laboratorium, pelayanan aktif servis deteksi dini dan pembinaan Lab Type C, pertemuan dan koordinasi laboratorium serta pengambilan sampel PAH/HPAH berupa susu, bakso, sosis, abon, nugget, daging sapi/kerbau, daging kambing dan dendeng.

2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Pada program ini dilaksanakan kegiatan yang mendukung peningkatan penyediaan daging ternak besar (sapi dan kerbau) dalam menunjang program nasional swasembada daging sapi 2014. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah pengembangan kawasan peternakan. Khusus untuk kawasan peternakan sapi potong, kegiatan utama yang dilakukan adalah peningkatan populasi melalui pemasukan sapi betina bibit serta perbaikan mutu genetis ternak melalui penerapan IB (Inseminasi Buatan).

Pada tahun 2011 ditargetkan kelahiran anak hasil IB sebanyak 6500 ekor. Untuk memberikan motivasi kepada petugas IB (Inseminator) dalam upaya pencapaian target kelahiran anak hasil IB maka diberikan insentif sebesar Rp50.000,00 per kelahiran melalui Inseminasi Buatan. Realisasi kelahiran anak hasil IB pada tahun 2011 sebanyak 3.363 ekor atau sebesar 66,15% dari target kelahiran. Masih belum tercapainya target IB ini salah satunya disebabkan karena terbatasnya petugas inseminator dan sarana pelayanan IB.

Sebagai upaya meningkatkan kinerja petugas IB dilapangan maka dilaksanakan pertemuan yang bertujuan menambah pengetahuan dan menggali permasalahan dilapangan untuk perbaikan kinerja serta meningkatkan silaturahmi antar petugas berupa Pertemuan Apresiasi Petugas IB se-Provinsi Jambi dan Pertemuan Evaluasi Kinerja Petugas IB.

3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

Kegiatan program ini dipusatkan di Kebun Binatang Taman Rimba, Kota Jambi. Pada tahun 2011, total dana yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp1.421.912.000,00 Kegiatan yang dilaksanakan berupa pemberian pakan satwa, pembelian obat-obatan, pembangunan kandang harimau, pembangunan rumah jaga, pembagunan sarana taman, penimbunan tanah dan pembangunan kandang orang utan. Kebun binatang Taman Rimba pada tahun 2011 mampu menyumbangkan PAD sebesar Rp1.203.000.000,00 dari target sebesar Rp600.000.000,00.

4. Program Peningkatan Fungsi Kesmavet

Pada program ini dilakukan kegiatan pengawasan peredaran pangan asal hewan berupa pemeriksaan sampel :

- a. Daging sapi sebanyak 30 sampel di pasar-pasar dalam 11 kab/kota
- b. Daging ayam sebanyak 30 sampel di pasar-pasar dalam 11 kab/kota
- c. Bahan olahan sebanyak 120 sampel di pasar dalam 11 kab/kota

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa cemaran mikroba TPC (total plate count) mencapai 100%, Coliform mencapai 13,33% Salmonella dan E. Coli Negatif. Hal ini menunjukkan bahwa PAH yang diuji sangat tinggi cemaran mikroba, yang disebabkan antara lain penanganan PAH mulai dari tempat produksi sampai di pasar-pasar masih jauh dari standard baik. Dari pemeriksaaan sampel olahan diperoleh hasil bahwa PAH yang beredar di

pasaran tidak ada yang mengandung oplosan daging babi atau daging lain yang tidak aman. Hasil pemeriksaan telah disampaikan kepada instansi teknis Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan berlaku.

2.2.2.1.4 KEHUTANAN

Pada Tahun Anggaran 2011 bidang kehutanan melalui Dinas Kehutanan Provinsi Jambi memperoleh anggaran APBD Provinsi Jambi sebesar Rp7.050.597.000,00. Untuk mendanai 6 Program dan 21 kegiatan. Berikut ini adalah uraian program dan kegiatan yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pada tahun 2011 yang dibiayai oleh APBD :

1. Program Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Program pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan ini secara umum memiliki tujuan agar terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek lingkungannya. Total dana yang dianggarkan untuk program ini adalah sebesar Rp254.268.300,00 melalui dana APBD Propinsi Jambi Tahun 2011.

2. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan ini didukung oleh 9 kegiatan yaitu :

Total dana untuk program ini adalah sebesar Rp2.733.236.700,00, dengan realisasi keuangan sebesar Rp2.202.686.310,00 atau sebesar 80,59%. Keberhasilan program ini dapat dilihat antara lain:

1. Terlaksananya kegiatan penanaman perempuan tanam danelihara pohon tingkat Provinsi Jambi.
2. Terlaksananya pemeliharaan atas tanaman unggulan lokal dan tanaman OBIT yang telah tertanam pada tahun sebelumnya.
3. Terlaksananya pemeliharaan tanaman di 2 Demplot HTR.

4. Terlaksananya orientasi batas sesuai target yaitu 279 km dan sosialisasi tata batas di 11 kecamatan dalam Provinsi Jambi.
5. Terjaganya kawasan hutan dari perambahan dan terselesaikannya 3 kasus tindak pidana kehutanan.
6. Terwujudnya konsep perubahan substansi kehutanan dalam tata ruang Provinsi Jambi yang telah melewati tahap uji konsistensi dari stakeholder dengan proses yang masih akan berlanjut di tahun 2012 mendatang.

3. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Program ini memiliki satu kegiatan pendukung yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan total dana sebesar Rp200.000.000,00. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam hal pengelolaan hutan secara optimal dan lestari, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan sekaligus meningkatnya tutupan lahan dan terjaganya kawasan hutan dari perambahan/*illegal logging*. Realisasi keuangan atas kegiatan ini adalah sebesar Rp174.670.800,00 atau sebesar 87,3%.

4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.

Program ini dilaksanakan dengan total dana Rp3.320.985.000,00, yang terdiri dari 7 kegiatan yaitu : 1) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, 2) Kegiatan pembangunan Taman Hutan Kenali dan Kebun Raya Bukit Sari, 3) Kegiatan Pengamanan dan Peredaran Hasil Hutan, 4) Kegiatan Penyuluhan Kehutanan, 5) Kegiatan Pengembangan Budidaya Anggrek dan Tanaman Hias, 6) Kegiatan Pengawasan dan Monitoring HPH/HPHTI, 7) Kegiatan Pengelolaan Tahura Sekitar Tanjung

5. Program Pengumpulan Data, Statistik dan Pemantapan Sistem Informasi/Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH

Program ini mempunyai satu kegiatan pendukung yaitu kegiatan Pusat Informasi Kehutanan Provinsi Jambi dengan anggaran

sebesar Rp367.107.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp349.876.249,00 atau sebesar 95,31%. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mewujudkan ketersediaan data dan informasi kehutanan Provinsi Jambi serta meningkatnya pengelolaan sektor kehutanan lewat kemudahan aksesibilitas dan ketransparanan informasi. Pada tahun 2011 melalui kegiatan ini telah terlaksana pameran pembangunan kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mengikuti Jambi Emas Expo, serta Kongres Kehutanan Indonesia Tahun 2011 di Jakarta.

6. Program Koordinasi Perencanaan dan Pembangunan.

Memiliki satu kegiatan prioritas yaitu kegiatan Perencanaan dan Monitoring Evaluasi dengan anggaran sebesar Rp175.000.000,00. Realisasi keuangan pada tahun 2011 adalah sebesar 94,3%. Kegiatan ini bertujuan mendapatkan suatu perencanaan program dan kegiatan yang sesuai dan dapat mendukung visi dan misi Gubernur terpilih. Dengan menggunakan prinsip anggaran berbasis kinerja, diharapkan berdasarkan perencanaan yang baik akan diperoleh realisasi kegiatan yang mengena pada sasaran. Realisasi dari kegiatan perencanaan dan monitoring evaluasi ini adalah telah terlaksananya Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011, terwujudnya Rencana Kerja Anggaran dan DPA Tahun 2012, tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2011.

2.2.2.2 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

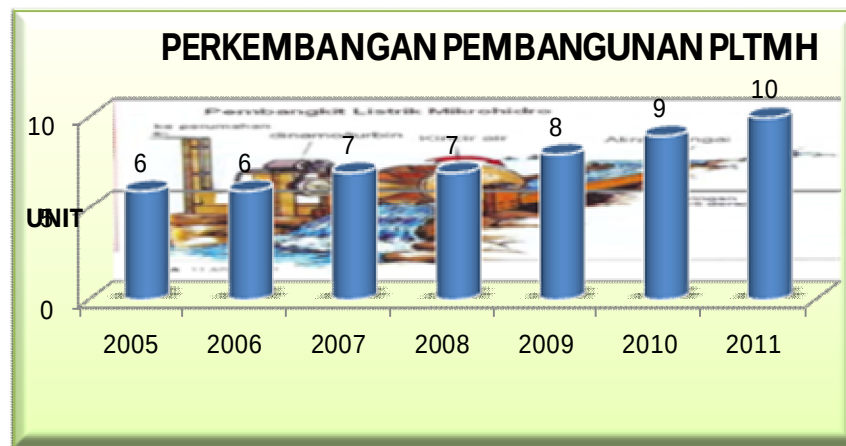
Pada tahun anggaran 2011 bidang energi dan sumber daya mineral melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi memperoleh anggaran sebesar Rp4.441.914.500,00 dengan tingkat penyerapan sebesar Rp4.279.987.423 atau sebesar 96,35% yang diarahkan untuk 5 program utama yaitu :

1. Program Pengembangan Energi

Program Pengembangan energi bertujuan dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana penyediaan energi bagi masyarakat. Ada 2 kegiatan utama dalam Program Pengembangan Energi, yaitu Pembangunan PLTMH dan jaringan, terutama bagi daerah-daerah yang belum terjangkau oleh jaringan listrik PT. PLN (persero), serta Pembangunan Biogas sebagai energi baru terbarukan. Untuk kegiatan Pembangunan dan Pengawasan pemanfaatan PLTMH, Jaringan dan Trafo, memperoleh alokasi dana sebesar Rp2.000.000.000 ,00 yang dialokasikan untuk pembangunan PLTMH dan jaringan sebanyak 1 unit di Kabupaten Bungo serta pengadaan trafo di Kabupaten Merangin dengan daya 200 KVA sebanyak 1 unit dan 50 KVA sebanyak 1 unit.

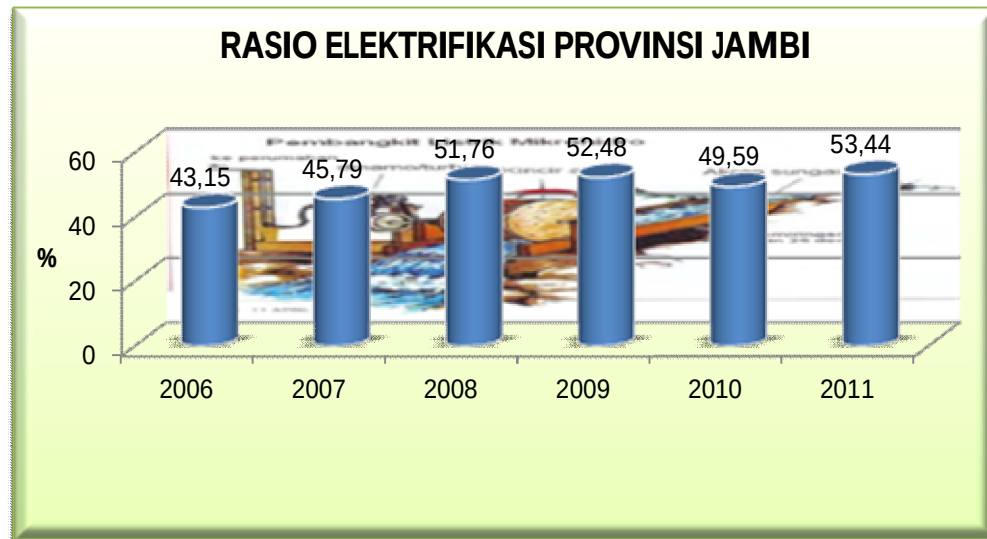
Secara keseluruhan hingga tahun 2011 telah terbangun PLTMH sebanyak 10 unit yang tersebar di Kabupaten Sarolangun, Merangin dan Bungo. PLTMH ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa yang sampai saat ini atau diperkirakan dalam 10 tahun ke depan belum tentu bisa mendapat listrik PLN, karena lokasinya cukup terpencil namun mempunyai potensi air terjun sebagai penggerak turbin PLTMH. Untuk melihat perkembangan jumlah PLTMH dari tahun 2005 – 2011 yang bersumber dari APBD Provinsi Jambi tergambar pada grafik di bawah ini.

Gambar 2.15 Perkembangan jumlah PLTMH di Provinsi Jambi



Selanjutnya terhadap perkembangan kelistrikan di Provinsi Jambi tergambarkan rasio elektrifikasi dari tahun 2006 – 2011 tertera pada grafik dibawah ini.

Gambar 2.16 Perkembangan Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi



Sejak Tahun 2010 Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi melaksanakan Pembangunan Biogas dalam rangka memanfaatkan kotoran sapi sebagai sumber energi alternatif yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Tahun 2010 pembangunan biogas dilakukan di 4 desa dalam 3 kabupaten yang berbeda, sedangkan untuk Tahun 2011 Pembangunan Biogas dilakukan di 6 (enam) lokasi.

Selain mendorong penggunaan kotoran sapi sebagai energi alternatif, Dinas Energi dan Sumber daya Mineral Provinsi Jambi juga melaksanakan Pembangunan Mesin Pengolah Bijih dalam rangka pemanfaatan jarak sebagai sumber energi alternatif guna mewujudkan Desa Mandiri Energi berbasis Nabati. Pembangunan Mesin Pengolah jarak dilakukan di Dusun Baru, Kecamatan Pelapat, Kabupaten Bungo.

2. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Berpotensi Merusak Lingkungan

Program ini bertujuan untuk menginventarisir kegiatan-kegiatan pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat. Pada tahun 2011 program ini mendapat alokasi dana sebesar Rp31.127.000,00 Fisik terealisasi 100% dan Keuangan terealisasi sebesar 93,51%, yang direalisasikan untuk melaksanakan kegiatan Inventarisasi Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Hingga tahun 2011 tercatat 386 Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang terdiri dari 261 IUP Eksplorasi dan 125 IUP Operasi Produksi yang tersebar di 7 kabupaten, yaitu Kabupaten Batanghari, Tebo, Bungo, Merangin, Sarolangun, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat. Kegiatan usaha pertambangan ini sangat rentang terhadap kerusakan lingkungan, kecelakaan kerja, dan dampak negatif lainnya, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan penertiban terhadap kegiatan pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan.

3. Program Peningkatan Aksesibilitas Pemda, Koperasi dan Masyarakat terhadap Jasa

Secara umum, program ini bertujuan untuk mengawasi perhitungan lifting Migas dan penyaluran Dana Bagi Hasil Migas serta untuk mensosialisasikan penggunaan LPG Tabung 3 Kg dan. Sebagai sumber penerimaan daerah, sektor ESDM telah memberikan kontribusi sekitar 7,5% dari Penerimaan Daerah melalui Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas maupun Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum melalui luran Tetap (*Landrent*) dan luran Produksi (*Royalty*). Sementara untuk kegiatan Sosialisasi Penggunaan LPG Tabung 3 kg dan kompor gas dilakukan dengan kelompok sasaran adalah masyarakat dan usaha mikro, untuk memasyarakatkan penggunaan kompor gas dan LPG tabung 3 kg sebagai sumber energi dalam kegiatan memasak sehari-hari.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam melakukan penambangan yang baik sehingga dapat terbina kegiatan usaha pertambangan umum dengan prinsip *Good Mining Practices* berkurangnya kegiatan PETI dan kerusakan lingkungan. Program ini difokuskan pada pengawasan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara serta perhitungan realisasi Dana bagi Hasil SDA Bidang Pertambangan Umum. Alokasi dana untuk program ini adalah sebesar Rp210.000.000,00 dimana kegiatannya telah terealisasi 100% dan Keuangan terealisasi sebesar 97,77%.

5. Program Optimalisasi Pemanfaatan SDA yang berwawasan Lingkungan

Program ini difokuskan untuk mengetahui potensi bahan galian industri, mineral batubara, panas bumi serta mendeteksi bencana alam geologi di Provinsi Jambi dengan menginventarisir data kondisi dan lokasi bencana geologi, kawasan sumberdaya warisan geologi, informasi geologi lingkungan untuk penataan ruang kawasan andalan, kawasan peruntukan pertambangan, dan kawasan lindung geologi, informasi air tanah untuk pemanfaatan dan pengelolaan air tanah. Adapun anggaran untuk melaksanakan program ini adalah sebesar Rp483.125.000,00 yang dialokasikan untuk kegiatan : Inventarisasi Warisan Geologi (KARS Topografi dan Fosil) yang telah dilakukan di Kabupaten Merangin dan Sarolangun, Monitoring Daerah Rawan Bencana Geologi yang diarahkan pada wilayah barat Provinsi Jambi seperti Kabupaten Sarolangun, Merangin, Bungo dan Kerinci, Penyelidikan Pendahuluan Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Inventarisasi Wilayah Kerja dan Pengembangan Sumur Tua Minyak Bumi dan Pengembangan Sistem Informasi Geografis.

2.2.2.3 PARIWISATA

Dalam ruang lingkup pariwisata, salah satu indikator keberhasilan yang tergambar adalah adanya peningkatan

jumlah kunjungan wisatawan dan perkembangan usaha pariwisata di Provinsi Jambi. Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2010 tercatat sebanyak 7.751 orang, terjadi peningkatan pada tahun 2011 sebanyak 8.543 orang (10,22%). Begitupun untuk kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) pada tahun 2010 sebanyak 957.760 orang, dan meningkat menjadi 1.122.350 orang pada tahun 2011 (17,19%).

Sementara itu untuk industri pariwisata di Provinsi Jambi, secara bertahap namun pasti menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan. Hal ini terbukti dengan bertambahnya jumlah hotel, restoran dan rumah makan, dan biro perjalanan wisata. Secara global perkembangan kunjungan wisatawan dan industri pariwisata di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4 Data Perkembangan Kunjungan Wisatawan dan Usaha Pariwisata di Provinsi Jambi

No	Indikator	Periode			Perkembangan (%)
		2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6
I. WISATAWAN					
A. MANCANEGARA					
Terdiri dari :					
1.	Singapura	1.158	1.168	1273	
2.	Malaysia	1.564	1.595	1692	
3.	Thailand	-	3	7	
4.	Philipina	10	16	18	
5.	China	2.114	2.156	2531	
6.	Taiwan	982	995	1094	
7.	Jepang	441	449	453	
8.	India	641	653	655	
9.	Amerika	540	553	557	
10.	Australia	12	16	19	
11.	Eropa	153	170	179	
12.	Arab Saudi	-	2	26	
13.	Iran	-	4	5	
14.	Istanbul	-	2	3	
15.	Denmark	-	2	4	
16.	Korea	-	6	12	
17.	Jerman	-	5	15	
T O T A L		7.615	7.751	8.543	10,22%

No	Indikator	Periode			Perkembangan (%)
		2009	2010	2011	
1	2	3	4	5	6
B.	Nusantara	861.540	957.760	1.122.350	17,19%
II.	Hotel :				
	- Bintang	22	23	23	0%
	- Melati	118	120	123	2,50%
III.	Restoran	42	48	53	10,42%
IV.	Rumah Makan	415	489	572	16,98%
V.	Wisata	51	55	56	1,82%

Dalam mendukung pembangunan bidang pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi mendapatkan alokasi dana APBD sebesar Rp1.656.763.550,00 untuk melaksanakan program sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Sasaran program ini adalah penyebaran informasi mengenai potensi kepariwisataan daerah Jambi ke berbagai segmen pasar. Pendukung dana APBD untuk program ini sebesar Rp508.150.000,00 dengan melaksanakan 3 (tiga) kegiatan; (a) Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata, (b) Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri, dan (c) Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam Daerah.

Aktifitas yang telah dilaksanakan antara lain mengikuti promosi pariwisata pada event Gebyar Wisata Budaya Nusantara di Jakarta dan Kemilau Sumatera di Nangroe Aceh Darussalam, Famtrip ke Bukit Duabelas, melaksanakan pameran potensi pariwisata pada Jambi Emas Expo, Pekan Pesona Budaya Jambi Expo, dan Festival Masyarakat Danau Kerinci, serta melaksanakan pengkayaan materi pada website www.tourismjambi.com.

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Sasaran program ini adalah untuk meningkatkan kualitas objek daerah tujuan wisata Provinsi Jambi melalui kegiatan Pengembangan Objek wisata unggulan. Melalui program ini diharapkan dapat mendorong terlaksananya Pengembangan sarana dan prasarana objek pariwisata unggulan, pengembangan

dan penguatan informasi dan data base potensi objek destinasi wisata, pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata.

Masih rendahnya daya dukung pariwisata seperti akses sarana dan prasarana yang masih kurang, keterlibatan stakeholder yang kurang terpadu, SDM pengelola pariwisata (pemandu wisata) menjadi pekerjaan rumah yang harus ditingkatkan terhadap pengembangan Destinasi pariwisata. Untuk itu koordinasi, sinkronisasi, integrasi serta sinergitas dari pemerintah, Swasta dan Masyarakat seluruh stakeholder pariwisata agar terus ditingkatkan dalam memaksimalkan segala peluang dan potensi pariwisata yang ada.

3. Program Pengembangan Kemitraan

Program ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan koordinasi antara Pemerintah dan pelaku usaha pariwisata dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan dan melestarikan potensi pariwisata Jambi. Kegiatan yang dilaksanakan adalah: (a) Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata, dan (b) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata, dengan alokasi dana APBD sebesar Rp288.933.550,00.

Capaian kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain; pengenalan produk wisata di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo, pemberdayaan masyarakat di sekitar objek wisata di Kawasan Candi Muara Jambi dan Taman Rimba, serta pembinaan desa PNPM Pariwisata.

2.2.2.4 KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan produk hasil perikanan sehingga mempunyai nilai jual serta meningkatkan dukungan pengembangan usaha pengolahan

dalam aspek kualitas dan kuantitas dari unit-unit pengolahan dan pemasaran.

Adapun sasaran dari program ini yaitu meningkatnya ketersediaan pangan dari produksi yang berbasis lokal. Total dana yang dibutuhkan untuk mendukung program ini yaitu : Rp 636.060.000,00, dengan kegiatan sebagai berikut: 1) Promosi dan Publikasi kegiatan sektor perikanan, 2) Peningkatan pelayanan LPPMHP, 3) Pengembangan sentra pemasaran.

Adapun output dari Program ini yaitu: 1) Terpublikasikannya kegiatan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan, khususnya untuk olahan sebanyak 5 kali, 2) Terciptanya pelayanan pengujian mutu hasil perikanan, khususnya memonitor kesegaran ikan, residu, dan bahan berbahaya, 3) Tersusunnya peta jaringan pemasaran guna meningkatnya kegiatan pemasaran komoditas perikanan di sentra-sentra pemasaran melalui.

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam mensukseskan program ini, yaitu pasokan bahan baku terkadang tidak kontinyu, sehingga menyulitkan bagi para pedagang, untuk memenuhi permintaan pasar. Solusinya yaitu dengan mengalihkan bahan baku dari ikan laut menjadi ikan air tawar hasil budidaya.

2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi berkembangnya usaha perikanan ditingkat pembudidaya ikan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Sasaran program ini yaitu meningkatnya pendapatan pembudidaya skala kecil. Dana dalam pelaksanaan program ini yaitu : Rp 667.290.000,00. Adapun Kegiatan yang mendukung program pengembangan kesejahteraan petani yaitu: 1) Pengembangan kolam perkarangan masyarakat, 2) Pembinaan pondok pesantren, 3) Pemberdayaan desa mandiri pangan. 4) Restocking Ikan Perairan Umum

Adapun output dari kegiatan ini, 1) Terwujudnya pengembangan kolam pekarangan masyarakat, dengan penyediaan benih 20.000 ekor. 2) Terwujudnya bantuan benih ikan

di desa Mandiri Pangan sebesar 36.700 ekor. 3) Terlaksananya penebaran benih ikan untuk tujuan restocking sebanyak 300.000 ekor. Sedangkan capaian dari Program ini yaitu bertambahnya pendapatan dari pelaku usaha perikanan. Hal ini terlihat dari peningkatan pendapatan nelayan/pembudidaya ikan yang mengalami kenaikan sebesar 3,5% pertahun. Pendapatan pembudidaya ikan pada tahun 2010 sebesar Rp 11.200.000 pertahun dan tahun 2011 sebesar Rp 12.600.000,00 pertahun sehingga naik sebesar 12,5% pertahun. Sedangkan pendapatan nelayan pada tahun 2010 sebesar Rp48.300.000,00 dan tahun 2011 sebesar Rp 49.000.000,00 naik sebesar 1,10% pertahun.

3. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Tujuan dari program ini yaitu untuk mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan sumberdaya perikanan secara optimal dan berkelanjutan dalam rangka peningkan nilai tambah hasil perikanan serta pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya. Sasaran dari program ini yaitu optimalnya pemanfaatan sumberdaya perikanan di pesisir. Dana dalam pelaksanaan program ini yaitu Rp75.032.000,00. Sedangkan kegiatan yang mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yaitu Pemberdayaan ekonomi, sosial budaya dan masyarakat pesisir

Adapun output dari program/kegiatan ini yaitu Terlaksananya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, dalam bentuk bantuan 20.000 ekor ikan. Sedangkan capaian dari Program ini yaitu terwujudnya pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang berkelanjutan. Hal ini tergambar dengan semakin banyaknya bertambahnya prosentase masyarakat pesisir yang melakukan usaha budidaya ikan di tambak, dengan kenaikan mencapai 5,8% sedangkan nelayan perikanan laut peningkatannya hanya 3,2%. Dengan demikian masyarakat pesisir yang selama ini menggantung mata pencahariannya dari usaha penangkapan ikan di laut, telah berganti secara bertahap ke usaha budidaya tambak.

Tabel 2.31 Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja tahun 2010 – 2011

No	Jenis Usaha	Jumlah RTP/Tahun		Perkem bangan
		2010	2011*	
1	Perikanan Laut	2.437	2.517	3,2
2	Perairan umum	8.674	8.774	1,1
3	Budidaya kolam	10.170	10.645	4,7
4	Keramba dan Japung	6.844	7.422	8,4
5	Budidaya tambak	775	819	5,8
6	Budidaya mina padi	84	97	16,1
J u m l a h		28.984	30.274	3,1

4. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi ikan dari sektor budidaya perikanan yang ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menuju industrialisasi perikanan budidaya. Sasaran program ini yaitu meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup pembudidaya. Dana dalam pelaksanaan program ini yaitu Rp3.027.848.000,00

Adapun output dari kegaitan ini yaitu: Terlaksananya pengembangan pembenihan ikan komersil 1) Terlaksananya pengembangan benih ikan komersil, berupa induk ikan, 4 ekor induk ikan Arwana dan 10 ekor induk ikan Koi, 2) Terlaksananya pengembangan ikan hias sebanyak 4 paket, 3) Terlaksananya pengembangan budidaya ikan di BBIS Kerinci, 4) Terlaksananya pengembangan proksimas ikan semah sebanyak 16.000 ekor benih, 5) Terlaksananya pengembangan budidaya ikan organik sebanyak 39.000 ekor benih, 6) Terlaksananya pengembangan budidaya ikan di kolam dengan 420.000 ekor benih, 7) Terlaksananya pengembangan air payau sebanyak 105 ekor benih, 8) Terlaksananya pengembangan unit pengolahan ikan perikanan budidaya, 9) Terlaksananya pengembangan budidaya air tawar di KJA, 10) Terlaksananya pengembangan minapolitan budidaya.

Tabel 2.32 Perkembangan Produksi Perikanan menurut jenis usaha tahun 2010-2011

No	Jenis Usaha	Produksi (ton)		Perkembangan (%)
		2010	2011*	
1	Kolam	15.840,00	19.915,30	25,7
2	Keramba	15.988,00	17.923,60	12,1
3	Tambak	2.097,00	2.252,20	7,4
4.	Mina Padi	8,3	8,4	1,2
Jumlah		84.881,50	91.616,20	18,2

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kenaikan produksi tertinggi di tahun 2011 pada perikanan budidaya kolam sebesar 25,7 %, kenaikan produksi terendah terjadi pada Mina Pada yaitu 1,2% Sedangkan secara keseluruhan produksi budidaya naik sebesar 18,2 %. Sedangkan kendala yang dihadapi dalam mensukseskan program ini, yaitu makin menurunnya kondisi kualitas air, khusus kualitas air di sungai yang biasa digunakan untuk membudidayakan ikan di keramba jaring apung (KJA).

5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program ini bertujuan untuk mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan sumberdaya perikanan secara optimal dan berkelanjutan khususnya dibidang penangkapan ikan. Sasarannya adalah meningkatnya nilai tambah hasil peangkapan serta pendapatan nelayan. Adapun kegiatan yang mendukung program pengembangan perikanan tangkap yaitu :1) Optimalisasi Penangkapan Ikan (Revitaliasi Perikanan Tangkap), 2) Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), 3) Pembuatan Kapal Perikanan ≥ 30 GT dan Alat Tangkap, 4) Pengembangan Minapolitan Perikanan Tangkap.

Sasaran dari program ini yaitu tercapainya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan melalui penyediaan fasilitas/keperluan bagi nelayan untuk melaut. Hal ini tergambar peningkatan produksi perikanan

tangkap, dimana jumlah keseluruhannya mengalami peningkatan dari 50.945,3 ton pada tahun 2010 naik menjadi 51.516% pada tahun 2011 atau mengalami kenaikan sebesar 1,12%

Tabel 2.33 Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 2010 dan 2011

No	Jenis Usaha	Produksi (ton)		Perkembangan (%)
		2010	2011*	
I.	Perikanan Tangkap			
	a. Perairan Laut	44.523,30	44.700,90	0,4
	b. Perairan Umum	6.424,00	6.815,80	6,1
	Jumlah	50.945,30	51.516,70	1,12%

6. Program Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan. Sasaran dari program ini yaitu meningkatnya peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan.

Dana dalam pelaksanaan program ini Rp75.193.000,00 sedangkan kegiatan yang mendukung program peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan yaitu : Pengawasan Terpadu Penangkapan Ikan

Pencapaian dari program ini yaitu meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian sumberdaya hayati ikan melalui pengawasan kegiatan penangkapan ikan yang merusak kelestarian sumberdaya ikan, seperti penggunaan listrik, racun dan bahan peledak. Hal ini terlihat dari tingkat pelanggaran penangkapan ikan menurun sebesar 100 % dari tahun sebelumnya, dimana tahun 2010 pelanggaran perikanan sebanyak 8 kasus, sedangkan pada tahun 2011 tidak ditemukan pelanggaran penangkapan ikan.

7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan serta pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan. Sasaran dari program ini yaitu meningkatnya perlindungan sumberdaya alam dan pengelolaan kawasan konservasi. Dana dalam pelaksanaan program perlindungan dan konservasi sumber daya alam ini sebesar Rp248.004.000,00